

BUKU AJAR PERKULIAHAN

SEJARAH PEREKONOMIAN

**Disusun oleh
Yulia Siska, M.Pd.**



Bandarlampung, 2016

PRAKATA

Buku *Sejarah Perekonomian* sengaja ditulis untuk dijadikan sebagai bahan bacaan, pegangan, buku belajar bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah dan atau pembaca lainnya yang berminat untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah perekonomian dunia – Indonesia.

Kehadiran buku ini dapat dianggap sebagai penambah khasanah keramaian buku-buku sejarah di tanah air, terkhusus yang sampai beredar di Lampung dan sekitarnya. Seperti yang coba diungkapkan oleh buku ini, sebenarnya tidak ada ‘sejarah yang tidak dapat dibuktikan’, kecenderungan dari “tokoh, ahli, teori, paham tertentu”, atau terapan pada sejarah apapun juga, terkhusus yang menyangkut sejarah perekonomian. Dimulai dari bagian awal mengenai sejarah pemikiran ekonomi dunia, dari klasik sampai modern, kemudian aliran dan kebijakan juga perkembangan perekonomian suatu bangsa tertentu hingga bagian akhir yang lebih banyak mengupas rentetan historis perekonomian di tanah air, bahkan permasalahan yang muncul dan perlu dicarikan solusi terbaik bagi negara ini, Indonesia.

Buku ini dicoba disusun dengan bahasa yang lugas, pengertian dan sintesis dari teori-teori yang “terbaca dan terjangkau”. Kata yang tercetak dari teori untuk menjadi jenis bahasa ‘biasa’ yang selalu tersedia secara alamiah bagi semua orang, pun merupakan sejarah tertentu.

Betapa pun sederhananya sebuah buku, proses penulisannya selalu saja tidak akan terlepas dari berbagai pihak. Hal itu merupakan kontribusi berharga yang bermuara pada kehadiran buku ini kepada pembaca sekalian. Untuk itu, dengan rendah hati dan rendah diri saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam hal apapun.

Bandarlampung, 2 Maret 2016
Penulis,

Yulia Siska, M.Pd

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI

A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Perintis Sosialis.....	1
B. Pemikiran Ekonomi Merkantilisme.....	2
C. Aliran Fisiokratisme (Physiocrats)	9

BAB II SISTEM EKONOMI

A. Pengertian Sistem Ekonomi.....	23
B. Macam-macam Sistem Ekonomi	25
C. Sistem Perekonomian di Indonesia	34

BAB III HISTORIOGRAFI PEREKONOMIAN EROPA

A. Eropa Abad Pertengahan (Gilda)	47
B. Liberalisme di Eropa.....	52
C. Kapitalisme	65
D. Budaya Kapitalis Barat.....	67
E. Revolusi Industri	71
F. Revolusi Industri Kedua	77
G. Dampak Revolusi Industri	78

BAB IV SISTEM EKONOMI DAN PENGALAMAN SEJARAH

A. Antara Kapitalisme & Sosialisme.....	81
B. Sistem Ekonomi Barat.....	81
C. Sistem Ekonomi Asia.....	82
D. Sistem Ekonomi Pasar Sosial.....	88
E. Sistem Ekonomi Dualisme.....	93
F. Sistem Ekonomi Sosialis Indonesia.....	95
G. Sistem Ekonomi Pancasila.....	96
H. Sistem Ekonomi Kerakyatan.....	98

BAB V VEREENIGDE OOST INDISCHE COMPAGNIE-VOC-

A. Imperialisme dan Kolonialisme Barat	101
B. VOC sebagai Kekuatan (Kongsi Dagang).....	110
C. Bubarnya VOC.....	114
D. Simpulan	115

BAB VI SISTEM SEWA TANAH DAN FEODAL JAWA

A. Sistem Sewa Tanah (1811-1830)	117
B. Pajak Tanah.....	122
C. Penanaman Tanaman Perdagangan	123
D. Permasalahan Pelaksanaan Sistem Sewa Tanah.....	124

BAB VII TANAM PAKSA (CULTUUR-STELSEL): EKSPLOITASI EKONOMI KOLONIAL

A. Raffles Berkuasa di Hindia Belanda.....	127
B. Ketentuan Tanam Paksa.....	129
C. Pelaksanaan Tanam Paksa.....	132
D. Dampak Penerapan Sistem Tanam Paksa	138

BAB VIII RANGKUMAN PERIODE SEJARAH EKONOMI INDONESIA

A. Masa Sebelum Kemerdekaan	143
B. Pada Masa Orde Lama	145
C. Ekonomi Pada Masa Orde Baru (1965-1998)	153
D. Pemerintahan Reformasi (1967-2004).....	158
E. Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I (Era SBY-JK 2004-2009).....	160
F. Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II (Era SBY – Boediono, 2009-2014)	162

BAB IX MASALAH PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA

A. Permasalahan Ekonomi Indonesia.....	166
B. Koperasi, Solusi Masalah Perekonomian Indonesia	169

DAFTAR PUSTAKA	173
----------------------	-----

BAB I

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI

Sejarah ekonomi di masa pra klasik adalah di mana pada saat itu manusia belum semuanya mengetahui tentang ekonomi, walaupun dimasa itu juga sudah terjadi barter atau dengan kata lainnya pertukaran antara barang-barang yang di anggap berharga dengan kebutuhan ekonomi seperti makanan, pakaian dan masih banyak lagi yang lainnya.

A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Perintis Sosialis

1. Konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 SM, masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk tentang cara-cara berekonomi.
2. Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi mencerminkan pola pikir tradisi kaum ningrat. Ia memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Plato menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara dan penganejaragaman (diversifikasi) pekerjaan dalam masyarakat merupakan keharusan, karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi sendiri berbagai kebutuhannya. Inilah awal dasar pemikiran Prinsip Spesialisasi kemudian dikembangkan oleh Adam Smith.
3. Aristoteles merupakan tokoh pemikir ulung yang sangat tajam, dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern sebab analisisnya berpangkal dari data. Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik, melalui tukar-

menukar. Aristoteleslah yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga, uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja, jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta/mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif.

4. Xenophon seorang prajurit, sejarawan dan murid Socrates yang mengarang buku *Oikonomikus* (pengelolaan rumah tangga). Inti pemikiran Xenophon adalah pertanian dipandang sebagai dasar kesejahteraan ekonomi, pelayaran dan perniagaan yang dianjurkan untuk dikembangkan oleh negara, modal patungan dalam usaha, spesialisasi dan pembagian kerja, konsep perbudakan dan sektor pertambangan menjadi milik bersama.
5. Thomas Aquinas (1225-1274) seorang filosof dan tokoh pemikir ekonomi pada abad pertengahan, mengemukakan tentang konsep keadilan yang dibagi dua menjadi keadilan distributif dan keadilan konvensional, dengan menegakkan hukum Tuhan maka dalam jual-beli harus dilakukan dengan harga yang adil (*just-price*) sedang bunga uang adalah riba. Tetapi masalah riba, upah yang adil dan harga yang layak ini merupakan masalah yang terus-menerus diperdebatkan dalam ilmu ekonomi.

B. Pemikiran Ekonomi Merkantilisme

Merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai 17, dan berasal dari kata *merchand* yang artinya pedagang. Walaupun para ahli masih meragukan apakah merkantilisme benar merupakan suatu aliran/mazhab atau bukan, namun aliran ini memiliki dampak yang besar dalam perkembangan teori ekonomi.

Aliran ini timbul pada masa ketika perdagangan antar negara semakin berkembang pesat. Kalau di masa sebelumnya

masyarakat dapat mencukupi kebutuhannya dengan dengan memproduksi sendiri, pada masa merkantilisme ini berkembang paham bahwa jika sebuah negara hendak maju, maka negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan negara lain, surplus perdagangan berupa emas dan perak yang diterima merupakan sumber kekayaan negara.

Berdasarkan pandangan baru kaum merkantilisme yang berkembang pesat pada zaman itu, banyak negara Eropa yang membangun perekonomiannya dengan upaya ekspor ke negara lain, dan sedapat mungkin mengurangi impor. Paham yang dianut kaum merkantilisme adalah:

- a. surplus perdagangan suatu negara merupakan tanda kekayaan negara tersebut
- b. pemilikan logam mulia berarti pemilikan kekayaan
- c. dalam suatu transaksi perdagangan, akan ada pihak yang mendapat keuntungan dan ada pihak yang menderita kerugian.

1. Tokoh-tokoh Merkantilisme

a. Thomas Mun

Dalam bukunya yang berjudul *England Treasure by Foreign Trade*, Thomas Mun menulis tentang manfaat perdagangan luar negeri. Ia menjelaskan bahwa perdagangan luar negeri akan memperkaya negara jika menghasilkan surplus dalam bentuk emas dan perak. Keseimbangan perdagangan hanyalah perbedaan antara apa yang diekspor dan apa yang diimpor. Ketika negara mengalami surplus perdagangan, ini berarti ekspor lebih besar daripada impor.

Lebih lanjut, Thomas Mun menjelaskan bahwa perdagangan domestik tidak dapat membuat negara lebih makmur, karena perolehan logam mulia dari seorang warga negara adalah sama dengan hilangnya logam mulia dari warga negara yang lain. Dengan meningkatkan persediaan uang domestik sebagai hasil

dari surplus perdagangan ternyata dapat juga memunculkan bahaya karena orang akan terpancing untuk membeli lebih banyak barang-barang mewah. Hal ini menyebabkan harga barang dalam negeri akan naik dan pada akhirnya akan mengurangi ekspor karena barang-barang yang diproduksi di dalam negeri akan terlalu mahal bila dijual di luar negeri. Konsekuensi ini bisa dihindari yaitu dengan melakukan investasi kembali. Reinvestasi ini akan menciptakan lebih banyak barang untuk diekspor.

Mun mengakui bahwa betapa pentingnya investasi modal dan Ia memandang keseimbangan perdagangan merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan modal produktif.

Untuk mendorong surplus ada tiga langkah yang harus dijalankan :

- 1) Dengan Kebijakan Harga

Barang yang di ekspor haruslah dijual dengan harga terbaik yaitu harga yang menghasilkan pendapatan dan kekayaan yang paling banyak. Ketika negara memiliki monopoli atau mendekati monopoli di dunia perdagangan maka barang-barangnya harus dijual dengan harga tinggi, tetapi ketika persaingan luar negeri sangat ketat harga barang harus ditekan serendah mungkin. Hal ini akan menghasilkan lebih banyak penjualan bagi negara dan membantu mengalahkan pesaing. Ketika pesaing asing lenyap, harga ditingkatkan kembali tetapi tidak sampai pada tingkat dimana pesaing tertarik untuk kembali ke dalam pasar.

- 2) Meningkatkan Kualitas Produk

Pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas produk dengan cara mengatur para pengusaha pabrik dan membentuk dewan perdagangan yang akan memberikan nasehat kepada pemerintah dalam persoalan-persoalanyang berkaitan dengan peraturan perdagangan dan kegiatan industri. Peraturan-peraturan ini harus tegas agar negara dapat memproduksi barang dengan kualitas yang tinggi.

3) Kebijakan Pajak Nasional

Dalam hal kebijakan pajak, pemerintah harus dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dan swasta. Bea ekspor harus lebih kecil karena bea ini akan dimasukkan dalam biaya penjualan di luar negeri. Bea impor harus rendah untuk barang-barang yang kemudian akan di ekspor kembali dan harus tinggi untuk barang-barang yang cenderung dikonsumsi oleh warga sendiri.

b. Willam Petty

Dalam bukunya “Political Arithmetic” pada tahun 1671, Petty memberi sumbangan teori penting untuk ilmu ekonomi. Ia adalah ahli ekonomi pertama yang menjelaskan sewa tanah berdasarkan surplus.

Untuk memahami gagasan surplus ini bayangkan ekonomi pertanian primitif yang hanya menanam jagung. Pada saat itu jagung merupakan input proses produksi dan sekaligus output. Sebagai input jagung jagung dipakai sebagai benih dan dimakan oleh pekerja. Pada akhir tahun jagung akan dipanen dan digunakan sebagai bahan pangan dan bibit untuk tahun depan.

Petty mendefinisikan surplus sebagai selisih antara total output dari jagung (saat panen tahunan) dan input dari jagung yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Menurut Petty pemilik tanah akan cenderung menerima pembayaran sewa yang sebanding dengan surplus surplus yang dihasilkan oleh lahan mereka. ($\text{surplus} = \text{total output} - \text{input}$). Tak seorang pun akan menyewakan lahan dengan biaya sewa melebihi surplus yang dihasilkan lahan tersebut karena penyewa akan kehilangan uang/pendapatan.

Merkantilisme berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Aliran merkantilis adalah suatu aliran yang mempunyai keyakinan bahwa suatu negara akan maju, jika melakukan perdagangan dengan negara lain. Melalui

perdagangan luar negeri tersebut, negara akan memperoleh surplus perdagangan luar negeri yang berarti dana akan masuk ke dalam negeri, baik dalam bentuk emas atau perak.

Dengan demikian, aliran merkantilis berkesimpulan bahwa sumber kekayaan negara berasal dari perdagangan luar negeri, dan uang dalam bentuk emas atau perak menjadi sumber kekuatan bagi negara. Paham merkantilis berkembang di Eropa pada abad XVI dan XVII, yaitu di Spanyol, Prancis, Inggris, dan Belanda.

2. Merkantilisme di Spanyol

Perang Salib mengakibatkan terjadinya perdagangan antara negara-negara Eropa dengan negara-negara Timur Tengah. Namun, jalur perhubungan darat ke India (jalur Kafilah) sangat berbahaya dan mahal. Sampai akhirnya Vasco Da Gama dari Portugis menemukan jalur laut yang lebih murah dengan berlayar mengelilingi Afrika.

Suatu perjalanan yang dilakukan oleh Columbus untuk mencari jalur yang lebih pendek menuju India berhasil menemukan benua Amerika. Ekspedisi Columbus tersebut dibiayai oleh Spanyol, sehingga membuat Spanyol menjadi negara yang memenangkan perlombaan dalam persaingan untuk mendapatkan barang dagangan berupa emas dan perak, juga daerah untuk memasarkan produknya.

3. Merkantilisme di Prancis

Pada zaman Raja Louis XVI yang menjadi Menteri Perdagangan dan Keuangan adalah Jean Baptiste Colbert, yang menjadi seorang diktator. Tujuan kebijakan Colbert lebih diarahkan kepada kekuasaan dan kejayaan negara daripada untuk meningkatkan kekayaan setiap orang. Ia berjuang keras untuk memajukan industri dan perdagangan Prancis, sehingga di Prancis paham merkantilisme terkenal dengan sebutan Colbertisme.

Tindakan yang dilakukan Colbert di antaranya:

- a. melarang ekspor hasil pertanian dan bahan baku
- b. melarang ekspor emas dan perak
- c. intervensi pemerintah dalam bidang pengawasan hasil industri, memberikan bantuan pada perusahaan yang baru berdiri serta negara mendirikan perusahaannya sendiri
melarang adanya emigrasi dan menganjurkan imigrasi karena negara kekurangan penduduk
- d. memperluas daerah jajahan.

4. Merkantilisme di Inggris

Di Inggris, merkantilisme dimulai pada zaman pemerintahan Raja Henry VII sampai zaman Ratu Elizabeth. Pada pemerintahan Ratu Elizabeth I, tokoh merkantilis yang terkenal adalah Perdana Menteri Cromwell (1558 – 1603).

Tindakan-tindakan yang dilakukan Cromwell adalah:

- a. melindungi perikanan dengan cara melarang rakyat memakan daging pada hari-hari tertentu dan menggantinya dengan ikan
- b. melindungi peternakan dan industri wol melalui undang-undang peci, yaitu setiap pria berusia di atas enam tahun harus mengenakan peci dari wol
- c. mengeluarkan undang-undang pelayaran yang disebut Act of Navigation yang berisi bahwa semua kegiatan ekspor dan impor dari dan ke Inggris harus menggunakan kapal Inggris.

5. Merkantilisme di Belanda

Merkantilisme di Belanda berlaku sejak dibentuknya VOC, yaitu pada tahun 1602. Praktek merkantilisme Belanda diberlakukan tidak hanya di negaranya tetapi juga di semua negara

jajahannya, termasuk Indonesia. Tujuan merkantilisme Belanda adalah:

- a. memperluas daerah koloni
- b. mencari bahan baku untuk industri berupa rempah-rempah, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, dan lada
- c. memperluas daerah pemasaran

Merkantilisme muncul pertama kali pada abad tujuh belas dan pertengahan pertama abad delapan belas saat terbit bukunya Adam Smith pada tahun 1776 yaitu 'Wealth of Nation', yang mendiskusikan mengenai "System of Political Economy". Buku tersebut mereview apa yang disebut Smith dengan "the commercial or mercantile system". Pemikiran Smith tersebut banyak dikritik pada saat itu.

Ia menghambat kelemahan dari sistem merkantilisme dan mengarahkannya ke dalam sistem yang kuat miliknya tentang kebebasan ekonomi. Menurutnya sistem merkantilis adalah suatu penipuan yang dilakukan oleh kelas bisnis kepada publik. Apa yang disebut Smith dengan sistem merkantilis selanjutnya disebut dengan merkantilisme.

Merkantilisme saat ini dipahami sebagai bundel gagasan dan sebagai suatu latihan di dalam keahlian sebagai negarawan. Perkembangan ini melawan latar belakang persaingan dan peperangan antara kekuatan-kekuatan hebat di Eropa, dimana pada saat itu kedamaian hanya terjadi pada satu periode antara tahun 1600-1667. Munculnya ajaran merkantilisme berhubungan dengan munculnya England dan British Empire sebagai kekuatan dunia.

- a. Merkantilis merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme serta politik kolonial, ditujukan dengan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan .

- b. Pemikiran-pemikiran ekonomi lahir pada kaum merkantilis disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di dalam masyarakat, pembagian kerja secara teknis dan pembagian kerja teritorial, yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional.
- c. Pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri, dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan, sementara itu terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri, kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah. Proteksi industri yang menganjurkan persaingan dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah mendorong ekspor.
- d. Teori kuantitas uang didasarkan pada jumlah uang yang beredar mempengaruhi tingkat bunga dan tingkat harga barang. Ke luar masuknya logam-logam mulia mempengaruhi tingkat harga di dalam negeri serta jumlah uang yang beredar, dan kecepatan uang beredar.
- e. Kebijakan ekonomi lebih bersifat makro, hal ini berhubungan dengan tujuan proteksi industri di dalam negeri, dan menjaga rencana perdagangan yang menguntungkan, hal ini dilakukan dalam usaha meningkatkan peranannya dalam perdagangan internasional dan perluasan-perluasan kolonialisme.

C. Aliran Fisiokratisme (Physiocrats)

1. Konsep Aliran Physiocrats

Aliran Physiocrats membangun teori mereka berdasarkan konsep hukum alam sehingga mereka menamakan dirinya Physiocratism yang berasal dari kata *physic*, yang artinya alam, *cratain* atau *cratos* yang artinya kekuasaan. Dengan kata lain,

penganut aliran ini percaya bahwa sumber daya alam adalah sumber dari kekayaan.

Kaum physiocrats percaya bahwa alam diciptakan tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Kaum physiocrats percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmonis tersebut. Dengan demikian setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing.

Ada tiga hal yang membuat kaum physiocrats terkenal yaitu: pertama, pengikut aliran physiocrats menganggap bahwa teori yang mereka bangun adalah teori yang bersifat objektif ilmiah dan berhasil menyusun suatu pandangan tentang tata ekonomi yang menyeluruh dan lengkap; kedua, aliran ini mencetuskan istilah *laissez faire* yang sampai saat ini masih menjadi bahan kajian menarik dan memberi corak bagi para ekonom klasik berikutnya; ketiga, kajian yang mereka cetuskan menjadi dasar analisis makro yang mencoba menjawab darimana datangnya pendapatan nasional dan bagaimana pendapatan itu dibagikan di antara anggota masyarakat.

Tokoh utama aliran physiocrats adalah Francois Quesney. Buku Quesney yang berjudul “*Tableau Economique*” adalah usaha pertama pembuatan model matematika terhadap seluruh aspek ekonomi dan menunjukkan bagaimana sesungguhnya hubungan antar bagian ekonomi tersebut. Dalam bukunya tersebut Quesney memulai dengan asumsi bahwa ekonomi dapat digambarkan kedalam tiga kelas atau sektor yang berbeda, yaitu:

- a. sektor pertanian yang menghasilkan makanan, bahan mentah, dan hasil-hasil pertanian lainnya.
- b. Sektor manufaktur yang memproduksi barang-barang seperti pakaian dan bangunan serta alat-alat yang diperlukan oleh pertanian dan pekerja pabrik. Sektor manufaktur termasuk juga sektor jasa karena jasa

bertanggung jawab untuk memfasilitasi perdagangan domestik dan internasional.

Kelas pemilik tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi apa-apa tetapi mereka memiliki klaim atas surplus output yang dihasilkan dalam pertanian. Biaya sewa ini merepresentasikan pembayaran surplus kepada pemilik tanah dan pandangan ini dikenal dengan teori sewa physiocrats

Plato menganggap manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individu manusia bukan dan memang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Begitu tidak percayanya Plato pada orang-perorangan, sehingga ia juga menganjurkan agar hak pemilikan privat dihapus. Tujuannya adalah agar masyarakat terhindar dari kejahatan yang mungkin timbul dari pemilikan kekayaan pribadi. Sebagaimana dijelaskannya dalam Republik: “sehingga kita bisa mengandalkan ketiadaan pertikaian yang muncul akibat kepemilikan kekayaan”.

Selain tidak percaya pada orang-perorangan, Plato juga tidak percaya pada demokrasi. Dengan demikian bagi Plato adalah absurd untuk memberikan hak suara pada tiap orang, sebab tidak semua orang tahu apa yang terbaik bagi masyarakat. Yang tahu yang terbaik bagi masyarakat adalah da bahkan tahu tentang kebenaran hakiki adalah ahli-ahli filsafat. Ahli filsafat yang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas, juga dianggap lebih tahu apa yang terbaik bagi perorangan, masyarakat, dan Negara. Karena tidak ada individu yang sempurna, merka perlu dididik. Dari orang-orang terdidik inilah akan lahir elit pemimpin yang akan mengatur Negara.

Jauh sebelum Adam Smith mengembangkan teori pembagian kerja (division of labor), Plato telah terlebih dahulu menganjurkan perlunya pembagian tugas atau divisi dalam masyarakat, yaitu:

- a. Kelompok pengatur (rulers) yang sekaligus juga seorang filsuf.
- b. Kelompok pelaksana (auxiliarities), terdiri dari tentara, polisi, dan pamong.

c. Kelas pekerja (workers).

Dari ketiga kelompok di atas, yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh tiap anggota masyarakat adalah kelompok pertama, yaitu raja sekaligus ahli filsafat.

Pandangan Plato tentang masyarakat di atas didasarkan kepada kepercayaan bahwa ahli filsafat tahu kebenaran absolut tentang bagaimana mengatur masyarakat, dengan demikian dijustifikasi layak memiliki kekayaan absolut. Bentuk masyarakat seperti inilah yang disebutnya sebagai masyarakat atau “Negara ideal”. Lebih jelas, menurut Plato masyarakat yang dididik, dipimpin oleh ahli filsafat, ia menjamin negara akan jaya dan masyarakat sejahtera.

Walau sudah ada pembahasan tentang Ekonomi Politik sejak masa Yunani Kuno, arus pemikiran Ekonomi Politik berkembang lebih maju pada abad ke-14, saat terjadinya Revolusi Prancis yang memungkinkan terjadinya transisi kekuasaan dari raja dan gereja kepada para merchant atau kaum saudagar, Era dimana kaum saudagar berkuasa inilah yang disebut merkantilisme.

Kaum Merkantilis, sesuai dengan namanya, sangat mengagungkan perdagangan dan perniagaan untuk mencapai tingkat kemakmuran. Menurut mereka, kemakmuran Negara itu bisa diperoleh dari surplus ekspor atas impor. Semakin besar surplus ekspor atas impor (yang dibayar dalam bentuk batangan emas), semakin tinggi kemakmuran negara tersebut. Pandangan ini dikemukakan oleh Jean Baptist Colbert. Menteri keuangan dan perekonomian Prancis pada era kekuasaan Raja Louis XIV.

Dalam kajian Ekonomi Politik, merkantilis adalah aliran pertama yang menghendaki campur tangan Negara dalam perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat dilakukan dengan banyak cara diantaranya dengan memberikan fasilitas bagi industri yang masih bayi, memonopoli perdagangan, atau mengenakan pajak impor. Tujuan campur tangan Negara adalah tidak lain untuk memperbesar surplus. Jika surplus yang dibayarkan dalam bentuk batangan emas lebih banyak diperoleh, otomatis Negara semakin kaya.

Dilihat dari aspek Ekonomi Politik, merkantilisme adalah contoh pertama dari model *primary of politics*, dimana ekonomi berfungsi melayani politik atau sebagai refleksi dari hubungan kekuasaan. Kaum merkantilis percaya bahwa konflik adalah sesuatu yang *intrinsic*. Dalam kehidupan ekonomi, bukan sesuatu yang harmoni. Konflik lebih mengemuka dalam ekonomi internasional. Karena adanya konflik tersebut, tugas utama pemerintah adalah untuk menjamin keamanan Negara yang jika perlu, dilakukan dengan mengorbankan kekayaan dan keamanan Negara-negara tetangga. Untuk itu semua pertimbangan dan kepentingan harus disubordinasikan pada prioritas mengkonsolidasikan kekuasaan Negara yang merupakan kondisi utama bagi upaya mengejar kesejahteraan (Staniland, 1985).

Perlunya campur tangan pemerintah pada masa merkantilis adalah untuk mengkumulasi surplus, agar negara semakin kaya. Sayangnya, praktik campur tangan negara tersebut lebih banyak dinikmati oleh pengusaha yang berkolaborasi dengan penguasa. Sedangkan kesejahteraan rakyat jelata, terutama kaum petani yang bekerja lebih keras, tidak diperhatikan. Itulah ironinya: kebijakan seolah-olah demi negara dan rakyat, namun kenyataannya lebih dinikmati segelintir penguasa licik yang berkolaborasi dengan penguasa korup.

Sebagai reaksi atas keistimewaan yang dinikmati kaum saudagar tersebut, muncul aliran pemikiran baru yang kemudian dikenal dengan fisiokratisme. Aliran fisiokratisme dikembangkan oleh Francis Quesnay (1694-1774). Berbeda dengan kaum merkantilis yang sangat mengagungkan aktivitas perdagangan luar negeri, kaum fisiokrat justru menyebut kegiatan perdagangan bersifat steril, sedang aktivitas yang betul-betul produktif menurut mereka adalah kegiatan yang banyak memanfaatkan kekayaan alam seperti pertanian dan pertambangan.

Kaum fisiokratis membagi masyarakat dalam empat golongan :

- a. Kelas masyarakat produktif
- b. Kelas tuan tanah
- c. Kelas yang tidak produktif atau steril, terdiri dari saudagar dan pengrajin
- d. Kelas masyarakat buruh atau labor yang menerima upah dan gaji dari tenaganya.

Kelas produktif (*la classe productive*) terdiri dari petani, peladang, dan mereka yang banyak bergerak pada bidang pertambangan. Bagi kaum fisiokrat mereka inilah yang sesungguhnya pahlawan kemakmuran, bukan kaum saudagar yang justru dikategorikan ke dalam kelas steril yang tidak produktif.

Walau para petani sangat berjasa, pada era merkantilisme justru mereka *digencet*. Mereka diharuskan membayar pajak yang tinggi dan dikenakan pungutan-pungutan liar. Quesnay melihat hal ini sebagai bahaya laten. Kaum petani yang tidak puas pasti akan melawan kaum saudagar yang lebih banyak diuntungkan. Apa yang diprediksikan Quesnay ternyata menjadi kenyataan dengan meletusnya Revolusi Prancis pada akhir abad 18. Untuk memperbaiki keadaan, kaum fisiokrat meminta agar aktivitas ekonomi tidak perlu diatur oleh pemerintah. Mereka juga meminta agar monopoli dan kemudahan-kemudahan pada sekelompok orang dihapuskan. Dan sekat-sekat perdagangan dibuka. Pandangan inilah yang kemudian diadopsi oleh Adam Smith, yang dikenal sebagai penggagas perdagangan bebas berdasarkan prinsip "*laissez faire, laissez passer*".

Kaum merkantilis menganggap sumber kekayaan suatu Negara adalah perdagangan luar negeri, sedangkan kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang nyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Hal ini yang menyebabkan aliran ini dinamai aliran *physiocratism*, yaitu penggabungan dari dua kata *physis* = (alam) dan *cratain* atau *cratos* (kekuasaan), yang berarti 'mereka yang percaya pada hukum alam' (*believers in the rule of nature*). Kaum fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan oleh

Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Hukum alam yang penuh dengan keselarasan dan keharmonisan ini berlaku pada kapan saja, di mana saja dan dalam situasi apapun.

Kaum fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmoni. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Pemerintah tidak perlu campur tangan dan alam akan mengatur, semua pihak akan senang dan bahagia. Inilah yang menjadi cikal bakal doktrin *laissez faire-laissez passer* yang kira-kira berarti : 'biarkan semua terjadi, biarkan semua berlalu', perekonomian bebas yang lebih dikembangkan oleh Adam Smith kemudian. Tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah, semua tindakan manusia akan berjalan secara harmonis, otomatis dan bersifat *self regulating*.

2. Tokoh-tokoh Pemikiran Ekonomi Psiokratisme

a. Francis Quesnay

Tokoh utama aliran fisiokrat adalah Francis Quesnay (1694-1774). Sebenarnya profesi awal Quesnay ini adalah sebagai dokter dan sangat ahli dalam ilmu bedah. Di kemudian hari ia diangkat sebagai anggota "academie des sciences", sebuah lembaga ilmiah yang memiliki wibawa sangat tinggi di Prancis pada masa itu. Sejak saat itu, ia mulai mencurahkan perhatiannya pada masalah-masalah ekonomi.

Pada tahun 1758, Quesnay menulis buku *Tableau Economique* dengan latar belakang seorang dokter, tidak heran kalau dalam buku tersebut Quesnay menggambarkan sistem perekonomian suatu negara seperti layaknya kehidupan biologis tubuh manusia. Antara satu bagian dalam tubuh dengan bagian yang lain membentuk suatu kesatuan yang harmonis. Begitu juga proses dan gejala kehidupan ekonomi jika dilihat dalam hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain akan

membentuk suatu keseluruhan dengan hukum-hukum tersendiri. Quesnay membagi masyarakat dalam empat golongan : 1) Kelas masyarakat produktif; 2) Kelas tuan tanah; 3) Kelas yang tidak produktif atau steril, terdiri dari saudagar dan pengrajin; dan 4) Kelas masyarakat buruh atau *labour* yang menerima upah dan gaji dari tenaganya.

Bagi Quesnay, hukum ekonomi yang berkesesuaian dengan hukum alam ini menjadikan alam, dalam hal ini tanah, sebagai satu-satunya sumber kemakmuran rakyat. Termasuk pula di dalamnya kegiatan pertanian, peternakan, dan pertambangan. Kelas tuan tanah dianggapnya sebagai pengisap belaka sebab memperoleh hasil tidak melalui kerja. Kegiatan industri hanya mengubah bentuk atau sifat barang. Kegiatan perdagangan pun dianggap tidak produktif. Hal ini karena ia melihat para pedagang hanya memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Karena kaum petani yang paling produktif dari keempat golongan tersebut, Quesnay menganjurkan agar kebijaksanaan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah harus ditujukan terutama untuk meningkatkan taraf kehidupan para petani. Bukan sebaliknya, memberi hak-hak khusus pada pemilik tanah dan para saudagar seperti yang selama ini dinikmati di bawah pemerintahan yang mengagungkan merkantilisme.

Dengan dasar pandangan di atas, kaum merkantilis menganggap bahwa sumber utama kemakmuran negara adalah dari surplus yang diperoleh dari perdagangan luar negeri, dianggap sebagai pandangan yang keliru oleh kaum fisiokrat. Kaum fisiokrat juga mengkritik kaum merkantilis yang menciptakan berbagai regulasi perdagangan ketika yang seharusnya dibebaskan dari kontrol. Kaum merkantilis dituduh telah membuat barang-barang menjadi lebih mahal dengan menetapkan pajak yang tinggi. Dibandingkan dengan dengan pemikiran pemikiran ekonomi yang sudah disebutkan terdahulu, pemikiran Quesnay lebih maju. Pola dan garis pemikiran yang dikemukakan oleh ia sudah tersusun dalam suatu kerangka dasar analisis tertentu

mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

b. Jackues Turgot

J. Turgot ialah seorang ahli filsafat dan ekonomi yang menjabat Menteri Keuangan Prancis dalam pemerintahan Raja Louis XVI. Pemikirannya tentang ekonomi sejalan dengan F. Quesnay, bahwa sumber kemakmuran berasal dari alam terutama usaha bidang pertanian. Oleh karena itu, J. Turgot memberikan dorongan agar usaha pertanian dapat ditingkatkan. Sumbangan pemikiran yang sangat berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi tersebut antara lain :

1) Teori pembentukan modal

Pada dasarnya teori turdot bertolak pada urusan pertanian. Nilai tambah yang pada hakikatnya merupakan awal pembentukan modal masyarakat. Nilai tambah tersebut berasal dari laba pengusaha dan sewa tanah

2) Teori hukum hasil lebih yang makin berkurang.

Tambahan modal untuk meningkatkan usaha pertanian ada batasnya. Menurut pengamatan turgot, jika sebidang tanah terus menerus ditambahkan modal, mulai titik tertentu akan memperoleh hasil yang lebih yang makin berkurang. Gejala tersebut kemudian dirumuskan menjadi the law of demishing returns (hukum hasil lebih yang semakin berkurang).

c. Laffemas

Secara keseluruhan, merkantilisme Prancis lebih bekerja dengan pekerja dari pada pemikir, dan hanya beberapa penulis yang meminta perhatian. Barthelemy de Laffemas (1545-1611), penjahit Huguenot dan valet de chambre Raja Henry IV, yang olehnya dia meraih jabatan sebagai menteri keuangan. Laffemas mendiskusikan masalah ekonomi dalam beberapa tulisan dimana dia menggarisbawahi pentingnya manufaktur.

Penulis lainnya yaitu Antoine de Montchretien (c.1575-1621), seorang penyair *dan hardware manufacturer* yang siap disebut sebagai penulis buku yang memuat tulisan ‘ekonomi politik’ pada tahun 1615. Dia menitikberatkan kebutuhan peraturan dan pendidikan industri. Ia mengulangi observasi Montaigne mengenai jika satu orang untung maka satu orang lainnya akan rugi, dan diaplikasikan secara spesifik ke dalam perdagangan internasional.

d. Colbert

Peraturan negara dan kemajuan manufaktur dicapai pada masa Jean Baptiste Colbert (1619-1683), menteri keuangan dibawah Raja Louis XVI, yang diingat sebagai salah satu praktisi kebijakan merkantilis. Dia memberi nama sistem ini dengan nama Colbertisme, dimana manufaktur yang didorong oleh subsidi dan perlindungan tarif. Colbertisme juga membawa jaringan kerja dari peraturan terperinci yang bertujuan pada kualitas dan kontrol harga dari produk manufaktur dan pertanian serta mengurangi rintangan pada perdagangan dalam negeri Prancis. Colbert juga mencari atau mengadakan reformasi fiskal, tetapi usahanya tersebut digagalkan oleh ketidakmaluan pengadilan dan biaya peperangan raja.

e. Marshal Vauban

Marshal Vauban (1633-1707), ahli militer hebat pada zamannya, juga mencoba memecahkan masalah ekonomi, pendekatan yang digunakan adalah ‘political arithmetic.’ Secara lebih spesifik dia mengajukan reformasi fiskal yang mengganti dengan sejumlah pajak oleh bangsawan, semacam pajak pribadi yang akan didasarkan pada pendapatan dari segala sumber dan siapa yang mempunyai proporsi lebih, maka batas tertinggi pajak adalah sepuluh persen.

f. Boisguilbert

Pierre le Pesant de Boisguilbert (1646-1714), anggota kehakiman Prancis dan seorang tuan tanah, menerbitkan beberapa buku. Bukunya yang pertama *Le detail de la France* in 1695 dan yang terakhir *Factum de la France* in 1706, dan dia juga membuat empat rangkaian gagasan yang ditujukan untuk membantu menteri keuangan.

Boisguilbert mengklaim bahwa pertanian dan kehidupan pedesaan adalah beberapa cara terbaik untuk manufaktur dan bahwa manufaktur sebaiknya tidak dipromosikan pada biaya populasi pedesaan. Dia juga mengumumkan rumusan *laissez faire* ketika dia membela kebebasan export gandum, dia mengidentifikasi pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi.

g. Quesnay

Pemimpin aliran fisiokrat adalah Francois Quesnay (1694-1774), dokter pribadi Louis XV dan Madam de Pompadour. Belajar ekonomi adalah fase terdahulu dari karir intelektualnya. Dan memutuskan untuk tetap pada investigasi matematika hingga akhir hidupnya.

h. Turgot

Setelah Quesnay, fisiokrat terbaik yang diingat sekarang ini adalah Anne Robert Jacques Turgot (1727-81), yang setelah berjasa pada posisi pemerintah Perancis tertinggi menjadi menteri keuangan pada rezim *ancien*.

Sistem fisiokrat memerlukan rekonstruksi ekonomi yang lengkap sejak mereka menyobek keseluruhan catatan tentang ajaran merkantilisme. Tujuan fisiokrat adalah untuk mengorganisasikan kembali ekonomi Prancis melalui reformasi pajak dan mempromosikan sistem efisien, skala yang lebih besar bertani.

Fisiokrat digambarkan seperti diatur oleh prinsip-prinsip individualisme. Turgot berpendapat bahwa individualisme adalah hakim terbaik dari keuntungan sendiri. Aliran ini mempostulatkan sebuah kesesuaian yang sempurna dari keuntungan individu sama baiknya dengan keuntungan raja. Individualisme ini diimplementasikan dalam pemilikan pribadi.

i. The Tableau

Hubungan antara tiga kelas yang digambarkan Quesnay dalam *tableau economique* yang terkenal, model terbaru dari aliran melingkar 'pendapatan nasional' dan reproduksi tahunannya. Ada beberapa jenis *tableau*, yang semuanya sesuai dengan dua pola dasar. Pertama menggambarkan pengeluaran berturut-turut dan lainnya meringkas hasil yang dicapai.

3. Dampak Pemikiran Ekonomi Fisiokratisme

Hubungan tertutup Fisiokrat dengan pengadilan Prancis dan dukungan mental dari monarki absolut berhasil untuk membuat sesuatu impresi yang sangat besar ke luar negeri, khususnya pada 'kebenaran raja yang lalim' pada saat itu. Saat itu dunia melihat peradaban Prancis dan semua tentang Prancis sebagai model yang paling jelek dari kekaguman dan emulasi. Ada pertimbangan bunga dalam doktrin fisiokrat pada negara asing, tapi mengumumkan individualisme dari pemikiran mereka yang tidak semuanya cocok yang kemudian mengalami wilayah 'underdevelopment' dari pusat dan Eropa bagian timur.

Pernyataan tambahan mereka mengenai *laissez faire*, Fisiokrat berani pada kepercayaan mereka akan kebaikan monarki absolut sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik. Mereka juga ingat dengan baik tentang penekanan pada pertanian yang akhirnya menyebabkan munculnya revolusi industri. Oposisi mereka pada ekspor manufaktur melawan trend perekonomian Prancis yang telah memproduksi ekspor dalam kelebihan pertanian sejak pertengahan abad 18.

Teknik ekonomi fisiokrat berbeda dari kebijakan dan filosofi mereka, didesak pengaruh gagasan ekonomi di masa depan. Pemikiran Adam Smith telah dipengaruhi oleh ini, khususnya kontribusi Turgot, walaupun dia tidak mengembangkan usaha selanjutnya pada suatu bentuk teori subjektif nilai. Marx yang memberikan banyak perhatian pada tableau menemukan dalam hal ini dan pada penekanan fisiokrat pada surplus produksi oleh pada suatu kelas penting menginspirasi pada sistem miliknya dari pemikiran yang pusatnya adalah suatu surplus.

Abad delapan belas menonjolkan dua gagasan ekonomi, yaitu fisiokrat dan klasik. Fisiokrat menguasai Prancis, klasik Skotlandia dan Inggris. Fisiokrat mendapat pengaruh penting dari Adam Smith, peletak dasar sistem klasik. Bodin dan Boisguilbert adalah dua figur pemimpin ajaran ekonomi Prancis sebelum adanya fisiokrat.

- a. Mazhab Pisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi Merkantilis, tokoh pemikir yang paling terkenal pada mazhab ini adalah Francois Quesnay. Sumbangan pemikiran yang terbesar dalam perkembangan ilmu ekonomi adalah hukum-hukum alamiah, dan menjelaskan arus lingkaran ekonomi.
- b. Inti pemikiran utama dalam mazhab Pisiokrat adalah dituangkan dalam tabel ekonomi yang terdiri dari classe productive dari kaum petani, classe des froprietaires dari kaum pemilik tanah, classe sterile atau classe stipendile yang meliputi kaum pedagang dan industriawan dan classe passieve adalah kaum pekerja.
- c. Pemikiran ekonomi kaum Pisiokrat yang menonjol dalam perkembangan ilmu ekonomi selain lingkaran arus ekonomi dalam tabel ekonomi yaitu tentang teori nilai dan harga yang terbagi menjadi tiga yaitu harga dasar barang-barang, harga penjualan dan harga yang harus dibayar konsumen. Teori uang yang dikemukakannya adalah sebagai tabir uang (money is

veil) dan perlunya pengenaan pajak untuk kepentingan ekonomi.

Sumbangan pemikiran ahli Pisiokrat lain yaitu Jaques Turgot mempunyai dua sumbangan utama terhadap pemikiran ekonomi yakni teori uang sebagai tabir, dan teori fruktifikasi. Teori uang sebagai tabir yang mempersulit pengamatan fenomena ekonomi. Namun demikian pemikiran ini merupakan gagasan ke arah menemukan dasar satuan perhitungan yang ia, tetapi dikemukakan atas transaksi barter dengan nilai alat tukar dapat berubah-ubah karena jumlahnya.

BAB II

SISTEM EKONOMI

A. Pengertian Sistem Ekonomi

Istilah “sistem” berasal dari perkataan “systema” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai: keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian (Nurseto dan Widiastuti, 2011:24-44). Pada dasarnya sebuah sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu (Dumairy, 1996: 28). Sistem tersebut muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat bervariasi akan memunculkan sistem yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia yang bersifat dasar (pangan, pakaian, papan) akan memunculkan suatu sistem ekonomi.

Pengertian Sistem Ekonomi menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Dumairy (1996: 30), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, padangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara.

2. Tom Gunadi (1985: 26). Sistem perekonomian adalah sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran.
3. Suroso (1997: 7-8). Dilihat dari tujuannya, sistem ekonomi merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena meningkatkan kesejahteraan rakyat itu merupakan salah satu tujuan dari politik nasional, maka dengan demikian sistem perekonomian pada dasarnya merupakan bagian dari sistem politik nasional.
4. Gregory Grossman dan M. Manu mengatakan bahwa :“Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi.” (<http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/09>)
5. Menurut Bapak Ekonomi yaitu Adam Smith (1723 - 1790): sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan (Rai Kinasih, 2011: <http://rarayiyikinasihsblog.blogspot.com/2011/03/pengertian-sistem-ekonomi-menurut-para.html>).

Berdasarkan berbagai macam pemaparan mengenai sistem ekonomi dari berbagai sumber maka dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan setiap negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi

perekonomian, serta kondisi SDA yang berbeda-beda. Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi.

B. Macam-macam Sistem Ekonomi

Di dunia ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi yang diterapkan oleh Negara. Sistem ekonomi tersebut antara lain sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal/pasar/bebas, sistem ekonomi komando/terpusat/etatis, dan sistem ekonomi campuran.

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi ini pengaturan ekonomi dimapankan menurut pola tradisi yang biasanya sebagian besar menyangkut kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi (Cornelis Rintuh, 1995: 40).

a. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional

Sistem Ekonomi tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana.
- 2) Hanya sedikit menggunakan modal.
- 3) Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang dengan barang).
- 4) Belum mengenal pembagian kerja.
- 5) Masih terikat tradisi.
- 6) Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran.

b. Kebaikan sistem ekonomi tradisional

Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut.

- 1) Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat.
- 2) Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul.
- 3) Tidak individualistis.

c. Kelemahan sistem ekonomi tradisional

Selain memiliki berbagai kelebihan sistem ekonomi tradisional juga memiliki kelemahan, yaitu:

- 1) Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah.
- 2) Mutu barang hasil produksi masih rendah.

Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional, namun di beberapa daerah pelosok, seperti

suku Badui dalam dan suku Bugis masih menggunakan sistem ini dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas/Kapitalis)

Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Model sistem ekonomi ini merujuk pada perekonomian pasar persaingan sempurna. Model ini seluruhnya khayal (Gregory Grossman, 2004: 66). Sistem ekonomi pasar yang dicetuskan oleh Adam Smith berintikan: "Tangan yang tidak terlihat akan menggerakkan kegiatan ekonomi, yaitu dengan adanya keinginan seseorang/sekelompok orang yang memberikan sebuah barang dan atau jasa untuk mendapatkan barang lainnya (pertukaran).

Harga dalam pasar dapat goyah terutama karena hukum penawaran dan permintaan, serta keinginan pengusaha menggunakan modalnya sebaik mungkin. Oleh karena itu harga pasar dalam jangka pendek dapat sangat tinggi atau sangat rendah, tetapi dalam jangka panjang akan mencapai keseimbangan.

Dalam sistem bebas seperti itu pemerintah suatu Negara mempunyai tiga tugas yang sangat penting, yaitu:

- Berkewajiban melindungi Negara dari kekerasan dan serangan negara bebas lainnya.
- Melindungi setiap anggota masyarakat sejauh mungkin dari ketidakadilan atau penindasan oleh anggota

masyarakat lainnya atau mendirikan badan hukum yang dapat diandalkan.

- Mendirikan dan memelihara beberapa institusi atau sarana untuk umum yang tidak dapat dibuat oleh perorangan karena keuntungan yang didapat darinya terlalu kecil sehingga tidak dapat menutupi biayanya.

Dengan kata lain, kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada swasta. (Nurseto dan Widiastuti, 2011:26). Pada dasarnya sistem ekonomi yang kapitalis murni hampir tidak ada. Yang berkembang sekarang ini sistem ekonomi yang sudah campuran. Hanya kadar dominasinya yang menentukan kecenderungannya kepada suatu jenis sistem ekonomi. Negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Amerika Serikat, Swedia, Belanda dan Prancis.

a. Ciri dari sistem ekonomi

Sistem ekonomi pasar/liberal/bebas memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal.
- 2) Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya.
- 3) Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba.
- 4) Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (swasta).
- 5) Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar.
- 6) Persaingan dilakukan secara bebas.
- 7) Peranan modal sangat vital.

b. Kebaikan sistem ekonomi

Sistem ekonomi pasar/liberal/bebas/kapitalis memiliki berbagai kebaikan antara lain:

- 1) Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi.
- 2) Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi.
- 3) Munculnya persaingan untuk maju.
- 4) Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar.
- 5) Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi

d. didasarkan atas motif mencari laba.

c. Kelemahan sistem ekonomi

Sistem ekonomi pasar/liberal/bebas/kapitalis memiliki kelemahan sebagai berikut.

- 1) Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan.
- 2) Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal.
- 3) Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat.
- 4) Sering terjadi gejala dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

Suatu perekonomian pasar/liberal/bebas/kapitalis dengan lembaga milik pribadi dan warisan menimbulkan kondisi untuk mengumpulkan kekayaan dan mempertahankannya dalam lingkungan keluarga dari satu ke lain generasi (Grossman, 2004:68). Ini merupakan wujud kelemahan dari sistem ekonomi

pasar/liberal/bebas di mana akan terjadi penumpukan kekayaan pada sekelompok orang secara turun temurun.

Karena pemerintah tidak membatasi kegiatan ekonomi, maka orang bebas melakukan apapun yang menguntungkan bagi dirinya dan sesuka hatinya. Ekonomi pasar efektif dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran pasar untuk masing-masing produk, tapi perekonomian pasar kurang bisa diharapkan dalam menciptakan keseimbangan makro ekonomi (Grossman, 2004: 78). Hal ini salah satunya disebabkan karena seluruh kesatuan ekonomi melakukan kegiatan ekonomi secara otonomi tanpa adanya koordinasi langsung. Hal ini dapat menyebabkan kondisi perekonomian suatu negara sangat fluktuatif, kecuali pemerintah mengambil kebijakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negaranya. Suatu perekonomian dengan perusahaan swasta cenderung memproduksi barang yang laku di pasar daripada fasilitas umum.

3. Sistem Ekonomi Komando/Terpusat/Etatisme/Sosialis/Komunis

Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ini mendasarkan diri pada pandangan Karl Marx (Suroso, 1997: 15-16). Masyarakat komunis yang dicita-citakan Marx merupakan masyarakat yang tidak ada kelas sosialnya. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Rusia, Cina, dan Kuba.

Sejarah Perekonomian

a. Ciri-ciri sistem ekonomi komando

Sistem ekonomi komando memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah.
- 2) Hak milik perorangan tidak diakui.
- 3) Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian.
- 4) Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

b. Kebaikan sistem ekonomi komando

Sistem ekonomi komando memiliki kebaikan antara lain:

- 1) Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya.
- 2) Pasar barang dalam negeri berjalan lancar.
- 3) Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga.
- 4) Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan.
- 5) Jarang terjadi krisis ekonomi.

c. Kelemahan sistem ekonomi komando

Sistem ekonomi komando memiliki kelemahan antara lain:

- 1) Mematikan inisiatif individu untuk maju
- 2) Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
- 3) Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya

4. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Dalam bentuk perekonomian campuran sumber-sumber ekonomi bangsa, termasuk faktor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau kelompok swasta, di samping sumber tertentu yang dikuasai pemerintah pusat, atau pemerintah daerah, atau pemerintah setempat. Karena itu dalam sistem ekonomi campuran dikenal paling tidak dua sektor ekonomi, yaitu sektor swasta dan sektor Negara (Cornelis Rintuh, 1995: 41). Sistem ini berkembang dan sekarang diberlakukan baik oleh Negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi pasar (Negara industri barat) maupun oleh Negara yang sebelumnya menganut sistem ekonomi perencanaan yang ketat/terpusat (Uni Soviet).

Pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang ketat ternyata menimbulkan depresi ekonomi pada tahun 1930-an. Sedang pemberlakuan sistem ekonomi perencanaan yang ketat juga tidak mampu menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat. Berdasarkan pengalaman tersebut banyak Negara menganut sistem ekonomi campuran ini. (Suroso, 1997: 17). Sistem ekonomi campuran melahirkan ekonomi pasar bebas yang memungkinkan persaingan bebas tetapi bukan persaingan yang mematikan, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilisasi kehidupan ekonomi, mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta, mengatasi gejala-gejala, dan membantu golongan ekonomi lemah.

a. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran.

Sistem ekonomi campuran antara lain:

- 1) Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat.

- 2) Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
- 3) Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.
- 4) Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang.

Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara umum saat ini hampir tidak ada negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada adalah kecenderungan terhadap ekonomi pasar seperti Amerika, Hongkong, dan negara-negara eropa barat yang berpaham liberal, sementara negara yang pernah menerapkan ekonomi terpusat adalah Kuba, Polandia dan Rusia yang berideologi sosialis atau komunis.

Kebanyakan negara-negara menerapkan sistem ekonomi campuran seperti Prancis, Malaysia dan Indonesia. Namun, perubahan politik dunia juga mempengaruhi sistem ekonomi, seperti halnya yang dialami Uni Soviet pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, kehancuran komunisme juga mempengaruhi sistem ekonomi soviet, dari sistem ekonomi terpusat (komando) mulai beralih ke arah ekonomi liberal dan mengalami berbagai perubahan positif.

b. Kabaikan Sistem Ekonomi Campuran

- 1) Menghindarkan Free Fight liberalism
- 2) Menghindarkan adanya monopoli
- 3) Menghindarkan dominasi kekuasaan pemerintah

C. Sistem Perekonomian di Indonesia

1. Bentuk sistem perekonomian Indonesia

Dalam pidato yang diucapkan oleh wakil presiden RI dalam konferensi ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 febuari 1946 dikatakan bahwa dasar politik perekonomian RI terpancang dalam UUD 1945 pasal 33. Sementara itu, Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di hadapan “School of Advanced International Studies” Washington D.C tanggal 22 Febuari 1949 juga menegaskan bahwa yang dicita-citakan ialah suatu macam ekonomi campuran yaitu lapangan-lapangan tertentu akan dinasionaliasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lainnya akan terus terletak dalam lingkungan usaha partekelir. Meskipun sistem perekonomian Indonesia sudah cukup jelas dirumuskan oleh tokoh-tokoh ekonomi Indonesia yang sekaligus menjadi tokoh pemerintahan pada awal republik Indonesia berdiri, dalam perkembangannya pembicaraan tentang sistem perekonomian Indonesia tidak hanya berkisar pada sistem ekonomi campuran, tetapi mengarah pada suatu bentuk baru yang disebut sistem ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) menurut Mubyarto (1987:32) adalah “ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional”. Sistem Ekonomi pancasila yang menjadi sumber ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila membawa keharusan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem ekonomi Pancasila yang dimili Indonesia kadang disebut juga sebagai demokrasi ekonomi. Dijelaskan oleh Dochak Latief (1984:45) bahwa “demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dan yang meliputi ciri-ciri positif maupun negatif yang harus dihindarkan. Garis-garis Besar

Haluan Negara yang merupakan pedoman bagi kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi Indonesia berbunyi “pembangunan ekonomi yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan (Suroso, 1997: 17-19).

Demokrasi Ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh engara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan engara digunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula.
- e. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- f. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidka boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- g. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga Negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- h. Fakir miskin dan anak-anak etrlantar dipelihara oleh Negara (Cornelis Rintuh, 1995: 51).

Dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut.

- a. Sistem Free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
- b. Sistem etatisme dalam mana Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan mamtikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara.
- c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat (Cornelis Rintuh, 1995: 51-52).

Sistem ekonomi Indonesia yang dikenal sebagai Demokrasi Ekonomi adalah Sistem Ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia. Sistem tersebut juga ada yang menyebutnya sebagai sistem ekonomi Pancasila. Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, sistem ekonomi Indonesia pun lebih tepat jika didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mubyarto mengatakan bahwa, apa yang disebut oleh presiden Suharto tentang sistem ekonomi koperasi sebagai sistem ekonomi Indonesia itu, tidaklah berbeda dengan sistem ekonomi Pancasila (Sri-Edi Swasono, 1985: 121).

2. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila

Menurut Mubyarto (1993: 53), Sistem Ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Cornelis Rintuh, 1995: 42):

- a. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral;

- c. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (egalitarianism), sesuai asas-asas kemanusiaan;
- d. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi;
- e. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama;
- f. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.

Menurut Emil Salim, ciri-ciri di atas dilengkapi dengan pengertian yang berdasarkan pada dokumen-dokumen UUD 1945 dan GBHN, dapat ditarik dari ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila sebagai berikut.

- a. Peranan negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting, tetapi tidak dominan agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme (serba negara). Peranan swasta adalah penting, tetapi juga tidak dominan agar dicegah tumbuhnya free fight liberalism. Dalam sistem ekonomi Pancasila, usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan dengan perimbangan tanpa dominasi berlebihan satu terhadap yang lain.
- b. Hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal seperti halnya dalam sistem ekonomi kapitalis. Juga tidak didasarkan atas dominasi buruh seperti halnya dalam sistem ekonomi komunis tetapi asas kekeluargaan, menurut keakraban hubungan antar manusia.
- c. Masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di

bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.

- d. Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan yang merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat
- e. Tidak bebas nilai, bahkan sistem nilai inilah mempengaruhi kelakuan pelaku ekonomi. (Sri Edi Swasono, 1985: 59-61).

Pada akhir-akhir ini banyak diperbincangkan mengenai sistem ekonomi kerakyatan. Seperti yang dikemukakan oleh pakar ekonomi kita Prof. Mubyarto bahwa sistem ekonomi kerakyatan tidaklah berbeda dengan apa yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Hanya lebih ditekankan pada sila ke 4 yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

3. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial:

- Berdaulat di bidang politik
- Mandiri di bidang ekonomi
- Berkepribadian di bidang budaya

Yang mendasari paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial :

Sejarah Perekonomian

- Penyebaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi
- Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural
- Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi

Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

“Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak

ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuan yang diharapkan dari penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah:

- Membangun Indonesia yang berdiikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
- Mendorong pemerataan pendapatan rakyat.
- Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

Lima hal pokok yang harus segera diperjuangkan agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya menjadi wacana saja:

- a. Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya.
- b. Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang berkeadilan (fair competition).
- c. Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah.
- d. Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap.
- e. Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “sejati” dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan. Yang perlu dicermati, peningkatan

kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomotif, melainkan pada paradigma fondasi.

4. Dasar/Landasan Sistem Ekonomi Indonesia

Dasar filosofis sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan dasar konstitusionalnya adalah UUD 1945 pasal 23, 27, 33, dan 34 (Cornelis Rintuh, 1995: 43). Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); dan Keadilan Sosial (persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang) (Sri Edi Swasono, 1985: 125-126).

Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus.

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya, yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34. Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal

18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan “dikembalikan” ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945.

Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai ummat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong.

Dari landasan sistem ekonomi Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas (Pancasila, UUD 1945, TAP MPRS No. XXIII/66 dan GBHN-GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, 1998, 1999), jelas bahwa ekonomi Indonesia berpedoman pada ideologi kerakyatan. Kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki “otokrasi ekonomi”, sebagaimana pula demokrasi politik menolak “otokrasi politik”. Asas kekeluargaan yang *brotherhood* bukanlah asas keluarga atau asas kekerabatan yang nepotistik. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah asas ekonomi kolektif (cooperativism) yang dianut Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sistem ekonomi Indonesia sebagai berikut.

a. Faktor intern

1) Lembaga ekonomi

Lembaga ekonomi ialah pranata yang mempunyai kegiatan dalam bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada umumnya. Secara sederhana, lembaga ekonomi dapat diklasifikasikan

sebagai berikut; sektor agraris yang meliputi sektor pertanian, seperti sawah, perladangan, perikanan, dan perternakan.

2) Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi atau lebih dikenal dengan potensiekonomi daerah pada dasarnya dapat diartikan sebagai sesuatu atau segala sesuatu sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik yang tergolong pada sumber daya (natural resources/endowment factors) maupun potensi sumber daya manusia yang dapat memberikan manfaat serta dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan (ekonomi) wilayah.

3) Faktor produksi yang dimiliki

Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi empat kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Namun pada perkembangannya, faktor sumber daya alam diperluas cakupannya menjadi seluruh benda tangibel, baik secara langsung dari alam maupun tidak, yang digunakan oleh perusahaan, yang kemudian disebut sebagai faktor fisik (physical resources). Selain itu, beberapa ahli juga menganggap sumber daya informasi sebagai sebuah faktor produksi mengingat semakin pentingnya peran informasi era globalisasi ini. (Griffin R: 2006) secara total, saat ini ada lima hal yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu tenaga kerja (labor), modal (capital) sumber daya fisik (physical resources), kewirausahaan (entrepreneurship), dan sumber daa informasi (information resources).

4) Lingkungan ekonomi

Lingkungan ekonomi adalah sebuah penggabungan dari beberapa faktor ekonomi, seperti jumlah tenaga kerja, produktivitas, pendapatan, kekayaan, inflasi, dan suku bunga. Faktor-faktor ini terpengaruhi pola pengeluaran individu dan perusahaan. Lingkungan ekonomi dipengaruhi oleh:

- a) Pendapatan dan kekayaan: pendapatan perekonomian diukur dengan GDP, GNP, dan pendapatan perkapita. Nilai tinggi faktor-faktor ini menunjukkan suatu lingkungan ekonomi progresif.
- b) Tingkat pekerjaan: kerja yang tinggi merupakan gambaran positif perekonomian. Namun, ada banyak pengangguran termasuk kerja parsial dan setengah pengangguran.
- c) Produktivitas: ini adalah output yang dihasilkan dari jumlah yang diberikan masukan tingkat tinggi mendukung produktivitas lingkungan ekonomi.

5) Organisasi dan manajemen

Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing di peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Faktor Ekstern

1) Falsafah Pancasila

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila ini diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialisme.

Kemanusiaan yang adil dan beradab yang tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Persatuan Indonesia berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi. Kerakyatan mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak serta Keadilan Sosial yang mengutamakan persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang.

2) Landasan Konstitusional UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal mengenai keekonomian yang berada pada Bab XIV UUD 1945 yang berjudul Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal restrukturisasi ekonomi, pasal untuk mengatasi ketimpangan struktural ekonomi. Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 menegaskan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Pasal dalam UUD lainnya yang mempengaruhi sistem ekonomi di Indonesia antara lain pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.

3) GBHN

Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan dikembalikan ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945.

4) Keadaan kondisi politik

Politik juga menentukan sistem ekonomi. Seperti misalnya apabila kondisi politik di Indonesia yang tidak stabil seperti terjadi konflik di beberapa daerah yang disebabkan oleh faktor ekonomi maka sistem ekonomi pun akan diganti karena sudah tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia.

5) Kepastian hukum

Kepastian hukum tentang sistem ekonomi tersebut berdasarkan pada Pancasila serta UUD 45.

6) Masyarakat dalam arti luas

Yang dimaksud masyarakat dalam arti luas yaitu semua masyarakat Indonesia dari golongan bawah hingga golongan atas yang berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia.

7) Pemerintah

Keputusan pemerintah dalam mengubah atau menetapkan sistem ekonomi sangatlah penting. Karena keputusan tertinggi ada pada pemerintah. Walaupun masyarakat menghendaki perubahan tersebut, namun jika pemerintah tidak mengubahnya maka sistem ekonomi pun tidak akan berubah.

BAB III

HISTORIOGRAFI PEREKONOMIAN EROPA

A. Eropa Abad Pertengahan (Gilda)

Terdapat perubahan radikal yang terjadi di Eropa dalam kisaran abad XI. Perdagangan skala besar berkembang pesat di kota-kota perdagangan, baik yang dahulu (Yunani – Romawi) pernah ada maupun yang baru muncul. Perekonomian abad pertengahan disandarkan pada bidang agraris, pada abad XI orientasi itu berubah menjadi perekonomian uang atau perdagangan. Konsekuensinya, muncul kota-kota dagang berikut di dalamnya terdapat gilda-gilda atau perkumpulan-perkumpulan profesi; meliputi pedagang, pekerja, maupun para seniman.

Kemunculan kota dagang di Eropa dimungkinkan mengingat semakin pesatnya iklim perdagangan yang ada di dunia. Di wilayah arab, kota Bagdad, Kairo, Damaskus tumbuh menjadi sentra perdagangan. Di Konstantinopel, yang merupakan jembatan perdagangan Timur dan Barat, industri manufaktur sutera serta perhiasan mewah berkembang pesat. Sementara itu, perdagangan rempah-rempah kian marak, menyusul teridentifikasikannya Maluku sebagai daerah penghasil rempah-rempah terbesar di dunia.

Pendirian Gilda menjadi pilihan mengingat iklim belum sepenuhnya aman dari ancaman-ancaman tindakan kekerasan

ataupun perampokan. Mengingat, abad pertengahan yang di dalamnya terdapat Perang Salib tentu saja menyisakan nuansa militeristik yang pekat. Oleh karena itu, Gilda didirikan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak penyangga kepentingan yang ada di dalam Gilda.

Gilda teridentifikasi menjadi dua berdasar skala usahanya. Gilda kecil mengurus kebutuhan lokal serta memproduksi dari bahan baku lokal serta skalanya produksinya relatif kecil. Yang kedua adalah gilda besar yang memiliki skala usaha besar, termasuk pengambilan bahan baku serta pemasaran ke luar wilayah eropa. Pada gilirannya, gilda skala besar membentuk sebuah sistem perusahaan yang rapi beserta pembagian kerja-kerjanya. Dan sekiranya, kapitalisme hendak diteguhkan dimulai dari periode ini.

1. Faktor-faktor Kemunculan Gilda

Perubahan orientasi ekonomi ini membentuk kekuatan baru dalam masyarakat selain Bangsawan yang berada di kastil-kastil dan para seignor atau tuan tanah di pedesaan. Kemunculan gilda-gilda pada saat itu bukan tanpa gangguan. Para bangsawan dan pemerintah merasa khawatir jika gilda-gilda tumbuh berkembang dengan pesat, mengingat mereka membangun kekuatan solidaritas berdasar profesi dan bahkan ada yang membuat kekuatan militer sendiri . Seakan ada negara dalam negara, dan hal itu sepertinya tidak dibiarkan oleh pemerintah di masing-masing negara eropa. Tekanan melalui undang-undang maupun tindakan represif dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah pesatnya pertumbuhan Gilda.

Dalam bidang perdagangan, kemunculan kota-kota dagang tersebut dimungkinkan mengingat semakin meningkatnya industri manufaktur di dunia arab dan migrasi suku-suku

skandinavia ke wilayah eropa lain (Prancis, Jerman, Inggris) sembari melakukan perampokan sekaligus berdagang. Demikian, hal ini juga didukung oleh jalur transportasi yang baik. Jalan darat sisa-sisa kekaisaran romawi digunakan oleh pedagang untuk masuk ke desa-desa pertanian di seluruh eropa. Selain itu, jalur sungai, selat, dan laut juga digunakan untuk mengantar barang dagangan lintas daratan.

Jalur laut dapat diidentifikasi mulai dari samudra atlantik, melewati laut mediterania, menembus Laut Hitam hingga sampai ke Konstantinopel. Kota-kota yang dilewati sepanjang perjalanan tumbuh dan berkembang menjadi kota perdagangan pesisir. Demikian juga, didalam kota tersebut tumbuh pesat gilda-gilda.

2. Gilda: Pedagang, Pekerja, dan Seniman

Gilda perdagangan (XI-XII) memiliki tujuan utama untuk saling membantu untuk melindungi diri mereka dalam masyarakat yang diwarnai banyak tindakan kekerasan dan terkadang kebrutalan. Mereka membangun ikatan kolektif sesama profesi sekaligus membuat peraturan-peraturan tersendiri yang berlaku ke dalam misalnya iuran anggota guna menyokong kepentingan-kepentingan anggota (anak sakit, mahar anak perempuan, panti asuhan). Selain itu, gilda perdagangan juga memperjuangkan golongannya dalam perjuangan politik level negara.

Gilda Pekerja (XIII) Respon pemerintah yang bekerjasama dengan gilda pedagang menggunakan kekerasan untuk menghadapi kekuatan gilda pekerja. Kendali pemerintah dilakukan melalui penetapan ketentuan hukum dalam hal pelarangan berdirinya gilda-gilda pekerja. Misalnya di Belanda

pada abad XIV, pemerintah melarang segala bentuk organisasi gilda pekerja/pengrajin di dalam wilayah yuridiksinya.

Hal yang sama terjadi di Duke of Brabant, pemerintah tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi sampai menginstruksikan kepada tentara untuk mengubur hidup-hidup lima pemimpin gilda yang ada di daerah tersebut. Hal tersebut dilakukan mengingat kekuatan pekerja sering melakukan protes terhadap para pemilik modal atas nasib-nasibnya sebagai buruh. Namun yang menarik, terdapat tangga karir dalam skema perburuhan dalam perusahaan kerajinan pada saat itu. Untuk bekerja, seseorang calon pekerja harus masuk dahulu sebagai pemagang. Setelah dipandang baik, maka statusnya naik menjadi pekerja harian atau sering disebut *Journeyman*. Upah yang terakumulasikan akan menjadi modal untuk membuka usaha kerajinan sendiri, dan dengan begitu ia telah menjadi seorang Master.

Gilda seniman atau perkumpulan seniman dimungkinkan mengingat iklim kebebasan dirasakan begitu besar pada saat itu. Sebagai contoh, di Firenze, keluarga Medici menanggung sepenuhnya biaya hidup para seniman. Medici adalah bangsawan dan pedagang terbesar di kota itu. Gilda pedagang menjamin keamanan para seniman dari tekanan-tekanan gereja. Dengan kebebasan besar itu, seniman bisa berkumpul dan mendirikan gilda-gilda seni yang mengangkat nama banyak seniman terkenal. Melalui gilda ini seniman mendelegasikan pekerjaan, bekerja sama, hingga mendidik bakat-bakat baru.

3. Awal Liberalisme dan Kapitalisme

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, Gilda teridentifikasi menjadi dua berdasar skala usahanya; Gilda kecil dan Gilda besar. Gilda kecil biasanya memproduksi kebutuhan sehari-hari

penduduk lokal misalnya roti, sepatu, sepatu kuda, serta tukang kayu, tukang batu dalam gilda pekerja. Sementara Gilda besar memproduksi barang-barang yang laku keras di pasaran dunia. Konsekuensinya dari produksi besar tersebut adalah pengambilan bahan baku dari luar wilayah. Kemudian muncul ekspedisi-ekspedisi untuk mencari daerah-daerah penghasil bahan baku semisal sutera di cina dan rempah-rempah di India dan Maluku.

Pada awalnya, Gilda hanya membutuhkan modal sedikit. Namun ketika industri ini diperluas. Seiring permintaan yang meningkat, dibutuhkan modal yang besar pula sehingga yang menguasai industri manufaktur pada saat itu tak lain adalah para pedagang yang memiliki modal besar.

Industri besar berkembang di negara-negara italia utara dan negeri-negeri bertanah rendah. Di Lucca menjual kain sutra skala besar kepada pedagang eropa utara. Milan terkenal dengan industri besi, venesia menghasilkan kain brokat, Hamburg memproduksi bir, Amsterdam Ikan, dan Bordeaux dengan produksi anggurnya. Semakin besar perusahaan, semakin rumit tata aturan organisasi perusahaan. Sebagai contoh, industri kain wol di Italia mengerjakan kain wol dengan dicuci, disikat, diminyaki. Selanjutnya kain wol harus dipintal, disisir dan digulung. Setelah itu, kain harus ditenun, disusutkan, dicelupkan, dan disempurnakan, demikian seterusnya hingga kain sampai pada konsumen.

Proses produksi panjang yang membutuhkan uang untuk membeli bahan baku dan bahan pewarna serta proses penjualan hingga sampai pada tangan pembeli sungguh panjang dan rumit. Oleh karena itu, dibutuhkan modal yang tidak sedikit serta pengaturan manajemen perusahaan yang mumpuni. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh pemegang modal yang besar dengan

menggaji para ahli-ahli dibidangnya. Muncullah kemudian diferensiasi yang jelas antara pekerja/buruh dan pemilik perusahaan atau pemodal. Menurut Lukas , disinilah Kapitalisme, dalam arti penggunaan uang sebagai komoditi dalam manufaktur dan perdagangan, berkembang pesat.

B. Liberalisme di Eropa

Perkembangan paham-paham di Eropa semakin hari semakin mengalami kemajuan yang pesat. Dalam hal ini adalah Liberalisme dan Kapitalisme. Liberalisme mempunyai makna positif dan negative tergantung dalam konteks apa menempatkannya. Perkembangan Liberalisme di Prancis dan Inggris tidaklah sama, masing-masing dengan konteks historisme sendiri-sendiri. Dalam bidang sosial (menyangkut individu), liberalisme klasik menciptakan masyarakat yang atomistik yang terdiri dari individu-individu yang tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Dalam bidang ekonomi, Liberalisme klasik menciptakan pengusaha dan perusahaan raksasa. Keahlian berkembang menjadi semacam ideology, sehingga amat menentukan kehidupan Negara (Lantik, 2012).

Dalam perkembangannya, liberalisme klasik menuai badai yang ditaburkannya, praktiknya kontra produktif, kebebasan individu yang ingin dilindungi justru digerogoti sendiri. Sejarah akhirnya memaksa liberalisme klasik harus dibongkar menjadi liberalisme demokratis yaitu liberalisme yang mampu melindungi individualitas setiap orang dan memanusiakan manusia. Begitu pula dengan paham Kapitalisme yang selalu mendapat tanggapan pro dan kontra dalam perkembangannya. Oleh karena itu dalam makalah ini akan dibahas mengenai Liberalisme dan Kapitalisme serta perkembangannya di Eropa.

1. Konteks Liberalisme

Dalam kehidupan sehari-hari, kata Liberalisme mempunyai dua pengertian (arti positif dan arti negatif). Liberalisme dalam arti positif adalah paham yang menjunjung tinggi kemerdekaan batin, yang menolak segala macam pembatasan (berlawanan dengan paham determinisme dan naturalisme). Dalam arti negatif, Liberalisme adalah paham yang mengajarkan sikap orang untuk berbuat semaunya, keluar dari norma yang berlaku dan pemberontakan terhadap hal-hal yang tradisional. Cara lain untuk melihat Liberalisme adalah dengan menempatkannya dalam konteks yang tepat. Konteks-konteks tersebut adalah :

a. Konteks Personal

Liberalisme dalam konteks personal ingin mengatakan bahwa para penganut liberalism atau orang liberal adalah orang yang mempunyai sikap, cara berpikir, mentalitas yang kritis terhadap adat-istiadat, tradisi dan konvensi. Ia tidak mau terikat pada yang sudah ditetapkan atau yang sudah mapan, tetapi terbuka kepada kemungkinan-kemungkinan lain yang menurut pertimbangan akalnyanya akan lebih baik dan bermanfaat. Dalam arti ini liberalism merupakan suatu “method” dan bukan suatu ajaran, doktrin ataupun ideologi.

b. Konteks Ekonomi

Liberalisme dalam konteks ekonomi ingin mengatakan bahwa hidup perekonomian merupakan bidang yang harus dikembangkan sesuai dengan kodrat manusia yang bebas, sehingga perekonomian itu memang seharusnya berdasar atas prinsip pasar bebas (free market). Artinya, semua hubungan ekonomi tercipta oleh pasar bebas; campur tangan dari pihak mana pun tidak dibenarkan.

c. Konteks Politik

Liberalisme dalam konteks politik mengandung makna menentang segala bentuk pemerintahan yang otoriter, seperti dalam monarkhi absolute atau diktatur. Paham ini mencurigai segala bentuk kuasa karena kuasa cenderung berkembang menjadi semakin besar dan menindas, maka harus diberi harus di beri saluran dan dibatasi. Konstitusi adalah pembatasan bagi kekuasaan. Dasar filosofisnya adalah pandangan bahwa manusia individual itu tercipta dengan hak-hak yang tidak dapat diambil oleh orang lain.

d. Akar-akar Liberalisme

Kata liberalisme untuk pertama kali dipakai di Spanyol tahun 1811 sebagai sebutan untuk pengaturan Negara secara Konstitusional sebagai pengaruh Revolusi Prancis zaman Napoleon. Liberalisme baru benar-benar mulai berkembang kira-kira pada abad ke-14, tahap akhir abad pertengahan dan awal zaman Renaissance, dengan munculnya golongan baru yaitu Bourjuis. Selama berabad-abad struktur masyarakat terbagi menjadi tiga golongan: Rohaniawan, Bangsawan, dan Rakyat. Status tercipta karena sistem kepemilikan tanah sehingga hidup perekonomiannya terpusat pada mereka yang mempunyai tanah yang tinggal di manor (kastil atau istana bangsawan). Yang kemudian dikenal manorial economy. Tetapi ketika kerajinan atau Industri perumahan dan perdagangan mulai berkembang, manorial economy beralih ke Money economy dengan pusat kegiatan ekonomi di kota-kota.

2. Liberalisme di Prancis

- a. Liberalisme dalam periode Restorasi di Prancis 1815-1830

Revolusi Prancis telah menghapus kelas penguasa dari struktur masyarakat Prancis. Kelas itu adalah kaum bangsawan dan gerejawan tinggi. Sejak tahun 1792 mereka melarikan diri dari Prancis dan mengungsi ke Negara-negara yang memusuhi Revolusi (seperti Inggris dan Australia). Tetapi selama pemerintahan Napoleon (1799-1814) mereka berangsur-angsur pulang ke Prancis dan setelah sampai di tanah airnya mereka menjadi kelas yang terasing.

Menurut perjanjian Cartar 1814, Napoleon dikalahkan dan diasingkan ke pulau Elba, sedangkan wilayah Eropa berstatus Quo seperti sebelum 1792. Carter ini merupakan konstitusi liberal yang dihadiahkan oleh Louis XVIII kepada bangsa Prancis, sehingga Raja dapat mencabutnya kembali. Setelah Napoleon meninggal di pulau St. Helena, Charter dan Louis direhabilitasi kembali pada tahun 1815. Maka Charter ini sering disebut 1815.

Revolusi 1789 telah membelah bangsa Prancis menjadi dua, yaitu golongan konservatif yang ingin kembali ke situasi sebelum Revolusi dan golongan Revolusioner yang bercita-cita melanjutkan Revolusi karena dianggap Revolusi belum selesai. Golongan Revolusioner ini mempunyai dua sayap yaitu Golongan Radikal dan golongan Borjuis (golongan doctinaire).

Charter 1814 merupakan kemenangan bagi klas borjuis (upper middle class) di mana golongan *dotrainer* (Borjuis) ini mempunyai cita-cita :

1) Pembagian kekuasaan yang tegas

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang dan undang-undang harus dimaklumkan sehingga semua warganegara mengetahuinya. Undang-undang yang tidak dimaklumkan tidak harus ditaati. Kekuasaan yudikatif mempunyai hak untuk menilai adil tidaknya suatu undang-undang tertentu. Maka badan ini harus benar-benar independent tidak dibawahkan atau dipengaruhi oleh kekuasaan yang lain.

Kekuasaan harus dapat dikontrol oleh rakyat supaya rakyat dapat menjalankan fungsi kontrolnya, maka harus ada kebebasan pers, kebebasan untuk berpikir, berbicara, berserikat. Sensor atas pers tidak dapat dibenarkan, karena keberengusan pers akan melindungi keburukan penguasa.

2) Otonomi badan-badan pemerintah daerah dan lokal

Pemerintah di daerah dan pemerintah lokal harus di beri otonom untuk mengurus kepentingan masing-masing. Kekuasaan pusat harus dibatasi, kepentingan-kepentingan konkret daerah dan lokal tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pemerintah pusat.

3) Bentuk Federalisme

Pemerintah swa-praja setempat diberi otonomi sendiri atas kepentingan-kepentingannya yang khas, tetapi pemerintah pusat menempatkan fungsionaris-fungsionarisnya. Para fungsionaris dari pusat itu ditentukan oleh pemerintah pusat dengan persetujuan pemerintah daerah.

Hak untuk mengadakan perlawanan terhadap penindasan. Hak ini hak untuk resistence to

oppression. Dengan kegigihan mereka membela Charter 1814 kaum borjuis liberal ini sebenarnya sudah menjadi konservatif (Reggiero, 1927 : 171). Mereka berusaha mempertahankan status quo dan perolehan mereka selama revolusi.

b. Masa Setelah Revolusi

Ada sejumlah sebab yang membangkitkan reaksi golongan liberal, yaitu:

- 1) Undang-undang pemilihan diperbaharui: milik sebagai syarat bagi hak memilih dilipatkan sehingga semakin sedikit yang dapat memilih wakil di legislative akibatnya memperkokoh kedudukan golongan ultra royalis.
- 2) Memberikan ganti rugi kepada golongan émigré sebanyak satu milyar franc, biaya diambil dengan memotong bunga uang simpanan golongan borjuis dalam bentuk surat-surat obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- 3) Pembredelan semakin ketat terhadap penerbitan golongan liberal. Sekolah-sekolah dikembalikan pada yayasan gereja : Ordo Yesuit boleh kembali.

Ciri-ciri monarkhi konstitusional masa Louise Phillipe 1830-1848:

- 1) Raja berdaulat "atas rahmat Tuhan dan atas kehendak bangsa Prancis".
- 2) Syarat untuk mendapatkan hak pilih diperlunak, jumlah milik/kekayaan diperkecil sehingga jumlah orang yang dapat memilih dan di pilih jumlahnya semakin besar. Jumlah pemilih naik dari 100 ribu menjadi 240 ribu.

- 3) Badan Legislatif hanya terdiri dari satu kamar, Majelis Bangsawan / Majelis Tinggi di hapuskan dan diganti dengan Senat.
- 4) Garda Nasional dibentuk ; sensor atas pers di hapus; anggaran biaya untuk keagamaan dihapus; beberapa ordo kebiaraan dilarang; pendidikan merupakan monopoli pemerintah.

c. Liberalisme Klasik

1) Aristokrasi baru

Liberalisme klasik dimulai pada pemerintahan Louis Philippe sampai sebelum perang Prancis-Prusia yaitu 1870-1871. Hubungan sosial yang bersifat feodal diganti dengan hubungan yang bersifat ekonomis. Pada masa Louis Philippe Negara dianggap identik dengan pemerintah. Hal ini terlihat dalam :

- a) Adanya undang-undang yang membatasi kebebasan pers, supaya tidak mengkritik rezim liberal ini.
- b) Hak pilih dibatasi dengan property qualifications; tertutup kemungkinan untuk memberlakukan hak pilih bagi semua orang.
- c) Undang-undang dikeluarkan oleh Assemblée National selalu mengarah pada kepentingan usaha kaum borjuis.

2) Revolusi 1848

Pada tahun 1845-1848 situasi sosial-ekonomi di Prancis amat buruk hal ini disebabkan karena:

- a) Secara ekonomi
 - Pertanian paceklik dan gagal panen.

- Industri terjadi over produksi, kredit macet, PHK yang mengakibatkan pengangguran besar-besaran.

b) Secara Sosial

Buruh diradikalisasi oleh golongan petite bourgeoisie yang tidak mendapatkan tempat dalam pemerintahan kaum bourgeois liberal. Kaum buruh bourgeois kecil dan buruh jumlahnya besar tapi mereka tidak dapat memperjuangkan kepentingan mereka. Kaum komunis mulai mempengaruhi kaum buruh sehingga menyebabkan kekhawatiran kaum liberal bourgeois kecil.

3) Pemerintahan Louis Napoleon

Pada masa ini golongan bourgeois liberal tetap bertahan meskipun ada oposisi dari bourgeois kecil (bersekutu dengan buruh), golongan sosialis dan komunis. Pada tahun 1848 kelompok bourgeois liberal menyodorkan konstitusi baru kepada Louis Napoleon yang isinya:

- a) Prancis menjadi Republik Demokrasi.
- b) Badan Legislatif terdiri dari satu kamar.
- c) Pemegang kekuasaan Eksekutif adalah Presiden dengan masa jabatan empat tahun dan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu.

Namun dalam perkembangannya, Louis Napoleon mengalami kesulitan dalam parlemen karena 2/3 anggota parlemen terdiri dari golongan royalis bourgeois.

d. **Liberalisme Demokrasi**

Kaum liberalis Prancis berkeyakinan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling rasional. Hal ini terlihat dalam konstitusi baru 1875 yaitu :

- 1) Hak pilih untuk semua laki-laki dewasa.
- 2) Badan perwakilan dipilih lewat pemilu.
- 3) Senat dan badan perwakilan merupakan badan legislative yang bergabung dalam Asemblee Nationale yang berhak membuat undang-undang.

3. Liberalisme di Inggris

a. Inggris periode 1815-1830

Golongan konservatif, yaitu Partai Tory mendominasi pemerintahan pada awal abad-19. Keadaan ekonomi inggris dikuasai oleh kaum bangsawan. Di Inggris terdapat dua jenis bangsawan, yaitu:

- Bangsawan besar; wilayahnya besar secara otomatis menjadi anggota house of lords, menduduki kursi secara turun temurun.
- Bangsawan kecil; bersama orang bermilik menjadi anggota house of cammons, dipilih lewat pemilu.

Di Inggris tidak terjadi sentralisasi karena letak geografisnya adalah kepulauan. Awal abad ke-19 aristokrasi menguasai parlemen Inggris. Ketika terjadi perang Inggris – Prancis berdampak pada Inggris yaitu:

- 1) Terjadi depresi ekonomi yang amat parah, dalam wujud jatuhnya harga-harga dan pengangguran.
- 2) Perekonomian bersandar semata-mata pada pertanian

- 3) Rakyat semakin terhimpit yang menyebabkan timbulnya berbagai kerusakan. Kaum buruh menganggap mesinlah yang menyebabkan kesengsaraan mereka.

b. Kebangkitan kaum liberal/Whig

Revolusi Juli 1830 di Prancis juga berpengaruh di Inggris. *The ruling class* di Inggris yang berhaluan liberal mulai melancarkan usaha untuk memajukan kepentingan mereka dengan programnya:

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip liberal dalam bidang ekonomi
- 2) Memenuhi tuntutan buruh untuk mendapatkan jaminan social dan hak-hak politis.

c. Liberalis klasik dan kelompok intelektual Radikal

Perumus teori liberalisme Inggris adalah kaum filsuf radikal, yaitu:

- 1) Jeremy Bentham (1748-1832)
- 2) David Ricardo (1772-1823)
- 3) Thomas Malthus (1766-1834)
- 4) James Mill (1733-1836); ayah John Stuart Mill (1806-1873)

Paham mereka bersifat rasional yang menghendaki masyarakat di reformasi, diperbaiki berdasarkan suatu konsep yang rasional dengan cara pendidikan bagi seluruh rakyat dan perundangan yang adil serta demokratis. Kebijakan pemerintah selama kaum liberal mendominasi parlemen, yaitu:

1) Reform Act 1832

Reform Act merupakan tanda kemenangan kaum liberal. Tokoh-tokoh paham *Free Light Liberalism* ekonomi merupakan intelektual yang radikal antara lain; Malthus (soal kependudukan), Ricardo (upah buruh) yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintahan inggris. Menurut paham ini; orang yang bebas dalam masyarakat kontraktual adalah orang yang dilepaskan dari kewajiban-kewajiban dan perlindungan yang berasal dari status pada golongan tertentu. Undang-undang yang dikeluarkan oleh kaum liberal antara lain;

Wakil-wakil *dibrough* yang telah kosong dikurangi dan diserahkan kepada pusat-pusat industri (Manchester dan Birmingham).

2) Hak pilih didasarkan atas kualifikasi

Motivasi ekonomis tampak jelas bahwa apabila perbudakan diteruskan, yang diuntungkan adalah para pengusaha. Dengan sistem perbudakan para pengusaha tidak mengeluarkan biaya, karena tenaga kerja murah.

3) Factory Laws 1833

Anak-anak usia 9-13 tahun hanya boleh bekerja 9 jam perhari, dua hari merupakan hari untuk bersekolah. Anak-anak usia 13-18 tahun hanya boleh bekerja 12 jam perhari, malam tidak dibenarkan untuk bekerja.

4) New Poor Laws 1834

Dengan undang-undang ini buruh menjadi barang dagangan. Kaum liberal yakin pasar akan menentukan harga komoditi. Prinsipnya biarkan mereka yang tidak bekerja tidak makan.

5) Liberalism Demokrasi dan Welfare

Ketika liberalism klasik banyak mendapat serangan dan kritik, mereka terpecah terlebih mengenai imperialisme, perdagangan bebas dan soal irlandia utara. Liberalisme klasik telah menghasilkan pengusaha raksasa, konglomerat besar, dan ternyata menghancurkan kebebasan individual, hal ini diluar perhitungan kaum liberal. Pengkritik liberalism klasik adalah Thomas Hill Green, melalui karyanya *Lectures on the principles of political Obligation*, yang menegaskan bahwa tugas terpenting dari Negara adalah menjadi sarana bagi terciptanya common good. Bila common good tercipta oleh Negara, individual good akan tercipta juga sebagai konsekuensinya. John Stuart Mill memajukan liberalisme demokrasi lewat *Considerations on Representative Government*. Menurutnya Universal Suffrage harus dijalankan supaya pemerintahan tidak hanya pemerintahan oleh kaum bermilik semata. Menurut Mill, kemiskinan yang dialami oleh para buruh bukan semata karena hukum alam, melainkan kesalahan manusia yang membuat distribusi tidak adil. Karena itu serikat buruh perlu didukung untuk kesejahteraan dan tingkat pendidikan yang lebih baik.

John Stuart Mill mengajukan argumen yang lebih mendukung pemerintahan berdasarkan demokrasi liberal. Dia mengemukakan tujuan utama politik ialah mendorong setiap anggota masyarakat untuk bertanggung jawab dan menjadi dewasa. Hal ini hanya dapat terjadi manakalah mereka ikut serta dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Oleh karena itu, walaupun seorang raja yang bijaksana dan baik hati, mungkin dapat membuat putusan yang lebih baik atas nama rakyat dari pada rakyat itu sendiri, bagaimana pun juga demokrasi jauh lebih baik karena dalam demokrasi rakyat membuat sendiri keputusan bagi diri mereka, terlepas dari baik buruknya keputusan tersebut.

4. Ciri Ideologi Liberal

Ciri-ciri ideologi liberal sebagai berikut.

- a. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik.
- b. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers.
- c. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri.

Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Pendek kata, kekuasaan dicurigai sebagai hal yang cenderung disalahgunakan, dan karena itu, sejauh mungkin dibatasi.

Suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian besar individu berbahagia. Kebaikan suatu masyarakat atau rezim diukur dari seberapa tinggi individu berhasil mengembangkan kemampuan-kemampuan dan bakat-bakatnya. Ideologi liberalisme ini dianut di Inggris dan koloni-koloninya termasuk Amerika Serikat.

5. Ciri-ciri Ekonomi Liberal

- a. Semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu.
- b. Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.

- c. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
- d. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
- e. Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
- f. Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
- g. Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.
- h. Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.

C. Kapitalisme

1. Pengertian Kapitalisme

Istilah “kapital” pertama kali muncul pada abad-12, yang mempunyai arti: dana, persediaan barang, sejumlah uang dan bunga uang pinjaman. Pada abad ke-18 istilah kapital diartikan sebagai modal produktif, karena uang memang digunakan untuk menghasilkan barang-barang yang dijual untuk memperoleh keuntungan secara bebas. Menurut Peter Berger, inti kapitalisme terletak dalam memproduksi barang untuk pasar melalui kerja individu atau usaha bersama dalam upaya memperoleh laba.

Menurut Maurice Dobb, kapitalisme diartikan sebagai paham yang mengajarkan bahwa dalam bidang ekonomi berlaku dalam persaingan bebas dan jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang terus menerus bagi semua orang. Sedangkan menurut Lyman Tower Sargent, kapitalisme dipahami sebagai sistem ekonomi dengan ciri sebagai berikut.

- a. Pemilikan kekayaan secara pribadi yang tidak terbatas.
- b. Tidak ada pembatasan untuk mengumpulkan kekayaan.
- c. Pemerintah tidak campur tangan dalam pengelolaan sistem ekonomi pasar bebas.

Menurut Max Weber, kapitalisme dibagi menjadi dua, yaitu: kapitalisme irasional dan kapitalisme rasional. Kapitalisme rasional adalah kapitalisme yang dengan berbagai metodenya terus mengembangkan produktivitas ekonomi agar mendapat laba sebesar mungkin. Oleh karena itu, kapitalisme rasional disebut kapitalisme produktif. Sedangkan kapitalisme irrasional/politik yaitu penguasa atau negara memperoleh keuntungan dengan menjarah kekayaan orang lain dengan kekerasan, menarik upeti/pajak. Kedua bentuk kapitalisme tersebut mempunyai persamaan yaitu kegiatan yang mendominasi atau memeras pihak lain untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Esensi kapitalisme menurut ekonom Italia yang bernama F. Vita adalah:

- a. Adanya kebebasan dalam memilih kegiatan ekonomi.
- b. Pemilikan secara pribadi atas sarana-sarana produksi.
- c. Adanya persaingan bebas dalam bidang ekonomi.

Ciri-ciri dasar kapitalisme menurut sosiolog Nicholas Albercombrie yaitu:

- a. Pemilikan dan kontrol atas alat-alat produksi, khususnya kapital oleh swasta.
- b. Pengerahan kegiatan ekonomi kearah pembentukan laba.
- c. Adanya sistem pasar yang mengatur semua kegiatan bebas.

- d. Pemotongan laba untuk pajak.
- e. Penyediaan tenaga kerja oleh buruh yang bertindak sebagai pilihan bebas.

Esensi kapitalisme yang tetap dan sama untuk semua bentuk kapitalisme adalah modal/kapital. Modal diartikan bukan saja stok barang, mesin, uang atau kekayaan dalam bentuk apapun melainkan akumulasi hasil kerja dimasa lalu yang belum digunakan dan dapat di investasikan kembali untuk mencari keuntungan baik dengan cara kapitalisme rasional maupun kapitalisme irrasional.

Perbandingan bentuk kapitalisme kuno dan modern yaitu:

- a. Pemilikan atas semua sarana fisik seperti tanah, mesin,dll, sebagai milik usaha industrial.
- b. Kebebasan pasar yang mengandaikan tidak adanya pembatasan irrasional atas perdagangan.
- c. Perhitungan-perhitungan untung rugi yang membutuhkan teknologi (perhitungan pemanfaatan modal disertai administrasi, manajemen, hukum dan sistem peradilan).

D. Budaya Kapitalis Barat

Produk kapitalisme tidak terlepas dari liberalisme dan individualisme yang akarnya merupakan budaya barat, yaitu yudaisme, kekristenan, yunani, dan romawi kuno. Kapitalisme sebagai sistem perekonomian merupakan fenomena historis yang terbentuk secara bertahap dalam proses yang panjang dan sulit. Esensi kapitalisme dari waktu ke waktu adalah sama , yaitu akumulasi modal yang akan diinvestasikan kembali untuk mendapatkan laba dan karenanya diperlukan pasar bebas serta penguasaan sarana-sarana produksi.

1. Kapitalisme Abad Pertengahan

Gejala kapitalisme yang nampak pada akhir abad pertengahan, yaitu:

- a. Ketika ekonomi uang mulai mengeser ekonomi barter seperti dikawasan Italia Utara khususnya Flanders yang merupakan pusat industri berbagai jenis kain, menjadi pusat manufaktur.
- b. Munculnya kota-kota serta Gilda-gilda dan perdagangan, khususnya setelah Perang Salib, seperti: Firenze, Milano, Venesia, Brusells, Amsterdam, dll.
- c. Munculnya sistem perbankan modern di Italia Utara yang kemudian meluas ke Eropa. Oleh karena itu, masyarakat sudah terbiasa dengan surat kredit, deposito, transfer lewat bank, dll.

Berikut adalah faktor- faktor yang mempercepat pembentukan modal pada tahap awal kapitalisme, yaitu:

- a. Dukungan agama Calvinis bagi kerja keras dan hidup hemat.
- b. Masuknya logam-logam mulia dari dunia baru (Asia,Afrika, Amerika) yang berpengaruh pada upah laba dan harga.
- c. Negara membantu pembentukan modal sebab kerajaan besar seperti Inggris, Prancis, Spanyol menjalankan sistem ekonomi Merkantilisme.

2. Kapitalisme Modern

Kapitalisme modern ditandai pergeseran kegiatan ekonomi perdagangan ke ekonomi industry. Pertama kali muncul di Inggris pada abad-18, kemudian di Prancis, Jerman, Italia pada abad-19 dan akhirnya seluruh Eropa abad-20. Selanjutnya, ciri-ciri ekonomi industrial adalah:

Sejarah Perekonomian

- a. Semua alat produksi material menjadi milik pribadi
- b. Kebebasan pasar terbuka lebar
- c. Tersedia teknologi yang memacu aktivitas ekonomi
- d. Tersedia sistem hukum yang rasional
- e. Mobilitas tenaga buruh secara bebas
- f. Terjadi komersialisasi ekonomi tanpa batas
- g. Menggunakan sistem akuntansi yang rasional

Perkembangan kapitalisme mencapai kejenuhannya pada awal abad-20. Setelah terjadi Perang Dunia (PD I dan II), perkembangan kapitalisme Eropa mengalami titik balik. Eropa tidak lagi menjadi pusat perekonomian dunia karena bergeser ke Amerika. Filsafat pasar bebas mulai ditanggalkan dan Negara mulai campur tangan dalam menentukan perekonomian masyarakat. Contohnya, di Italia dan Jerman, Mussolini dan Hitler mulai menasionalisasi industri-industri dasar untuk menghidupkan kembali perekonomian, demikian juga Inggris melakukan hal yang sama setelah partai buruh berkuasa.

Pada tahun 1930 terjadi resesi (kelesuan) ekonomi dunia yang disebabkan oleh kegagalan para ahli ekonomi dalam membangun dan menata suatu pasar sempurna. Pasar sempurna adalah:

- a. Jumlah produsen dan konsumen berpartisipasi besar di pasar. Dengan demikian kegiatan ekonomi menjadi efisien, kemudian dibentuklah GATT yang kemudian menjadi WTO.
- b. Adanya pengukuran dan perbandingan, produktifitas dan kreatifitas secara terus menerus bagi para produsen sebagai pelaku pasar (kompetisi).

- c. Kompetisi harus sama kuat tidak berat sebelah dengan demikian terjadi keseimbangan dalam hal memperoleh keuntungan.

Menurut Lester Throw (dalam Lantik, 2012) ada lima perubahan dalam sistem ekonomi, teknologi dan politik dunia abad-21 yang telah menyebabkan fenomena evolusi dipercepat adalah:

- a. Berakhirnya sistem komunisme (1990-an)
- b. Pergeseran kearah teknologi industri yang padat pengetahuan: dalam era kedua yaitu: abad ke-19 dan 20
- c. Struktur demografi manusia: populasi dunia terus bertambah, lebih sering berpindah dan semua menjadi tambah lanjut usia
- d. Munculnya ekonomi global: kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang menyebabkan semua produk dapat dibuat dan dijual dimana saja
- e. Adanya sistem ekonomi dunia dimana tidak ada satu Negara pun yang dapat mendominasi: aturan berdagang selalu ditentukan oleh Negara-negara yang mendominasi perdagangan dunia.

Kapitalisme perdagangan muncul pada abad ke-16 setelah dihapusnya sistem feodal. Dalam sistem ini seorang pengusaha mengangkat hasil produksinya dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, ia berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen.

Kapitalisme industri lahir dan berkembang pesat karena ditopang oleh kemajuan industri dengan penemuan mesin uap oleh James Watt tahun 1765 dan mesin tenun tahun 1733. Semua itu telah membangkitkan revolusi industri di Inggris dan Eropa menjelang abad ke-19. Kapitalisme industri ini tegak di

atas dasar pemisahan antara modal dan buruh; antara manusia dan mesin.

Sistem Kartel yaitu kesepakatan perusahaan-perusahaan besar dalam membagi pasaran internasional. Sistem ini memberi kesempatan untuk memonopoli pasar dan pemerasan seluas-luasnya. Aliran ini tersebar di Jerman dan Jepang.

Sistem Trust yaitu sebuah sistem yang membentuk satu perusahaan dari berbagai perusahaan yg bersaing agar perusahaan tersebut lbh mampu memproduksi dan lbh kuat utk mengontrol dan menguasai pasar

E. Revolusi Industri

Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan.

Sedangkan pengertian Revolusi Industri yaitu perubahan yang cepat di bidang ekonomi yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Revolusi Industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan tangan menjadi menggunakan mesin. Istilah "Revolusi Industri" diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19.

1. Latar Belakang Revolusi Industri

Pada abad pertengahan, kehidupan di Eropa diwarnai oleh sistem feodalisme yang mengandalkan sektor pertanian, lazim disebut Latifundia (pertanian tertutup) Hubungan perdagangan

antara Eropa dengan dunia Timur (Timur Tengah dan Asia lainnya) tertutup setelah perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh para pedagang Islam abad ke 8 sampai abad ke 14. Dengan meletusnya perang salib (1096-1291) hubungan Eropa dengan dunia Timur hidup kembali. Muncul kota-kota dagang antara lain Genoa, Florence dan Venesia yang semula menjadi pusat pemberangkatan pasukan salib ke Yerusalem.

Lahirnya kembali kota-kota dagang diikuti oleh munculnya kegiatan industri rumahan (*home industry*). Dari kegaitan ini terbentuklah Gilda yaitu perkumpulan dari pengusaha sejenis yang mendapat monopoli dan perlindungan usaha dari pemerintah. Gilda hanya memproduksi jika ada pesanan dan hanya satu jenis barang yang diproduksi misalnya gilda roti, gilda sepatu, gilda senjata dan lain-lain.

Sejak tahun 1350 (abad 14) muncul organisasi perserikatan kota-kota dagang di Eropa utara yang disebut Hansa. Tujuan pembentukan hausa adalah untuk bersama-sama melindungi usaha perdagangan didukung oleh armada laut dan pasukan sendiri.

Kemudian pada abad 15 dan 16, ditemukan banyak wilayah baru atau tanah jajahan di Afrika, Asia, dan Amerika oleh pelaut-pelaut Eropa sehingga berkembanglah perdagangan lewat laut yang kemudian mengakibatkan terbentuknya kaum borjuis yang kaya dan sangat berpengaruh di Inggris, Nederland, Prancis, beberapa daerah di Jerman dan Italia. Kemunculan golongan menengah ini, yang menguasai sektor ekonomi dan melahirkan kapitalisme, akhirnya berhadapan dan melahirkan ketegangan dengan tuan tanah yang telah mendominasi sebelumnya.

Revolusi ini ditandai dengan penyebaran Pencerahan, keberhasilan para filsuf dan karya - karya mereka. Mereka

berupaya memperluas kemampuannya dalam menguasai alam dan memperbanyak pengetahuannya. Yang terpenting, dalam kaitannya dengan ekonomi, mereka bertekad mengurangi dan mengganti kerja kasar atau tenaga manusia dengan mesin. Kecenderungan ini terjadi menjelang tahun 1750, di Prancis, Jerman, Nederland dan terutama di Inggris.

Dengan adanya bahan mentah yang melimpah dari tanah jajahan ditambah kecenderungan untuk efisiensi kerja untuk menghasilkan yang sebesar-besarnya, maka perdagangan yang ada saat telah menghapus ekonomi semi-statis abad-abad pertengahan menjadi kapitalisme yang dinamis yang dikuasai oleh pedagang, bankir, dan pemilik kapal. Inilah awal dari perubahan yang cepat dan keras dalam dunia ekonomi yang kemudian memunculkan Revolusi Industri, yang bukan hanya bergerak dalam perdagangan, tetapi meluas juga pada dunia produksi.

Sebenarnya, ada 2 faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi industri, yaitu :

a. Faktor Ekstern

- 1) Terjadinya revolusi ilmu pengetahuan abad 16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, Rene Descartes, Galileo Galilei, Copernicus, Isaac Newton dan lain-lain.
- 2) Ditunjang adanya lembaga-lembaga riset yaitu:
 - The Royal Society for Improving Natural Knowledge
 - The Royal Society of England (1662)

b. Faktor Intern:

- 1) Keamanan dan politik dalam negeri yang mantap
- 2) Berkembangnya kegiatan wiraswasta dari masyarakat kaya dan pemilik modal

- 3) Munculnya minat masyarakat pada industri manufaktur
- 4) Inggris, memiliki jajahan yang luas
- 5) Kaya akan sumber alam antara lain batubara (coke) dan biji besi yang tinggi mutunya
- 6) Munculnya paham ekonomi liberal
- 7) Munculnya revolusi agraria yaitu perubahan sangat cepat dalam penataan tanah dengan berlakunya metode baru dalam pertanian yaitu dengan:
 - pengelolaan yang terus- menerus
 - pemupukan
 - irigasi
- 8) Pada abad 17 berkembanglah dunia pelayaran dan perdagangan. Di Inggris banyak berdiri kongsi dagang seperti : EIC, Virginia Co, Plymouth Co dan Massachussets Bay Co.

2. Kemunculan Revolusi Industri

Tidak diketahui kapan tepatnya revolusi industri dimulai. Ada yang berpendapat bahwa revolusi industri dimulai sejak Abad Pencerahan, bahkan ada juga yang berpendapat sejak masa Yunani. Akan tetapi secara umum dikatakan bahwa revolusi industri berawal dari negara Inggris sekitar tahun 1760. Inggris mendahului negara-negara lainnya dalam hal pembangunan pabrik-pabrik yang menggunakan mesin-mesin berat.

3. Wujud Revolusi Industri

Revolusi industri, pertama kali, ditandai dengan penggunaan mesin untuk pabrik pemintalan kapas. Dari tahun 1760 sampai 1870 banyak disaksikan penggunaan mesin-mesin ini. Salah satu

yang dikembangkan adalah mesin pemintal benang yang diberi nama “Jenny” yang diciptakan James Hargreaves, pada tahun 1767, yang diambil dari nama istrinya. Hanya saja, mesin ini ternyata tidak kuat, sampai di temukannya kerangka air oleh Ricard Arkwright dua tahun kemudian. Pada tahun 1779, Samuel Crompton menggabungkan alat pemintal “Jenny” dengan kerangka air menjadi sebuah mesin yang diberi nama “Mule”. Salanjutnya, ditemukan juga mesin tenun oleh Cartwright pada tahun 1785 yang disempurnakan beberapa tahun kemudian.

Penemuan-penemuan tersebut pada gilirannya mendorong munculnya sistem pabrik karena mesin pemintal benang, kerangka air, penggulung benang dan lainnya adalah mesin-mesin besar dan berat yang tidak bisa dipasang di kedai yang dioperasikan oleh seorang pekerja.

Pada perkembangan selanjutnya, dengan ditemukan mesin uap yang bisa dipergunakan sebagai penggerak mesin berat, sistem pabrik menjadi semakin berkembang. Pada gilirannya, sistem kerja mesin-mesin dalam pabrik ini kemudian melahirkan temuan-temuan mesin baru yang mendorong lahirnya industri-industri besar berikutnya. Munculnya industri-industri besar hasil penemuan mesin-mesin “sederhana” sebelumnya, melahirkan penemuan dalam bidang transportasi, kereta api, kendaraan bermesin (otomobil), navigasi uap (kapal uap), telegram dan alat-alat pertanian. Kenyataan ini, pada gilirannya juga melahirkan industri baru untuk mendukung penemuan-penemuan tersebut.

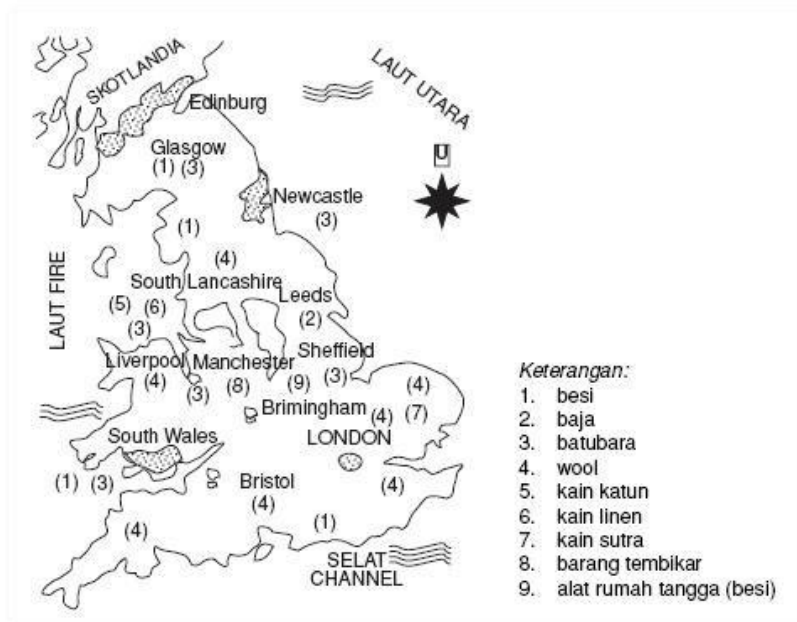
Atas hasil temuannya James Watt sering digelar sebagai Bapak Revolusi Industri walaupun sebenarnya penemuannya merupakan penyempurnaan dari mesin uap hasil penemuan Thomas New Comen tahun 1712.

Penemuan berikutnya tidak hanya dibidang mesin produksi tekstil saja tetapi juga alat transportasi darat, laut dan udara, elektronika yaitu pesawat telepon, telegraph dan radio serta bidang kimia. Penemuan tidak hanya di Inggris melainkan juga merambah ke negara lain seperti Prancis, Italia, Belanda, Amerika Serikat, dan seterusnya. Untuk sampai pada tingkat industri modern, pembuatan barang-barang dimulai dari tingkat kerajinan yang secara bertahap berkembang sebagai berikut:

- a. *Domestic System* (kerajinan rumah tangga), ciri - cirinya adalah:
 - pengrajin membuat barang-barang di rumah masing-masing dan dikerjakan secara manual.
 - menggunakan alat produksi yang masih tradisional milik sendiri.
 - hasil produksi dijual kepada pengusaha
- b. *Industri Manufaktur*
 - pekerja bekerja di rumah majikan dengan alat produksi yang masih digerakkan dengan tenaga manusia
 - jumlah pekerja sekitar 10 orang
 - rumah majikan berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat bekerja sekaligus tempat penjualan.
- c. *Factory System*
 - memproduksi barang-barang secara massal
 - menggunakan mesin
 - tempat berproduksi di kawasan industri terpisah dengan tempat tinggal dan tempat penjualan barang

Industrialisasi berkembang pesat di Inggris. Hal itu terbukti bahwa pada abad 17 Inggris mengimpor bahan katun dari India yang disebut *Kaliko* maka setelah revolusi industri India berbalik mendatangkan kain buatan Inggris. Pada tahun 1851

ratu Victoria membuka pameran mesin-mesin. Selain itu pada peta di bawah ini tampak bertebaran pusat-pusat industri dan pertambangan di seluruh Inggris.



Peta pusat industri dan pertambangan Inggris

F. Revolusi Industri Kedua

Setelah berjalan satu abad, sekitar tahun 1860, Revolusi Industri memasuki fase baru yang berbeda dari apa yang sudah lalu, yang dikenal sebagai Revolusi Industri tahap kedua. Kejadian-kejadian yang terjadi pada periode itu terutama ada tiga hal : perkembangan proses Bessemer dalam membikin baja pada tahun 1856; penyempurnaan dinamo kira-kira pada tahun 1873; dan penciptaan mesin pembakaran di dalam pada tahun 1876. Perbedaan antara Revolusi Industri tahap kedua ini

dibanding tahap pertama adalah, (1) adanya penggantian baja ditempat besi sebagai bahan industri pokok; (2) penggantian batu arang dengan gas dan minyak sebagai sumber pokok tenaga dan penggunaan listrik sebagai bentuk pokok tenaga industri; (3) perkembangan mesin otomatis dan peningkatan yang tinggi spesialisasi buruh; (4) penggunaan campuran dan metal yang ringan dan hasil industri kimia; (5) perubahan radikal dalam transportasi dan komunikasi; (6) pertumbuhan bentuk-bentuk baru organisasi kapitalis; dan (7) tersiarnya industrialisasi di Eropa Tengah dan Timur dan bahkan di Timur Jauh.

G. Dampak Revolusi Industri

Dampak revolusi industri bagi umat manusia terasa dalam berbagai bidang, yaitu :

1. Munculnya industri secara besar-besaran.
2. Peningkatan mutu hidup, hidup menjadi lebih dinamis, manusia bisa menciptakan berbagai produksi untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Harga barang menjadi murah. Mengapa bisa murah? Coba bayangkan berapa ongkos produksi sehelai baju yang diproduksi dengan mesin dibandingkan produksi dengan alat-alat tradisional!
4. Meningkatnya urbanisasi ke kota-kota industri.
5. Berkembangnya kapitalisme modern.
6. Golongan kapitalis mendesak pemerintah untuk menjalankan imperialisme modern.

Dampak negatif revolusi industri khususnya di Inggris adalah upah buruh yang murah menyebabkan timbulnya keresahan yang berakibat pada munculnya kriminalitas dan kejahatan.

Upaya untuk memperbaiki nasib buruh dan masalah sosial di Inggris melahirkan aliran sosialisme dan revolusi sosial yang ditandai dengan keluarnya undang-undang berikut ini:

1. Catholic Emancipation Bill (1829) menetapkan hak yang sama bagi umat protestan dan katolik untuk menjadi pegawai negeri dan anggota parlemen . Sebelumnya berlaku Test Act sejak tahun 1673 yang melarang umat katolik menjadi pegawai negeri dan anggota Parlemen, sehingga mereka banyak yang pindah terutama ke Amerika.
2. Abolition Bill (1833) berisi penghapusan sistem perbudakan di daerah jajahan Inggris.
3. Factory Act (1833) yang menetapkan:
 - a. Anak-anak yang berusia 9 tahun tidak boleh dipekerjakan sebagai buruh perusahaan dan tambang.
 - b. Anak -anak di atas usia 9 tahun boleh bekerja 9 jam sehari dengan 2 jam mendapat pendidikan dari majikan.

Pada tahun 1842 muncul undang-undang yang melarang kaum wanita dan anak-anak untuk bekerja di perusahaan tambang. Mengapa demikian? karena keadaan yang menyedihkan seperti pada gambar 1.6, mereka bekerja di lorong-lorong pertambangan yang gelap di bawah tanah dengan badan dirantai. Bekerja lebih dari 10 jam per hari dengan gaji rendah.

4. Poor Law (1834) berisi pendirian rumah-rumah bagi pengemis dan penganggur agar tidak berkeliaran. Bantuan bagi yang berusia lanjut serta perawatan bagi penganggur dan pengemis yang cacat atau sakit.

BAB IV

SISTEM EKONOMI DAN PENGALAMAN SEJARAH

A. Antara Kapitalisme & Sosialisme

Tahun 1978 – 1979, RRC (RRT) sebagai negara komunis terbesar di dunia telah menganut *system socialist market economy* dalam bentuk *contract/ production Responsibility system* dalam pertanian.

- Tahun 1986: 5 tahun sebelum sistem pasar bebas diterapkan di Rusia, Vietnam sebagai Negara-negara satelit Uni Soviet melaksanakan Renovasi (Doi Moi).
- Tahun 1991 (bangkrutnya Uni Soviet) : Banyak orang mulai bicara tentang sistem-sistem ekonomi yang berubah ke arah satu sistem dominan yang berorientasi pasar dan meninggalkan sistem ekonomi dengan perencanaan sentral.

Negara Asia Timur dan Tenggara yang menerapkan sistem pasar, tetapi dengan arahan dan pimpinan langsung dari pemerintah adalah :

- | | |
|-------------|-----------------|
| - Indonesia | - Korea Selatan |
| - Malaysia | - Taiwan |

B. Sistem Ekonomi Barat

Konsep sistem ekonomi Barat tidak banyak disebut dalam buku-buku karena :Kapitalisme itulah sistem ekonomi yang diajarkan & dianut di Eropa/ Barat berasal dari ajaran-ajaran klasik Neoklasik yang mendasarkan pada ajaran pasar bebas.

Perkembangan awal ajaran pasar persaingan bebas langsung ditentang oleh ajaran sosialisme Karl Marx (Marxisme dan kemudian Leninisme) karena dianggap tidak akan menghasilkan kebahagiaan manusia dan Manusia akan menjadi sekedar alat produksi yang diatur oleh para pemilik modal yang sangat berkuasa.

Uni Soviet yang percaya pada kebenaran Marxisme – Leninisme memutuskan menerapkan langsung paham yang bukan kapitalisme ini dari 1922-1991 selama 70 tahun. Rusia tidak tanggung-tanggung berbalik 180 derajat mengubah sistem ekonominya menjadi sistem persaingan pasar bebas seperti yang dijalankan di dunia Barat. Hasilnya suatu malapetaka : produksi nasional Rusia th 1991 – 1994 jatuh 56 % dan laju inflasi tahunan adalah 880 % yang dampaknya terus berlanjut bagi kehidupan politik dan sosial warga Rusia.

Tahun 1991 dengan diterimanya sistem ekonomi pasar bebas di Rusia dan Eropa Timur, berarti tidak dikenal lagi sistem ekonomi Timur, maka sistem ekonomi kapitalisme dianggap telah menjadi sistem ekonomi global yang diterapkan di mana-mana.

Kesimpulan di atas dianggap Naif, tidak begitu saja diterima oleh Kyoko Sheridan dalam bukunya *Emerging Economic System in Asia* yang menguraikan kasus 8 Negara Asia yaitu : Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Filipina, Indonesia, Vietnam, Rusia dan Cina, disertai pembahasan khusus sistem ekonomi ASEAN dan peranan bisnis pengusaha-pengusaha Cina perantauan.

C. Sistem Ekonomi Asia

1. Jepang

Japan sebuah model sistem ekonomi dapat ditelaah sejarahnya sejak Restorasi Meiji tahun 1868. Para pemimpin Meiji mempercepat pembangunan ekonomi Jepang melalui industrialisasi tanpa menanyai rakyat terlebih dahulu.

Tiga Pemimpin Meiji:

a. Okubo Toshimichi (1833)

Menggelorakan semangat rakyat Jepang untuk membangun agar menjadi Negara yang perkasa. Awal dari “Regulated Capitalism” kapitalisme dengan pimpinan Negara.

b. Fukuzawa Yukichi (1835 – 1901)

Menekankan pentingnya pendidikan menuju peradaban modern. Fukuzawa mendirikan sekolah yang menarik para mantan samurai belajar ilmu ekonomi dan perdagangan untuk kemudian mendirikan industri-industri modern seperti: kereta api, telkom, Bank, asuransi, percetakan, pertambangan dan industri-industri baja.

c. Shibusawa Eiichi (1840 – 1931)

Meneladani bangsa Jepang membangun industri-industri besar disegala bidang. Etika bisnis harus didasarkan pada kejujuran, kebebasan dan semangat berkoperasi serta perasaan tanggung jawab sosial (cooperative spirit and a sense of social responsibility).

Pendekatan Meiji adalah upaya dan program-program yang terarah untuk meningkatkan motivasi manusia dan individu dengan mengkaitkan mereka dengan motivasi nasional.

Hasil kerja keras terlihat dalam bentuk kekuatan industri baru dan hasilnya, hanya dinikmati oleh yang kaya berupa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non esensial, yang miskin terlupakan.

Tahun 60-an rakyat menuntut perubahan kebijaksanaan ekonomi nasional yang lebih menekankan pada produksi kebutuhan-kebutuhan masyarakat banyak dan perbaikan lingkungan. Memuncak tahun 1971 dalam bentuk jeritan “ to hell with GNP”. Tahun 1995 MITI menerbitkan “Policy Guidelines” yang menegaskan perlunya reformasi sistem ekonomi (building a new economy community).

Menghadapi masa depan disusun empat skenario :

- a. Natural – trend Japan
- b. Mend Japan
- c. Advance Japan
- d. Reform Japan

Hanya Mend Japan yang tidak menginginkan peranan Negara dalam pembangunan. Mereka menghendaki sistem ekonomi yang lebih bebas lagi yang merangsang semangat wiraswasta dan membantu transformasi ekonomi ke arah struktur produksi yang lebih efisien. Natural-Trend Japan, Advance Japan dan Reform Japan lebih menyukai keterlibatan Negara dalam perekonomian termasuk dalam program pembangunan sosial membuktikan bahwa sistem ekonomi campuran (mixed economy) dianggap lebih cocok bagi rakyat dan Bangsa Jepang.

2. Rusia

Pembubaran Uni Soviet tahun 1991 telah menghancurkan perekonomian Rusia, permasalahan pada liberalisasi total yang terlalu cepat dan tidak tepat termasuk privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang tanpa perhitungan. Perubahan semacam ini disebut shock therapy strategy (Januari 1992) dengan dampak negative yang luar biasa. Otoritas Rusia berdasarkan nasehat dari IMF, Bank Dunia dan pakar-pakar ekonomi Barat yang ortodoks, terlalu disiplin menetapkan “the prices and policies right” bukan pada “getting the institution right” dan karena penerapan teori-teori ortodoks terhadap perekonomian transisi.

Teori –teori Ekonomi Neoklasik Ortodoks adalah: Teori yang hanya sesuai bagi perekonomian yang sudah maju dengan menganggap lembaga-lembaga yang diperlukan sudah ada, berfungsi baik, dan pelaku-pelaku ekonomi bertindak rasional dan etik. Yang sesungguhnya diperlukan adalah pembangunan dan pengembangan kelembagaan selangkah demi selangkah

secara terencana sehingga transisi dapat berjalan mulus & lancar.

3. RRC (RRT)

RRC/RRT (Republik Rakyat Tiongkok/China) berdiri tahun 1949, perekonomiannya diatur melalui perencanaan sentral. Hak milik atas faktor-faktor produksi berada di tangan Negara dan pertanian diselenggarakan secara kolektif.

Perbedaan besar antara Rusia tahun 1917 dan RRC tahun 1949 adalah: RRC merupakan Negara amat miskin dan belum memiliki industri-industri maju seperti halnya Rusia (sebelumnya Uni Soviet). Meskipun Uni Soviet sebagai Negara Sosialis lebih tua dan lebih maju dibandingkan RRC, ternyata RRC memiliki daya tahan lebih kuat sebagai sistem ekonomi sosialis karena berangkat dari sistem ekonomi yang rendah dan kemajuannya dicapai secara gradual, sehingga sistem (pasar) ekonomi rakyatnya yang bersifat kekeluargaan tidak pernah hilang sama sekali, maka saat dilakukan reformasi dan liberalisasi tidak diperlukan perubahan drastis ke sistem ekonomi pasar yang baru seperti halnya di Rusia.

Pada Kongres Nasional ke 14 bulan October 1992 sebagai tindak lanjut bubarnya sistem ekonomi Komunis Uni Soviet, RRC menetapkan sistem ekonomi baru yang disebut Ekonomi Pasar Sosial (Socialist Market Economy) dengan tekanan pada pasar dan bukan pada sosialisnya.

4. Vietnam

Kemerdekaan Vietnam dari Prancis tahun 1945 diikuti perang dengan Amerika Serikat yang berlangsung 30 tahun sampai 1975. Bersatunya kembali Vietnam, muncul masalah baru dalam sistem pengelolaan perekonomian 2 Vietnam yang amat berbeda. Tahun 1986 menjelang tahun-tahun penarikan tentara Vietnam dari Kamboja (kondisi damai), kongres partai ke 6 memutuskan

DOI MOI (renovasi) yang berarti diterapkannya sistem ekonomi pasar sosialis.

Keputusan ini mampu membangkitkan kembali pertanian Vietnam sehingga produksi padi meningkat 80 % dan Vietnam mampu memperoleh devisa dari ekspor 2,5 juta ton beras. Doi Moi tidak saja berarti reformasi ekonomi, tetapi juga mendefinisikan kembali tujuan sosial dan politik sosialisme. Para pemimpin Vietnam ingin menghindari situasi transisi ekonomi ke sistem ekonomi kapitalisme dan bertekad menggunakan kekuatan Negara untuk menyelamatkan hasil-hasil positif bidang sosial (equity) yang dicapai sebelumnya, sekaligus untuk menjamin bahwa pertumbuhan (growth), tidak perlu terjadi dengan mengorbankan pembangunan (development).

5. Taiwan

Cina Taiwan Negara amat kecil dengan penduduk 21, 4 juta , tahun 1995. Dalam periode hanya 30 tahun Cina berkembang sangat cepat dari Negara pertanian miskin menjadi Negara industri yang mengglobal karena : kerja keras rakyatnya, pemerintah yang kuat dengan kebijaksanaan ekonomi yang pragmatis (memimpin langsung usaha-usaha swasta baik di dalam/ ke luar negeri), dukungan awal yang all out dari pemerintah (penduduk) Amerika Serikat.

- Land Reform : kunci utama sehingga pertanian benar-benar bangkit untuk memberi cukup pangan bagi penduduknya.

Taiwan adalah kisah sukses sistem kapitalis/ ekonomi pasar dengan campur tangan Negara. Selanjutnya, industrialisasi mengikuti secara runtut petunjuk text book ekonomi neoklasik yaitu :

- Kebijakan substitusi impor (1950 – 1960).
- Perangsangan ekspor (1960 – 1973).
- Pendalaman basis industri (1973 – 1980).

- Inovasi & teknologi tinggi (mulai 1980)
- Internasionalisasi ekonomi modern (mulai 1987).

6. Korea Selatan

Korea Selatan adalah kisah sukses sistem kapitalis/ ekonomi pasar dengan campur tangan Negara. Tahun 1960 Korea Selatan merupakan salah satu Negara termiskin di dunia. Tahun 1980 tahun melampaui banyak Negara dalam tingkat GNP per kapita (US\$ 100 – US\$ 5.000) yaitu : Malaysia, Thailand, Filipina, Argentina, Brasilia dan Mexico. Demikian besarnya peranan Negara dalam memberikan perangsang-perangsang pada dunia usaha swasta, sampai-sampai sistem ekonominya disebut “Kapitalisme Terkomando” (command capitalism) atau “Guide capitalism with command components”. Ciri khas ekonomi Korea yang berbeda jauh dengan sistem ekonomi Taiwan adalah dalam peranan Chaebol (konglomerat) atau di Jepang disebut Zaibatsu, memang Chaebol banyak mengandalkan KKN dalam mengembangkan bisnisnya, sehingga 2 orang Presidennya diadili dan dihukum penjara karena korupsi.

7. Filipina

Filipina merupakan Negara paling kapitalistik di ASEAN dan bahkan lebih buruk lagi bersifat kapitalisme perkoncoan (crony capitalism). Di bawah Presiden Marcos yang berkuasa selama 23 tahun, pertumbuhan ekonomi di Filipina adalah paling lamban, jurang kaya – miskin yang lebar dan kemiskinan yang parah.

Program Land Reform atau agrarian reform yang dianggap bisa mengurangi ketidakmerataan ekonomi dan sosial tidak berjalan lancar karena para pemilik tanah (landlords) sering berusaha membatalkannya dengan berbagai cara. Dan program pengurangan kemiskinan juga menjadi tersendat. Program “ASEAN Tiger by 2000” yang dicanangkan Presiden Ramos sulit tercapai jika dominasi politik keluarga-keluarga, tuan-tuan tanah dan sistem perkoncoan masih terus berlaku. Maka

kemerataan dan keadilan sosial yang menjadi cita-cita Bangsa dan rakyat Filipina hanya akan tercapai melalui perubahan budaya.

8. Asean

Kyoko Sheridan dengan sangat tepat menyatakan bahwa “Keajaiban Asia” tidak boleh diasumsikan akan berlangsung terus karena pada dasarnya sistem kapitalisme bukan sistem yang stabil, sebaliknya sistem kapitalisme mengandung unsur-unsur ketidakstabilan.

D. Sistem Ekonomi Pasar Sosial

1. Model Ekonomi Pasar Sosial Jerman

Banyak ekonom arus utama menolak konsep ekonomi kerakyatan yang telah menjadi ketetapan MPR RI (No. XVI/1998), dengan alasan bahwa konsep itu hanya berciri normatif, tidak positif, artinya belum ada data ilmiah empirik apapun yang dapat mendukung hukum-hukumnya. Ekonom lain berkeberatan untuk menerima konsep ekonomi rakyat yang diskriminatif. Ekonom yang dengan sengit keberatan mengacu pada pasal-pasal Undang-undang Dasar atau Idiologi karena hanya merupakan konsep gagah-gagahan, padahal banyak contoh Negara-negara yang tanpa konsep gagah-gagahan malah bisa lebih maju seperti Taiwan, Thailand, dll.

Idiologi suatu bangsa yang tercantum dalam Undang-undang Dasar tidak sepatutnya diremehkan dalam penyusunan sistem ekonomi yang dianggap cocok bagi bangsa yang bersangkutan.

Cabang ilmu ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) yang mengoreksi paham ekonomi ortodok, dengan menganggap penting kelembagaan masyarakat seperti idiologi, agama dan moral. Dalam kaitan dengan moral, Adam Smith dalam bukunya *The Theory of Moral Sentiments* (1759) mengemukakan sifat-sifat manusia yang bersimpati satu sama lain adalah sama pentingnya dengan sifat manusia yang egois. Manusia tidak

hanya bersemangat bersaing tetapi juga bekerjasama sehingga bukan hanya pengertian competitive advantage, yang dianggap penting tetapi konsep cooperative advantage juga untuk mencapai efisiensi ekonomi. Dengan moral dan semangat kerjasama (social cooperation), maka tekanan yang berlebihan pada upaya mencapai efisiensi, sebaiknya dilengkapi dengan upaya mencapai keadilan (justice, equity) yang harus dianggap sama pentingnya dalam kehidupan ekonomi dan sosial setiap masyarakat.

2. Sistem Ekonomi Pasar Sosial (SEPS)

Buku *Social Market Economy: An Economic System for Developing Countries* diterbitkan tahun 1990 dan disunting oleh ekonom muda Jerman (lahir 1948) Winfried Jung. Buku yang disunting merupakan keprihatinan anak muda terhadap sistem ekonomi Negara-negara sedang berkembang. Semangatnya adalah bahwa ada jalan ke tiga yang tidak harus berupa sistem ekonomi komando (sosialis) yang sudah bangkrut di Eropa Timur (1991), tetapi juga bukan sistem kapitalis liberal.

3. Dasar-dasar Intelektual dan Sejarah

Landasan ilmiah SEPS adalah kombinasi prinsip-prinsip kebebasan dengan pemerataan sosial, jadi bukan pasar bebas yang liberal dan juga bukan paham ekonomi monetaris yang tidak menghendaki campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun. Ada 6 kriteria SEPS.

- a. Ada kebebasan individu dan sekaligus kebijaksanaan perlindungan usaha. Persaingan di antara perusahaan-perusahaan kecil maupun menengah (ekonomi rakyat) harus dikembangkan.
- b. Prinsip-prinsip pemerataan sosial menjadi tekad warga masyarakat.

- c. Kebijakan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.
- d. Kebijakan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana (sosial) yang terkait dengan pembangunan ekonomi.
- e. Kebijakan struktural.
- f. Komunitas pasar dan komunitas persaingan.

Salah satu faktor lain yang mendukung keberhasilan penerapan SEPS di Jerman adalah keberhasilan Menteri Ekonomi Federal Ludwig Erhard, pendukung utama konsep ini, yang berhasil membabat hambatan dari banyak orang yang menentang pikiran-pikiran tentang SEPS ini.

4. Peranan Pemerintah

Intervensi ekonomi pemerintah hanya diperlukan jika persaingan yang efektif ternyata tidak berjalan, dan jika produksi dan pengembangan nilai serta prinsip-prinsip dasar tidak dapat dipercayakan kepada pihak-pihak swasta. SEPS memerlukan pemerintah yang kuat, yang harus melakukan campur tangan (menguasai) jika benar-benar diperlukan (prinsip subsidiaritas).

5. Fungsi Persaingan

Persaingan yang efektif merupakan unsur sentral dan tak terpisahkan dalam SEPS. Persaingan efektif memerlukan perlindungan usaha dan dorongan pemerintah, dan merupakan instrumen yang paling efisien untuk mencapai alokasi sumberdaya yang optimal, dan produktivitas yang optimal.

6. Aspek Sosial

Aspek sosial sangat penting dalam SEPS yaitu :

- a. Peningkatan standar hidup kelompok berpendapatan rendah.
- b. Perlindungan semua warga masyarakat dari kesulitan hidup dan masalah-masalah sosial lain sebagai akibat dari resiko-resiko kesulitan hidup.

Tujuan-tujuan sosial dapat dicapai melalui :

- a. Pertumbuhan ekonomi
- b. Distribusi pendapatan yang adil (tingkat upah dan keuntungan perusahaan yang layak dan wajar, sistem perpajakan antar strata pendapatan yang adil dan menjaga stabilitas harga untuk mewujudkan keadilan sosial).
- c. Asuransi sosial
- d. Kesejahteraan sosial.

Pembagian pendapatan yang adil harus selalu dijaga dengan cara memberi perhatian pada

- a. Tingkat dan pertumbuhan upah.
- b. Sistem perpajakan yang adil.
- c. Stabilitas Harga.
- d. Persamaan peluang (bekerja dan berusaha) bagi semua warga masyarakat.

Dalam asuransi sosial minimal harus ada :

- a. Asuransi pengangguran.
- b. Asuransi hari tua.
- c. Asuransi kesehatan.
- d. Asuransi kecelakaan.

Dalam Kesejahteraan sosial dikenal dengan program-program:

- a. Bantuan sosial.
- b. Bantuan perumahan.
- c. Bantuan sosial lain-lain (bantuan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak).

7. Aspek Regional dan Internasional

Tujuan SEPS secara global adalah :

- a. Meningkatkan standar hidup penduduk semua Negara di dunia melalui pertumbuhan ekonomi internasional yang didorong melalui perdagangan bebas.
- b. Kenaikan standar hidup yang lebih cepat bagi warga Negara-negara miskin melalui bantuan pembangunan dari Negara-negara kaya kepada Negara-negara miskin.

Penerapan SEPS di Negara Sedang Berkembang.

Sistem ekonomi diberi definisi sebagai :

A set of rules and institutions which may be considered as an attempt to find a solution for certain economic and social problems in a society.

Aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang khas dalam SEPS didasarkan pada 3 prinsip:

- a. Individualitas (personality) yang menekankan pada hak asasi dan kehormatan perkembangan kepribadian (kebebasan berproduksi, konsumsi, pemilihan profesi dan pekerjaan).
- b. Solidaritas, didasarkan pada ketergantungan individu pada masyarakat. Setiap manusia mempunyai kewajiban social satu sama lain.

- c. Subsideritas, setiap individu berkembang antara 2 kutub individualitas dan solidaritas, dan proses ini harus dilindungi aturan-aturan kelembagaan.

Modul SEPS dibentuk dalam prinsip-prinsip yang mencakup 4 bidang yaitu :

- a. Perencanaan dan kemampuan perusahaan-perusahaan dan kemampuan dalam pengambilan keputusan produksi dan investasi.
- b. Koordinasi dari rencana-rencana ekonomi yang sudah terdesentralisasi melalui pasar persaingan.
- c. Perkembangan dan perlindungan lembaga-lembaga pasar oleh Negara (hukum persaingan, aturan-aturan moneter dan keuangan).
- d. Kebijakan yang aktif dari Negara, yang disamping menghormati dasar-dasar komunitas dengan pasar, juga bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang setabil yang menghasilkan keseimbangan sosial.

E. Sistem Ekonomi Dualisme

Sejak jaman penjajahan sampai sekarang ini perekonomian Indonesia masih juga menunjukkan cirri-ciri adanya dualism, baik dualism yang bersifat teknologis maupun yang bersifat ekonomis, sosial dan cultural. Masalah dualism telah dibahas secara mendalam oleh ahli ekonomi Indonesia dan ahli ekonomi asing J. Boeke, yang mengadakan penelitian untuk program doctor ekonominya di Indonesia pada thun 1953 memberikan definisi yang termasyhur mengenai masyarakat dualistis sebagai masyarakat yang mempunyai gaya sosial berbeda, yang masing-masing hidup berdampingan. Dalam proses evolusi ke dua gaya sosial tersebut mewakili tahap perkembangan sosial yang berbeda, dipisahkan oleh satu gaya sosial lain yang mewakili suatu tahap transisi, misalnya masyarakat sebelum kapitalisme dan masyarakat kapitalisme maju yang dipisahkan oleh masyarakat kapitalisme awal.

Di dalam masyarakat dualistis, satu dari kedua sistem sosial yang hidup berdampingan itu, dan selalu yang lebih maju, berasal dari luar masyarakat tersebut dan mengalami perkembangan di lingkungan yang baru tanpa menggeser atau berasimilasi dengan sistem sosial yang asli. Dan akhirnya tidak akan timbul atau ciri umum yang berlaku di masyarakat tersebut secara keseluruhan. Dualisme adalah konsep yang menunjukkan adanya jurang pemisah yang kian lama terus melebar antara Negara-negara kaya dan miskin, serta di antara orang-orang kaya dan miskin pada berbagai tingkatan di setiap Negara. Pada dasarnya konsep ekonomi dualisme ini terdiri dari empat elemen kunci sebagai berikut.

1. Beberapa kondisi berbeda, terdiri dari elemen “superior” dan “inferior”, hadir secara bersamaan (atau berkoeksistensi) dalam waktu dan tempat yang sama. Inilah hakikat dari konsep dualism. Contoh penerapan konsep dualism ini antara lain dapat dilihat pada pemikiran A. Lewis tentang koeksistensi metode-metode produksi modern di kota dan metode tradisional di pedesaan, koeksistensi kelompok elit yang kaya raya dan terdidik dengan banyaknya orang-orang miskin yang buta huruf, adanya koeksistensi antara Negara-negara industri yang serba makmur yang berkuasa dengan Negara-negara agraris kecil yang miskin serta lemah di dalam perekonomian internasional.
2. Koeksistensi tersebut bukanlah satu hal yang bersifat sementara atau tradisional, melainkan satu hal yang bersifat baku, permanen atau kronis. Koeksistensi ini juga bukan merupakan fenomena sesaat yang akan mengikis seiring dengan berlalunya waktu. Artinya, elemen yang superior memiliki kekuatan untuk mempertahankan superioritasnya, sedangkan elemen yang inferior tidaklah mudah untuk meningkatkan posisinya. Dalam kalimat lain, koeksistensi internasional antara kaya dan miskin bukanlah hanya merupakan

sesuatu fenomena sejarah yang akan membaik dengan sendirinya bila saatnya sudah tiba.

3. Kadar superioritas serta inferioritas dari masing-masing elemen tersebut bukan hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurang, melainkan bahkan cenderung meningkat. Sebagai contoh, kesenjangan produktivitas antara para pekerja di Negara-negara maju dengan para pekerja di Negara-negara berkembang tampaknya semakin lama semakin lebar.
4. Hubungan saling keterkaitan antara elemen-elemen yang superior dengan elemen-elemen yang inferior tersebut terbentuk dan berlangsung sedemikian rupa sehingga keberadaan elemen-elemen superior sangat sedikit atau sama sekali tidak membawa manfaat untuk meningkatkan kedudukan elemen-elemen yang inferior. Dengan demikian apa yang disebut sebagai prinsip “penetesan kemakmuran ke bawah” (trickle down effect) itu sesungguhnya sulit diterima. Bahkan di dalam kenyataannya, elemen-elemen superior tersebut justru tidak jarang memanfaatkan, memanipulasi, mengeksploitasi ataupun menggencet elemen-elemen yang inferior. Jadi, yang mereka kembangkan justru keterbelakangannya.

Unsur pemikiran pokok yang terkandung pada masyarakat dualistis telah secara implicit terkandung dalam teori perubahan struktural dan secara eksplisit telah dinyatakan dalam teori ekonomi pembangunan ketergantungan internasional, sehingga konsep masyarakat dualistis telah merupakan dasar teori pembangunan ekonomi.

F. Sistem Ekonomi Sosialis Indonesia

Istilah sistem ekonomi sosialis ala Indonesia muncul ada periode akhir dari kepemimpinan Presiden Sukarno, yakni

sekitar tahun 1960. Pada periode tersebut kiblat politik Indonesia adalah ke negara-negara sosialis Eropa Timur, Rusia dan RRC, tidak ke Negara-negara kapitalis Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada periode tersebut Indonesia adalah anti neo kolonialisme dan neo-liberalism, dan malahan keluar dari Perserikatan Bangsa-bangsa, dan membentuk masyarakat baru yang disebut New Emerging Forces. Perekonomian pada periode itu sangat mirip dengan sistem perekonomian Negara sosialis sebagai berikut.

1. Pemerintah Indonesia telah menyusun Pembangunan Semesta Berencana Delapan Tahun 1960-1968. Rencana tersebut bersifat menyeluruh di segala sector dan seluruh wilayah (semesta), namun belum sempat dilaksanakan.
2. Perusahaan-perusahaan besar dimiliki oleh Negara.
3. Sistem perbankan; semula adalah bank-bank swasta milik Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah, kemudian diubah menjadi sistem perbankan Rusia, dengan cara mengubah nama-nama bank pemerintah menjadi satu nama dengan unit-unit tertentu. Contoh : Bank Indonesia diubah menjadi Bank Negara Indonesia Unit I.
4. Sistem Devisa yang dipakai waktu itu adalah sistem devisa yang sangat umum dipakai oleh Negara-negara sosialis, yakni Exchange Control.

G. Sistem Ekonomi Pancasila

Istilah sistem ekonomi Pancasila ini muncul pada periode penggal ke dua dari masa Pemerintahan Orde Baru, yakni setelah Pelita III (1974-79). Muncul wacana, sistem ekonomi apakah yang dianut oleh Indonesia pada saat itu. Ada sekelompok pakar yang mengatakan sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi Pancasila. Kubu dari kelompok ini dasarnya di Universitas Gajah Mada dan Institut Pertanian Bogor.

Pelopornya diantaranya Profesor Mubyarto. Namun tidak sedikit ahli yang tidak setuju dengan wacana tersebut. Mereka pada umumnya berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa di Universitas Gajah Mada dan IPB sendiri pun tidak kurang ahli yang tidak sependapat dengan wacana bahwa sistem perekonomian yang dianut Indonesia saat itu adalah sistem Ekonomi Pancasila.

Sistem perekonomian pada saat itu ditandai, antara lain oleh hal-hal berikut.

1. Perencanaan ekonomi.
2. Peranan perusahaan asing.
3. Peranan perusahaan domestic.
4. Peranan IGGI (Inter Gobermental Group on Indonesia) dan IMF (Internasional Monetary Fund).
5. Sistem devisa.

Terlepas dari beberapa keberatan terhadap konsep sistem ekonomi Pancasila yang bergema pada waktu itu, kelompok Prof Mubyarto tetap berpandangan bahwa Indonesia nantinya/ seharusnya menganut sistem ekonomi Pancasila, meskipun mereka sadar bahwa keadaan perekonomian saat itu lebih menyerupai ekonomi kapitalis/ liberal. Menurut mereka setidaknya ada 5 ciri-diri dari sistem ekonomi Pancasila tersebut yang harus diperhatikan, yakni :

1. Adanya peran dominan koperasi dalam kehidupan ekonomi.
2. Diterapkannya rangsangan-rangsangan yang bersifat ekonomis maupun moral untuk menggerakkan roda perekonomian.
3. Ada kecendrungan dan kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianism atau pemerataan sosial.

4. Diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh.
5. Pengendalian pada sistem desentralisasi.

H. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Demonstrasi mahasiswa (rakyat) yang menuntut turunnya Suharto dari pemerintahan pada tahun 1997 dan meminta agar dilaksanakan reformasi. Reformasi yang dituntut adalah, antara lain, reformasi di bidang politik dan reformasi di bidang ekonomi. Reformasi di bidang politik adalah kebebasan bersuara, berpolitik, atau secara singkatnya adalah kebebasan demokrasi, yang selama pemerintahan Suharto (1965-1997) sangat dikekang atau dipasung. Reformasi di bidang ekonomi dikatakan bahwa di bawah presiden Suharto pemerintah terlalu memihak kepada perusahaan besar, pada hal terbukti dari krisis yang lalu (1997) bahwa usaha kecil dan menengah atau usaha rakyat terbukti tahan banting. Yang mengalami kehancuran pada krisis 1997 adalah usaha besar, PHK juga dilakukan oleh perusahaan besar, perusahaan multinasional. Kredit diarahkan terutama untuk kepentingan perusahaan besar. Dominasi asing dalam perekonomian, seperti misalnya peranan Bank Dunia, IMF dan lembaga asing lainnya, dianggap sebagai satu hal yang berlebihan dan rakyat menginginkan agar perekonomian lebih bersifat berdiri di atas kaki sendiri. Oleh karena itu hutang kepada IMF dan Bank Dunia dibayar lunas. Namun hutang luar negeri tidak seluruhnya lunas dan dalam waktu setahun, dan ironisnya adalah bahwa sementara hutang luar negeri berkurang ternyata hutang dalam negeri meningkat dengan tajam. Beberapa hal berikut ini merupakan kebijakan pemerintah selama dalam sistem ekonomi kerakyatan :

1. Peranan IGGI dikurangi, semula diganti dengan CGI (consultative Group on Indonesia) sehingga badan tersebut hanya bersifat konsultasi dalam menyusun kebijaksanaan ekonomi.

2. Investasi asing dengan UUPMA dan investasi dalam negeri dengan UUPMDN, yang memberikan prioritas pada pengusaha besar tidak banyak mendapat sorotan, tidak dihapuskan, namun berjalan seperti semula.
3. Tampak adanya usaha swastanisasi perusahaan Negara namun belum selesai dan usaha swastanisasi ini merupakan isu internasional dan bukanlah disebabkan oleh karena sistem ekonomi kerakyatan.
4. Dari tinjauan di atas dan pengamatan yang mendalam, sistem ekonomi kerakyatan ini masih mempunyai cirri sangat kental sebagai sistem ekonomi pasar.

BAB V

VEREENIGDE OOST INDISCHE COMPAGNIE - VOC -

A. Imperialisme dan Kolonialisme Barat

1. Imporium Malaka

Sejak runtuhnya Sriwijaya, kota pelabuhan terbesar yang patut disebut sebuah imporium adalah Malaka. Kota pelabuhan yang sekaligus menyandang nama kerajaan itu muncul pada ke-15 M. Kemunculannya sekaligus menggeser kedudukan Pasai dalam dunia perdagangan internasional. Secara geografis letak Malaka cukup strategis dan lebih menguntungkan dibandingkan Pasai. Pendiri Malaka, yaitu Parameswara menyadari pentingnya jaminan keamanan bagi negerinya yang kehidupan ekonominya lebih banyak bertumpu pada perdagangan daripada pertanian. Agar kotanya tetap ramai, penguasa Malaka berusaha mengamankan jalur-jalur perdagangannya dari para bajak laut atau lanun yang berkeliaran di sekitar Selat Malaka. Di samping itu penguasa Malaka berupaya menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya, terutama Majapahit (Jawa), Siam dan Cina (Siska, 2015:137-150).

Malaka juga mengirimkan ekspedisi militernya ke negeri-negeri yang dianggapnya penting untuk dikuasai karena menghasilkan barang-barang yang sangat dibutuhkan Malaka. Misalnya Kampar di pantai timur Sumatera ditaklukkannya karena daerah ini merupakan penghasil lada dan merupakan pintu keluarnya emas dari daerah pedalaman Minangkabau. Kemudian Siak juga ditaklukan dan dikuasainya karena menghasilkan emas.

Keberhasilan Parameswara menjalankan kebijakan politiknya, ditambah dengan perbaikan sistem pergudangan dan

perbengkelan kapal (doking), membuat kota Malaka berkembang menjadi sebuah emporium terbesar di Asia Tenggara. Apalagi setelah penguasa Malaka menjadi Islam pada tahun 1414, telah mendorong semakin banyak pedagang Islam dari Arab dan India yang nota bene menguasai jalur perdagangan dari Asia ke Timur Tengah, melakukan kegiatan bisnis-perdagangan di kota ini.

Menurut Tomé Pires, penulis Portugis, kebijakan yang ditempuh para raja Malaka adalah menumbuhkan sistem birokrasi yang dapat memenuhi tugasnya dalam mengatur perekonomian Malaka. Salah satu jabatan yang erat kaitannya dengan perdagangan di pelabuhan adalah Syahbandar. Di Malaka waktu itu ada empat orang syahbandar yang dipilih sendiri oleh para pedagang asing dari berbagai kelompok bangsa untuk mengurus kepentingan niaga mereka. Pertama, syahbandar yang mengurus para pedagang Gujarat; kedua, syahbandar yang mengurus para pedagang Keling, Bengali, Pegu, dan penduduk Pasai; ketiga, syahbandar yang menjaga kepentingan para pedagang Jawa, Maluku, Banda, Palembang, Kalimantan, dan Filipina (Sulu dan Mangindanau); dan keempat adalah syahbandar yang menjaga dan mewakili para pedagang Cina dan kepulauan Liu-Kiu. Kedudukan Malaka seperti inilah yang mendorong Portugis berusaha menguasainya.

Bangsa Portugis telah mendengar informasi tentang kota Malaka dengan segala kekayaan dan kebesarannya itu dari pedagang-pedagang Asia. Atas dasar informs itu Raja Portugal mengutus Diogo Lopes de Sequeira untuk menemukan kota tersebut, menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya dan menetap di sana sebagai wakil raja Portugal. Awalnya Sequeira disambut dengan senang hati oleh Sultan Mahmud Syah (1488-1528). Sikap Sultan kemudian berubah setelah komunitas dagang Islam internasional yang ada di bandar itu meyakinkannya bahwa Portugis merupakan suatu ancaman berat baginya. Oleh karena itu, Sultan berusaha menangkap Sequeira dan anak buahnya. Empat kapal Portugis yang sedang berlabuh berusaha dirusak oleh pihak Sultan, namun gagal

karena para kaptennya telah berhasil membaya kapal-kapal itu berlayar ke laut lepas. Penyerangan terhadap Portugis juga terjadi di tempat lainnya di barat. Dengan adanya kejadian seperti itu Portugis yakin bahwa untuk menguasai perdagangan hanyalah dengan cara penaklukan, sekaligus mengokohkan eksistensinya dalam dunia perdagangan Asia. Afonso d'Albuquerque, panglima Portugis yang mendapat tugas untuk merebut Malaka dengan satu perhitungan jika Malaka dapat dikuasai maka seluruh perdagangan merica di Asia akan menjadi milik Portugis.

Sebelum sampai ke Malaka, Portugis telah menguasai Hormuz dan Sokotra di sekitar Teluk Persia dan Goa di pantai barat India yang kemudian dijadikan pangkalan tetap Portugis. Pada bulan April 1511, Albuquerque berlayar dari Goa menuju Malaka dengan membawa armada Portugis yang berkekuatan 1200 orang dan delapan belas buah kapal perang. Perang terjadi secara sporadis sepanjang bulan Juli dan awal bulan Agustus, yang akhirnya dimenangkan oleh Portugis.

2. Awal Kolonialisme Bangsa Barat

Di satu pihak jatuhnya Byzantium ke tangan Turki Usmani telah menyebabkan komoditi dari Asia Timur dan Asia Tenggara di Eropa langka dan walaupun adanya harganya sangat mahal. Namun di pihak lainnya peristiwa itu berdampak positif karena telah mendorong meningkatnya ilmu pengetahuan di dunia Barat. Hal ini karena banyak ahli budaya-teknologi dari Byzantium yang lari ke Barat berhasil menularkan pengetahuannya di sana. Di Portugal misalnya, pengetahuan geografis dan astronominya meningkat semakin baik, sehingga orang-orang Portugis berhasil menjadi mualim-mualim kapal yang mahir dan tangguh. Kepandaian ini kemudian dipadukan dengan berkembangnya teknologi perkapalannya mulai dari penemuan sistem layar segitiga dengan temali-temali persegi, serta konstruksi kapal yang semakin baik sehingga kapal-kapal mereka lebih mudah digerakkan dan lebih layak dipakai untuk

pelayaran samudra. Demikian pula teknologi persenjataan mereka berkembang sehingga mampu menciptakan meriam-meriam yang dapat ditempatkan di atas kapal-kapal mereka. Kapal-kapal perangnya lebih menyerupai panggung meriam di lautan daripada istana terapung bagi para pemanah atau geladak balista (alat pelontar) seperti pada kapal-kapal Romawi pada masa Julius Caesar dan Oktavianus Agustus. Penemuan-penemuan teknologi itulah yang kemudian mendorong mereka untuk mencari jalur baru ke India (dalam mitos masyarakat Eropa waktu itu, rempah-rempah berasal dari India, sehingga mereka berlayar ke timur termasuk ke benua Amerika, adalah untuk mencari India).

Namun perlu dikemukakan di sini, bahwa Portugis berlayar ke timur bukan semata-mata untuk mencari rempah-rempah, tetapi juga untuk mencari emas dan sekutu untuk melawan Turki dalam arti melanjutkan "perang salib". Pencarian emas dan perak kemudian menjadi penting karena kedua logam mulia itu dijadikan semacam indikator kesuksesan satu negara, seperti dikemukakan oleh Antonio Serra bahwa kekayaan itu tiada lain adalah emas dan perak. Politik ekonomi ini dikenal di Eropa sebagai ekonomi Merkantilis. Paham ini mulai berkembang sekitar tahun 1500-an dan semakin berkembang setelah terbit tulisan-tulisan dari para pendukung paham ini, seperti Jean Colbert dari Perancis dan Thomas Mun dari Inggris.

Atas dorongan Pangeran Henry 'Si Mualim', Portugis memulai usaha pencarian emas dan jalan untuk mengepung lawan yang beragama Islam dengan menelusuri pantai barat Afrika. Mereka berusaha mencari jalan menuju Asia (India) guna memotong jalur pelayaran pedagang Islam, sekaligus untuk memonopoli perdagangan komoditi tersebut.

Pada tahun 1478, Bartolomeus Diaz sampai ke Tanjung Harapan di ujung selatan Benua Afrika. Kemudian pada tahun 1497 armada pimpinan Vasco da Gama sampai ke India. Pengalaman di India ini telah menyadarkan orang-orang Portugis bahwa barang-barang perdagangan mereka tidak dapat bersaing di pasaran India yang canggih dengan hasil-hasil yang mengalir

melalui jaringan perdagangan Asia. Oleh karena itulah semboyan "God -Gold - Glory" bagi mereka menjadi relevan, karena tidak ada cara lain untuk menguasai perdagangan Asia selain melalui peperangan dan menjadikan daerah-daerah penghasil komoditi itu sebagai koloni.

3. Dampak Dikuasainya Malaka oleh Portugis

Setelah Portugis berhasil menguasai Malaka, mereka menemukan kenyataan yang di luar perkiraannya. Kota pelabuhan itu bagaikan ayam dalam dongeng "ayam bertelur emas" yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Melayu. Seekor ayam yang setiap hari bertelur satu butir telur emas, yang kemudian disembelih oleh pemiliknya karena tidak sabar menunggu dan ingin segera mendapatkan telur-telur emas itu. Ternyata dalam tubuh ayam itu tidak ada telur emas. Portugis menemukan suatu kenyataan bahwa Malaka bukanlah produsen dari semua komoditi ekspor (khususnya merica) yang dicari-cari oleh para pedagang Barat. Kebesaran Malaka adalah karena peranannya sebagai emporium, pelabuhan transit bagi para pedagang Asia. Dengan diterapkannya politik monopoli serta upaya kristenisasi oleh Portugis, peranan yang disebutkan terakhir justru terganggu. Para perdagangan Asia, khususnya pedagang Islam merasa tidak nyaman lagi berdagang di kota tersebut. Umumnya mereka berupaya menghindari kota emporium itu dan mencari jalan alternatif guna mencapai tempat-tempat atau pelabuhan-pelabuhan lain yang diduga dapat memenuhi kebutuhan dagangnya.

Jalur perdagangan di Asia Tenggara pun berubah, tidak lagi melalui Malaka tetapi melalui pantai barat Sumatera, lalu masuk selat Sunda untuk selanjutnya menelusuri pantai utara Jawa menuju kepulauan Indonesia bagian Timur yang menghasilkan banyak rempah-rempah. Di jalur perdagangan baru itu tumbuh pusat-pusat perdagangan baru, seperti Aceh, Banten, Semarang, Jepara dan Surabaya.

Sementara itu, Malaka yang dihindari oleh para pedagang Islam kedudukannya semakin merosot dan tidak pernah meraih kembali kejayaan dan kebesarannya.

Portugis sendiri akhirnya menyadari bahwa pentingnya Malaka adalah peranannya sebagai pelabuhan emporium, pelabuhan transito. Guna mempertahankan fungsinya itu, kapal-kapal Portugis belayar ke Maluku untuk mengambil komoditi tersebut. Pada waktu itu di Maluku ada dua kesultanan Islam yang besar dalam kondisi sedang menurun dalam kekuasaan politiknya dan saling bermusuhan satu sama lain, yaitu Ternate dan Tidore.

Bangsa Eropa pertama yang menemukan Maluku adalah Portugis, pada tahun 1512. Pada waktu itu 2 armada Portugis, masing-masing dibawah pimpinan Anthony d'Abreu dan Fransisco Serau, mendarat di Kepulauan Banda dan Kepulauan Peny. Setelah mereka menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat - seperti dengan Kerajaan Ternate di pulau Ternate, Portugis diberi izin untuk mendirikan benteng di Pikaoli, begitupula Negeri Hitu lama, dan Mamala di Pulau Ambon. Namun hubungan dagang rempah-rempah ini tidak berlangsung lama, karena Portugis menerapkan sistem monopoli sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen. Salah seorang misionaris terkenal adalah Francis Xavier. Tiba di Ambon 14 Pebruari 1546, kemudian melanjutkan perjalanan ke Ternate, tiba pada tahun 1547, dan tanpa kenal lelah melakukan kunjungan ke pulau-pulau di Kepulauan Maluku untuk melakukan penyebaran agama. Persahabatan Portugis dan Ternate berakhir pada tahun 1570. Peperangan dengan Sultan Babullah selama 5 tahun (1570-1575), membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon.

Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis, dimanfaatkan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon kepada Steven van der Hagen dan di Tidore kepada Cornelisz Sebastiansz. Demikian pula benteng Inggris di Kambelo, Pulau Seram, dihancurkan oleh Belanda. Sejak saat itu Belanda berhasil menguasai sebagian besar

wilayah Maluku. Kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dengan berdirinya VOC pada tahun 1602, dan sejak saat itu Belanda menjadi penguasa tunggal di Maluku. Di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen, Kepala Operasional VOC, perdagangan cengkih di Maluku sepenuhnya di bawah kendali VOC selama hampir 350 tahun. Untuk keperluan ini VOC tidak segan-segan mengusir pesaingnya; Portugis, Spanyol, dan Inggris (id.wikipedia.org).

Bahkan, puluhan ribu orang Maluku menjadi korban kebrutalan VOC. Kemudian mereka membangun benteng di Ternate tahun 1511, kemudian tahun 1512 membangun Benteng di Amurang Sulawesi Utara. Portugis kalah perang dengan Spanyol maka daerah Sulawesi utara diserahkan dalam kekuasaan Spanyol (1560 hingga 1660). Kerajaan Portugis kemudian dipersatukan dengan Kerajaan Spanyol. (Baca buku :Sejarah Kolonial Portugis di Indonesia, oleh David DS Lumoindong). Abad 17 datang armada dagang VOC (Belanda) yang kemudian berhasil mengusir Portugis dari Ternate, sehingga kemudian Portugis mundur dan menguasai Timor timur (sejak 1515).

Kolonialisme dan Imperialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15, yaitu diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka dan bangsa Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman pada tahun 1596, untuk mencari sumber rempah-rempah dan berdagang.

Selain ke Maluku, Portugis berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan Pajajaran, satu kerajaan Hindu di Jawa Barat yang kedudukan politiknya juga sedang menurun. Namun, kerjasama dengan kerajaan ini tidak sempat terwujud karena Pajajaran tenggelam oleh kekuatan Islam Demak - Banten. Kenyataan ini telah memaksa Portugis untuk meninggalkan politik anti Islamnya (Perang Salib), dan berusaha mencari mitra kerja atau sekutu dagang dari kalangan Islam. Sebab, (1) Portugis harus menerima kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan di sekitarnya adalah Islam, dan (2) perdagangan Islam di Asia Tenggara sampai Timur Tengah cukup dominan.

Merebaknya kekuasaan VOC di Nusantara ditandai dengan keberhasilan J.P. Coen menyerang dan merebut Sunda Kelapa (Jakarta sekarang) pada tanggal 30 Mei 1619. Bahkan kota pelabuhan yang makmur itu dibakar habis oleh pasukan VOC di bawah J.P. Coen (Mulyana, 1980:98). Sebagai Gubernur Jendral VOC di kemudian hari, menjadikan Sunda Kelapa sebagai pos atau benteng yang aman di Nusantara, sebagai pusat administrasi, perdagangan dan politik pemerintahan VOC, dengan nama baru Batavia.

Dari pusat pemerintahannya di Batavia inilah, VOC terus-menerus merencanakan dan mengatur rencana-rencana dan siasatnya untuk menerapkan sistem perdagangan monopoli di seluruh wilayah Nusantara, khususnya di daerah-daerah atau kota-kota pelabuhan. Taktik licik yang ditempuh adalah dengan menjalankan politik adu domba (*devide at impera*) dan intervensi politik dalam urusan intern di berbagai kerajaan pribumi, dengan harapan bisa memperoleh sekutu dengan salah satu di antara yang bersengketa, membantunya dan akhirnya memperoleh imbalan jasa yaitu monopoli perdagangan, dan izin untuk mendirikan loji-loji atau benteng-benteng VOC. Menurut Ricklefs (1974:51), dalam setiap peranan kompeni Belanda dalam membantu dan menjaga kedudukan pewaris tahta kerajaan-kerajaan pribumi, berakibat semakin mendorong timbulnya konflik-konflik intern dalam istana, kekacauan atau bahkan pemberontakan. Untuk yang disebut terakhir inilah kompeni Belanda biasa mengambil sikap memihak kepada yang diharapkan akan memberi konsesi politik dan ekonomi lebih besar.

Setelah Portugis menyadari bahwa penghasil rempah-rempaah bukanlah Malaka melainkan Maluku. Atas dasar kenyataan itu Portugis berlayar ke Maluku dan berupaya menanamkan pengaruhnya melalui persekutuan dengan Ternate. Atas persetujuan Sultan Ternate, pada tahun 1522 Portugis membangun sebuah benteng di sana. Pada awalnya persekutuan itu berjalan dengan baik. Hubungan itu mulai rusak setelah Portugis melakukan kristenisasi terhadap masyarakat Maluku,

serta perilaku orang-orang Portugis sendiri dinilai tidak sopan. Akan tetapi karena kekuatan kerajaan Ternate ternyata tidak cukup kuat untuk mengusir orang-orang Portugis. Akibatnya yang terjadi menjadi kebalikannya, justru sultan Ternate, Tabariji diturunkan dari singgasananya oleh Portugis lalu dibuang ke Goa, India. Sekitar empat puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1575 giliran Portugis yang diusir oleh sultan Ternate, Baabullah (1570-1583). Dari Ternate orang-orang Portugis pindah ke Tidore dan membangun sebuah benteng di sana.

Meskipun gerakan kristenisasi tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh 'pemerintah' Portugis, namun tidak berarti upaya kristenisasi sama sekali berhenti. Karena masih ada orang Eropa yang meneruskan kegiatan itu di kepulauan Nusantara. Orang itu adalah Santo Francis Xavier (1506-1552), orang Spanyol, yang bersama-sama dengan Santo Ignatius Loyola mendirikan Ordo Jesuit. Pada tahun 1560-an di kepulauan Maluku diduga sudah ada sekitar 10.000 komunitas Katolik yang sebagian besar berdomisili di Ambon, dan pada tahun 1590-an terdapat sekitar 50.000 - 60.000 orang Katolik. Kondisi ini telah memberi sumbangan yang besar pada rasa memiliki kepentingan yang sama dengan orang-orang Eropa, terutama di kalangan penduduk Ambon. Perasaan semacam itu tidak dialami oleh penduduk pribumi (Indonesia) di daerah-daerah lainnya.

Upaya kaum missionaris yang sungguh-sungguh ini terjadi justru pada waktu kegiatan penaklukan Portugis di kepulauan Indonesia telah berhenti. Pada waktu itu kepentingan utama Portugis telah bergeser dari Maluku ke perdagangan dengan Jepang yang dinilainya lebih menguntungkan. Setelah Portugis memperoleh Macao di tahun 1557, perdagangan dengan Cina juga semakin terbuka. Akhirnya kegiatan Portugis yang luas mulai lebih dipusatkan pada perdagangan gula Brazil dan budak- budak Afrika daripada terhadap wilayah timur Asia, terutama setelah Portugis terusir dari Malaka tahun 1641 oleh kekuatan gabungan VOC dan Johor. Dengan demikian kristenisasi dengan segala pengaruhnya di kepulauan Indonesia

bagian timur lebih merupakan hasil jerih payah seorang Jesuit daripada hasil jerih payah kerajaan Portugal.

Selain agama, Portugis meninggalkan beberapa pengaruh budaya, seperti balada keroncong yang romantis, dan kosa kata yang terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti kata 'pesta', 'sabun', 'sepatu', 'bendera', 'kemeja', 'meja', 'minggu' dll. Hal ini membuktikan bahwa di samping bahasa Melayu yang menjadi lingua franca, bahasa Portugis banyak pula dipergunakan di kepulauan Indonesia, paling tidak sampai akhir awal abad ke-19. Kini, di daerah kepulauan Maluku masih banyak nama keluarga yang berasal dari masa Portugis, seperti: da Costa, Dias, de Fretes, Gonsalves, Mendoza, da Silva, dan Rodrigues.

Perdagangan Portugis pada dasarnya bersifat semi-feodal dan terikat oleh raja Portugis beserta politiknya. Perdagangan resmi Portugis dapat dikatakan sebagai contoh dari seorang raja Eropah yang berdagang. Karena itu banyak yang menilai organisasi perdagangannya kurang efisien. Para pejabatnya di Asia bukanlah saudagar melainkan hidalgo 's yang lebih menyukai perampokan daripada perdagangan resmi. Apalagi pada waktu itu bagi seorang prajurit, perampokan merupakan hak penakluk dari pihak yang menang perang sehingga perampokan dianggap terhormat.

B. VOC sebagai Kekuatan (Kongsi Dagang)

Dibandingkan dengan Belanda (Ekspedisi pertama Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten tahun 1596) dan Inggris (ekspedisi pertama Inggris di bawah pimpinan Sir Francis Drake yang singgah di Ternate, Sulawesi dan Jawa diakhir tahun 1579) yang baru datang ke wilayah ini menjelang akhir abad ke-16, maka organisasi perdagangan Portugis memang kelihatan kuno dan kurang efisien. Organisasi dagang yang dibentuk para pedagang dan penguasa Belanda, yaitu Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) mempunyai tujuan utama yang jelas, yaitu dagang. Ketegasan itu antara lain tercermin dari khirarkhi VOC itu sendiri. Jabatan "Eerste

Koopman" misalnya, dalam hirarkhi VOC merupakan jabatan penting dan strategis. Pada zaman kejayaannya, hampir semua mantan pejabat "Eerste Koopman" menjadi gubernur jenderal.

Rentetan tahun-tahun berikut menunjukkan betapa efektifnya penguasaan VOC di Nusantara: 1596: datang pertama kali di Banten; 1602: mendirikan VOC; 1605: merebut Ambon dan Tidore dari tangan Portugis; 1609: menguasai Banda dan melakukan pelayaran hongi; 1619: merebut Jayakarta (Batavia); 1669: menaklukkan Makassar, 1682: menaklukkan Banten; 1705: menjadi penguasa di Cirebon, Priangan, Madura, Smearing, Jepara, Rembang, Surabaya, Ujung Timur; 1755: VOC sudah menjadi yang dipertuan di Mataram.

Dalam menanamkan pengaruhnya di Nusantara, baik Portugis maupun Belanda banyak mempergunakan pola-pola konflik setempat. Di samping itu mereka juga membawa konflik-konflik mereka di Eropa ke wilayah ini, yang kemudian juga dipergunakan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sejak berdirinya, VOC sudah mempersiapkan diri untuk peperangan, terutama melawan musuh-musuhnya di Eropa. Pertama melawan Portugis dan Spanyol, setelah itu EIC (Inggris). Permusuhan antar kekuatan Barat ini tidak saja karena pada dasarnya telah bermusuhan di Eropa, melainkan juga karena persaingan dagang di kepulauan Indonesia dan Semenanjung Melayu, di mana tiap-tiap pihak ingin memperoleh monopoli atas perdagangan tersebut.

Kemunduran kerajaan-kerajaan Nusantara di samping disebabkan oleh persaingan atau konflik intern kerajaan tersebut, juga disebabkan oleh kedatangan bangsa Barat. Portugis dengan semboyan mereka 'no naval do trading, no fear no friendly', telah mengobarkan 'Perang Salib di lautan' (Chauduri, 1989:15). Selanjutnya, kawasan perairan Nusantara menjadi arena pertarungan dari berbagai kekuatan maritim baik lokal maupun internasional. Sementara itu dengan kekuatan militernya Belanda (VOC) berhasil memaksakan monopoli perdagangannya, sedangkan setelah VOC gulung tikar

pemerintah Belanda menggantikannya dan menjajah Nusantara dengan pemerintahan Hindia-Belandanya.

Ketika VOC sudah mulai berhasil merebut berbagai pelabuhan dan menguasai jaringan pelayaran di Nusantara, mereka justru menunjukkan perilaku yang sebaliknya. Mereka menegakkan monopoli perdagangan dan melarang suku bangsa tertentu untuk melakukan pelayaran di perairan tertentu. Contoh menarik dari persoalan ini dapat dilihat dari kasus hubungan yang penuh ketegangan antara Makassar dengan VOC pada awal abad XVII. Pada tahun 1616, VOC di Ambon mengirim delegasi ke Makassar. Mereka melarang orang Makassar untuk melakukan perdagangan dengan kepulauan Maluku, tetapi penguasa Makassar menentang larangan ini. Menurut kepercayaan mereka, Tuhan telah membagi bumi secara adil kepada semua bangsa, tetapi laut diberikan kepada semua manusia tanpa membedakan kebangsaan mereka (Sulistiyono, 2009:1-33). Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang Makassar jika Belanda melarangnya untuk berlayar ke Maluku yang sudah dilakukannya sejak berabad-abad sebelumnya. Jika VOC melakukan hal itu maka berarti VOC telah merampas penghidupan orang-orang Makassar. Oleh karena itu jika Belanda memaksakan untuk melarang orang-orang Makassar berlayar ke Maluku maka itu berarti Belanda telah mengibarkan bendera perang.

Kontrol yang ketat dan berbagai aturan yang membatasi dan melarang aktivitas pelayaran dan perdagangan juga diterapkan di daerah-daerah lain yang telah ditaklukkannya seperti yang dilaksanakan di Jawa. Dengan cara demikian akhirnya VOC berhasil melumpuhkan kekuatan pelayaran dan perdagangan pribumi di Nusantara. Memang kemudian ada pedagang-pedagang dari kelompok etnik tertentu yang 'melarikan diri' ke daerah lain untuk menghindari kontrol Belanda seperti orang Bugis dan Makassar yang menegakkan hegemoni di Semenanjung Melayu.

Sementara itu untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, VOC melakukan monopoli pembelian produk-

produk dari penduduk pribumi sehingga kapal-kapal non-VOC menghadapi kesulitan untuk memperoleh muatan. Selain itu VOC juga melarang kapal-kapal asing untuk singgah di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai VOC kecuali di beberapa pelabuhan yang telah ditetapkan secara khusus untuk pelayaran internasional.

Pada masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), gubernur jenderal merupakan penguasa tertinggi di Hindia. Ia mempunyai kekuasaan yang nyaris tak terbatas seperti halnya seorang raja absolut karena tidak ada undang-undang yang khusus mengatur hak-hak dan kewajibannya. Demikian pula dengan struktur pemerintahannya di Asia, khususnya Hindia Timur juga tidak ditentukan. Salah satu pasal yang penting dari oktroi VOC adalah hak monopolinya sehingga dengan haknya itu VOC merupakan satu-satunya badan dari Belanda yang boleh mengirimkan kapal-kapal ke daerah sebelah timur Tanjung Harapan.

Dalam melaksanakan pemerintahannya, gubernur jenderal didampingi oleh Raad van Indie (dalam prinsipnya terdiri atas enam orang anggota dan dua anggota luar biasa, di mana gubernur jenderal merangkap sebagai ketua). Laporan-laporan mengenai aktivitas VOC secara berkala dikirimkan ke dewan Heeren XVII, yang merupakan pimpinan pusat VOC yang berkedudukan di Amsterdam.

Dalam menangani wilayah kekuasaannya, VOC lebih banyak melakukannya melalui pemerintahan tidak langsung. Hanya daerah-daerah tertentu saja, seperti Batavia, yang diperintah secara langsung oleh VOC. Dalam sistem seperti ini, kaum pribumi nyaris tidak terlibat dalam struktur kepegawaian VOC. Meskipun kaum elit pribumi terlibat dalam pemerintahan, tetapi status mereka bukan pegawai VOC dan tidak digaji secara tetap oleh kongsi dagang tersebut. Para elit pribumi lebih banyak diperlakukan sebagai mitra kerja demi kepentingan VOC. Hal ini terlihat jelas di daerah-daerah yang diperintah secara tidak langsung. Di daerah semacam itu, VOC membiarkan struktur lama (tradisional) tetap berdiri. Melalui para elit tradisional

inilah kepentingan VOC disalurkan, antara lain dalam hal penarikan-penarikan wajib hasil produksi serta pajak-pajak yang dikenal dengan *sistem leverantie* dan *contingenten* (leveransi dan kontingensi).

C. Bubarnya VOC

Pada tahun 1749 terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan UU yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan demikian, anggota pengurus “Dewan Tujuh Belas” yang semula dipilih oleh parlemen dan provinsi pemegang saham (kecuali Provinsi Holland), kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan demikian VOC berada di bawah kekuasaan raja. Pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda.

Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan. Pengurus tidak lagi berpikir memajukan usaha perdagangannya, tetapi berpikir untuk memperkaya diri. VOC sebagai kongsi dagang swasta keuntungannya semakin merosot. Bahkan, tercatat pada tahun 1673 VOC tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC dan beban hutang pun tidak terelakkan.

Sistem upeti ini ternyata juga terjadi di kalangan para pejabat, dari pejabat di bawahnya kepada pejabat yang lebih tinggi. Hal ini semua terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh organisasi VOC. Semua bermuatan korupsi. Gubernur Jenderal Van Hoorn konon menumpuk harta sampai 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda pada tahun 1709, sementara gaji resminya hanya sekitar 700 gulden sebulan. Demikianlah para pejabat VOC terjangkit penyakit korupsi karena ingin kehormatan dan kemewahan sesaat. Beban utang VOC semakin berat, sehingga akhirnya VOC sendiri bangkrut.

Dalam kondisi bangkrut, VOC tidak dapat berbuat banyak. Menurut penilaian pemerintah keberadaan VOC sebagai kongsi

dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. VOC telah bangkrut, oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah. Pada waktu itu sebagai Gubernur Jendral VOC yang terakhir Van Overstraten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.

D. Simpulan

Sebagai negara bahari, Indonesia tidak hanya memiliki satu “laut utama” atau heart of sea tetapi paling tidak ada tiga laut utama yang membentuk Indonesia sebagai sea system yaitu laut Jawa, laut Flores dan laut Banda. Laut Jawa merupakan kawasan jantung perdagangan laut kepulauan Indonesia dan telah terintegrasi oleh jaringan pelayaran dan perdagangan sebelum datangnya bangsa Barat. Sementara itu, Houben, Maier, dan Molen (1992:viii) menyatakan bahwa laut Jawa bukan hanya merupakan laut utama bagi Indonesia, tetapi juga merupakan laut inti bagi kawasan Asia Tenggara. Sejarah perdagangan maritim di Indonesia dilukiskan bahwa di wilayah Indonesia sebelum datangnya para pedagang Portugis dan Belanda telah berlangsung perdagangan antar pulau. Barang-barang dagangan utama yang diperdagangkan dalam skala yang besar adalah beras dan lada, dan dengan menggunakan kapal-kapal pribumi yang cukup besar.

Datangnya banyak bangsa Barat di perairan Nusantara menyebabkan kawasan ini menjadi *battle field* di antara kekuatan-kekuatan yang bersaing. Tidak mengherankan jika periode ini selalu diwarnai dengan persaingan, konflik dan peperangan laut yang tak terhitung jumlahnya. Pada prinsipnya perang yang terjadi pada periode ini merupakan perang memperebutkan monopoli perdagangan.

Dalam hubungan itu akhirnya VOC memperoleh kemenangan yang gemilang di beberapa daerah di Nusantara termasuk

Malaka. Ada beberapa kunci kemenangan VOC antara lain: penerapan politik *divide at impera*, memecah belah dan menguasainya. Taktik ini memang tidak selalu disengaja, tetapi kadang-kadang hanya memanfaatkan dan memperbesar konflik yang telah ada sebelumnya. Dengan cara demikian, akhirnya VOC dapat menguasai titik-titik penting ekonomi Nusantara (Sulistiyono, 2009:1-33). Setelah perusahaan dagang ini bangkrut tahun 1799, segala asetnya diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda yang melanjutkan dan memperluas kolonisasi di kepulauan Indonesia hingga tahun 1942 ketika bala tentara Jepang mengusirnya dari Indonesia.

BAB VI

SISTEM SEWA TANAH DAN FEODAL JAWA (1811-1830)

Sejarah perkembangan Indonesia tidak dapat dilepaskan begitu saja tanpa melihat perkembangan politik yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat yang menyertainya. Sistem-sistem ekonomi yang ada dalam masa ini menjadi fondasi dasar perkembangan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Jawa pada waktu itu. Melalui sistem ekonomi yang diperkenalkan oleh Raffles yang memiliki visi revolusi Prancis telah memberikan pengaruh dalam hal paradigma yang lebih modern dan menghapus ideologi feodal yang telah mendarah daging dalam masyarakat Jawa dalam abad 19 dan sebelumnya (Ginting dan Sutono, 2011:52-57).

Berikut dibahas sejarah perkembangan sistem ekonomi yang dikembangkan Raffles pada masa awal abad ke-19 di Nusantara. Melalui sejarah yang panjang penguasaan wilayah di Indonesia oleh kolonial Belanda dan Inggris, faktor kehidupan politik dan sosial masyarakat Jawa mengalami pasang surut dan dinamika yang berarti.

A. Sistem Sewa Tanah (1811-1830)

Pada tahun 1811 Jawa diduduki oleh Inggris setelah kepergian Gubernur Jenderal Daendels dari Indonesia. Meski singkat pendudukan Inggris yang terjadi selama lebih kurang 5 tahun

yaitu antara tahun 1811-1816. Namun, dalam masa yang pendek tersebut telah diletakkan dasar-dasar kebijakan ekonomi yang sangat mempengaruhi sifat dan arah kebijaksanaan pemerintahan kolonial Belanda yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan dari pemerintahan kolonial Inggris.

Peletak dasar dari asas-asas pemerintahan sementara Inggris ditentukan oleh Gubernur Raffles yang memiliki banyak pengalaman Inggris di India. Raffles memiliki pandangan bahwa sistem ekonomi yang baik dikembangkan di Jawa adalah sistem ekonomi yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat kuat pada sistem rodi Kolonial Belanda dalam setiap kerja samanya dengan raja-raja dan bupati.

Azas pemerintahan sementara dari Raffles, sangat dipengaruhi oleh pengalaman Inggris di India. Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu dijalankan oleh VOC yang bekerjasama dengan raja-raja dan para bupati, dan menghapus segala penyerahan wajib dan pekerjaan rodi yang selalu dibebankan kepada rakyat, khususnya petani (Saleha, 2007:1-12). Raffles ingin menghapuskan segala bentuk penyerahan wajib dan pekerjaan rodi yang membebani rakyat, dan khususnya petani. Raffles ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha bagi kelompok petani. Berdasarkan hal itu pula, sesungguhnya semangat revolusi Prancis tengah dicoba jalankan di Indonesia yang mengedepankan sikap kebebasan, persamaan dan persaudaraan dan bukan penjajahan semata-mata. Ia melihat bahwa sistem feodal yang selama ini diterapkan telah mematikan kesempatan berusaha rakyat dan petani pada umumnya. Ia menganjurkan agar kekuasaan, khususnya hak kuasa atas tanah para bupati atas tanah rakyat dibatasi.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi para petani tersebut, Raffles menegakkan suatu kebijakan kolonial yang baru. Kebijakan Raffles mendasarkan pada 3 prinsip yaitu :

1. Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apapun juga.
2. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai penggantinya mereka dijadikan bagian yang integral dari pemerintahan kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan dinegara-negara Barat. Para bupati dan kepala – kepala pemerintahan tingkat rendah harus memusatkan perhatiannya pada proyek-proyek umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pemerintahan tidak langsung (desentralisasi) yang dilakukan oleh raja dan kepala tradisional digantikan dengan pemerintahan langsung (sentralisasi), sehingga sumber penghasilan mereka yang tradisional dihilangkan. Fungsi pemerintahan yang mereka lakukan sebelumnya dilakukan langsung oleh pegawai dari Eropa. Kemudian Raffles mengadakan asisten residen, untuk mendampingi dan mengawasi para bupati, dan pengawas pamongpraja yang mengawasi penghasilan yang diperoleh dari tanah (opzieners der landelijke inkomsten).
3. Berdasarkan anggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah, maka para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa. Untuk penyewaan tersebut para petani diwajibkan membayar sewa tanah atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Sewa

tanah inilah yang selanjutnya dijadikan dasar kebijaksanaan ekonomi pemerintahan Inggris di bawah Raffles dan kemudian dari pemerintahan Belanda sampai tahun 1830 (Sartono, dkk., 1977: 67)

Landelijk stetsel atau sewa tanah ini diharapkan akan memberikan kebebasan dan kepastian hukum bagi para petani dan merangsang mereka untuk menanam tanaman dagangan dan juga menjamin arus pendapatan negara yang mantap.

Konsekuensi atas kebijakan ini dapat dikatakan sangat revolusioner jika dilihat dari hubungan antara pemerintah kolonial dengan rakyat Indonesia dan dengan penguasa-penguasanya di lain pihak. Penghilangan unsur paksaan atas rakyat dan digantikan dengan suatu sistem dimana hubungan ekonomi antara pemerintah pada satu pihak dengan rakyat dipihak lain didasarkan atas kontrak yang diadakan secara sukarela oleh kedua belah pihak.

Perubahan ini pada akhirnya menjadi perubahan ekonomi dan juga sosial budaya yang menggantikan ikatan-ikatan adat tradisional dengan ikatan kontrak yang belum pernah dikenal sebelumnya. Dasar kehidupan masyarakat Jawa yang tradisional hendak digantikan dengan dasar kehidupan masyarakat seperti di Barat . Ekonomi masyarakat Jawa yang tradisional dan feodal hendak diganti dengan sistem ekonomi yang didasarkan atas lalu lintas pertukaran yang bebas.

Sistem sewa tanah dilaksanakan tidak diseluruh pulau Jawa. Daerah-daerah di sekitar Jakarta (Batavia) atau Parahyangan tidak melaksanakan sistem ini mengingat kepemilikan tanah yang kebanyakan dikuasai oleh swasta. Di Parahyangan, pemerintah kolonial keberatan untuk menghapus sistem tanam paksa kopi yang memberi keuntungan yang besar (Sartono, dkk., 1977:68). Karena keterbatasan waktu dan biaya serta

kecakapan pegawai-pegawai kolonial pada masa itu, sistem ini tidak dapat dilakukan secara sempurna. Namun, begitu pandangan-pandangan kebijakan ini sangat mempengaruhi penerus Raffles, bahkan pada kelompok orang-orang Belanda sekali pun.

Kebijakan Raffles diteruskan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang baru yaitu Komisaris Jenderal Elout, Buyskes dan Van de Capellen (1816-1819) dan kemudian di bawah Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819-1826) dan Komisaris Jenderal du Bus de Gisignies (1826-1930). Namun pada masa Gubernur Jenderal Van den Bosch tahun 1830 sistem sewa tanah dihapuskan dan dihidupkannya kembali unsur-unsur paksaan dalam penanaman tanaman dagang dan bentuk yang lebih keras dan efisien oleh VOC.

Lebih jauh penyelenggaraan sistem sewa tanah didasarkan pada 3 buah aspek sistem, yaitu :

1. Penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan atas dasar sistem pemerintahn yang maju dan modern.
2. Pelaksanaan pemungutan sewa tanah
3. Penanaman tanaman dagangan untuk keperluan ekspor.

Menurut pandangan Raffles, penyelenggaraan sistem pemerintahan yang modern adalah pergantian pemerintahan-pemerintahan yang tidak langsung , dimana dahulu diselenggarakan melalui raja-raja dan kepala tradisional dengan suatu pemerintahan yang langsung. Kekuasaan raja-raja tradisional dan kepala-kepala tradisional sangat dikurangi dan bahkan sumber-sumber penghasilan mereka yang tradisional dihilangkan. Fungsi-fungsi pemerintah yang mereka lakukan sampai waktu itu, kemudian dilakukan oleh pegawai-pegawai Eropa yang jumlahnya bertambah banyak kemudian diadakan fungsi-fungsi asisten-residen oleh Raffles yang bertugas untuk

mendampingi dan mengawasi para bupati. Pengawas penghasilan yang diperoleh dari tanah kemudian disebut pengawas pamong praja (Sartono, dkk., 1977: 69).

Pengaruh para bupati pribumi semakin berkurang dari waktu ke waktu. Ide tentang penghapusan jabatan-jabatan bupati juga sangat meresahkan mengingat pada masa sebelum kekuasaan Raffles bupati memiliki gengsi dan kelas sosial yang sangat tinggi.

Pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu memanfaatkan mereka sebagai bagian dari sistem penarikan pajak dan penyerahan hasil-hasil pertanian maupun pekerjaan . Atas jasa-jasa yang diberikan tersebut maka mereka mendapatkan tanah-tanah sebagai imbalan. Bukan saja tanah yang diperoleh tetapi menurut kebiasaan adat mereka dapat pula menuntut penyerahan wajib hasil-hasil pertanian dan pekerjaan dari penduduk yang tinggal di atas tanah itu. Di bawah Raffles kebiasaan ini dihapus dan para bupati kemudian mulai diberikan gaji dalam bentuk uang sebagai penghargaan atas kerja dan jasa mereka. Melalui Raffles pula maka putuslah hubungan antara para bupati dan tanah, hilang pula kewajiban rakyat untuk melakukan penyerahan wajib dan pekerjaan rodi untuk para bupati.

B. Pajak Tanah

Tradisi kewajiban pajak telah lama dimulai pada masa kolonial belanda sebelum Raffles berkuasa. Pajak yang diberikan rakyat pada masa kolonial Belanda adalah berupa pajak beras yang ditetapkan secara kolektif untuk seluruh desa. Kepala Desa oleh Pemerintah Kolonial Belanda diberikan kebebasan untuk menentukan besaran jumlah yang harus dibayar oleh masing-

masing petani yang sangat rawan penyimpangan dan kesewenang-wenangan.

Atas dasar hal tersebut, Raffles menentanginya dengan memberikan suatu kepatian hukum yang membrikan pertimbangan penetapan pajak secara perorangan dengan propsorsional. Peraturan mengenai penetapan pajak berupa pajak tanah yang harus dibayar oleh perorangan dan bukan lagi oleh desa sebagai keseluruhan yang dikeluarkan pada tahun 1814.

Pelaksanaan aturan ini ditingkat lapangan menemui beberapa hambatan. Tidak adanya bahan keterangan yang akurat untuk penetapan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh orang perorang menjadi salah satu faktor penting. Salah tafsir terhadap penetapan jumlah pajak malahan memberikan beban yang lebih berat bagi rakyat dan justru tidak memperingan seperti apa yang dicita-citakan oleh Raffles

Pada masa kekuasaan setelah tahun 1816 , kebijakan ini tidak lagi diterapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda yang kembali berkuasa. Asas penetapan pajak dikembalikan kepada kewajiban kolektif desa.

C. Penanaman Tanaman Perdagangan

Kegiatan promosi penaman tanaman-tanaman perdagangan untuk ekspor digalakkan oleh Raffles sebagai bagian dari sistem sewa tanah ini. Tanaman yang dicoba promosikan meliputi tanaman kopi, gula, tebu tidak memberikan hasil yang baik . Hal ini disebabkan karena kurangnya pengalaman petani dalam menjual tanaman-tanaman mereka dipasaran bebas, sehingga penjualan diserahkan kepada kepala-kepala desa mereka yang sering disertai dengan penipuan baik kepada si petani maupun

pembeli. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pemerintah kolonial terpaksa campur tangan lagi dengan mengadakan lagi penanaman paksa bagi tanaman-tanaman perdagangan.

Meskipun Raffles berada di pulau Jawa hanya selama lima tahun, tetapi kebijakannya mempengaruhi pandangan pejabat pemerintah Belanda selanjutnya. Oleh karena itu, sistem sewa tanah ini terus dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda Gubernur Jendral Van der Capellen (1816-1826), kemudian Komisaris Jendral du Bus de Gisignies (1826-1830). Tetapi sistem ini dihentikan ketika pemerintahan colonial Belanda Van den Bosch, yang memerintah sejak tahun 1830 karena dianggap kurang menguntungkan bagi Belanda sehingga mereka mengembalikan kembali ke sistem tanam paksa.

D. Permasalahan Pelaksanaan Sistem Sewa Tanah

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut sebagai berikut.

1. Penanaman kopi pada awal abad ke-19 merupakan tanaman perdagangan terpenting di pulau Jawa, tetapi di bawah sistem sewa tanah, terjadi kemunduran yang berarti. Salah satu sebab dari kegagalan ini adalah kurangnya pengalaman petani dalam menjual tanaman mereka di pasaran bebas sehingga mereka sering menyerahkannya kepada kepala desa. Hal ini mengakibatkan para kepala desa tersebut sering menipu petani atau pembelinya. Pada masa ini, walaupun kekuasaan kepala desa telah dihapuskan, tetapi pada kenyataannya kebiasaan tradisional mereka untuk menghormati dan bekerja kepada kepala desa masih tetap ada

2. Kegagalan pada pemungutan sewa tanah. Pada masa sebelumnya, pajak yang diberikan kepada VOC adalah berupa beras, yang ditetapkan secara kolektif untuk seluruh desa. Para kepala desa diberikan kebijakan penuh untuk menentukan jumlah pungutan wajib yang harus dibayarkan petani, sehingga para kepala desa sering bertindak sewenangwenang dalam pungutan wajib ini. Tetapi pemungutan sewa tanah dalam sistem sewa tanah yang dilakukan per-orangan pun mengalami kesulitan, karena tidak tersedianya keterangan yang jelas akan dan dapat dipercaya untuk penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh tiap kepala. Oleh karena itu, di luar dugaan pungutan sewa tanah ini malah memberatkan rakyat.

BAB VII

TANAM PAKSA (CULTUUR-STELSEL): EKSPLOITASI EKONOMI KOLONIAL

A. Raffles Berkuasa di Hindia Belanda

Pada akhir abad ke-18 di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan wilayah Hindia Belanda pada tahun 1816. Belanda berjaya menumpas pemberontakan di Jawa dalam perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Selepas tahun 1830, sistem tanam paksa yang dikenali sebagai *cultuurstelsel* dalam bahasa Belanda mulai diamalkan (Bachri dalam Hermawati, 2013:64-70). Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dan sebagainya. Hasil-hasil tanaman itu kemudian diekspor ke luar negara.

Pada tahun 1901, Belanda mengamalkan apa yang disebut sebagai Politik etis (bahasa Belanda: *Ethische Politiek*). Belanda melaksanakan sistem merkantilisme, yakni memungut biaya yang tinggi terhadap barang-barang yang masuk, dan memungut pajak yang tinggi pula bagi barang-barang buatan negeri induk yang akan dipasarkan di daerah koloni (Cahyono, 1988:60). Termasuk di dalamnya adalah perbelanjaan yang lebih besar untuk mendidik orang-orang pribumi serta sedikit perubahan politik. Di bawah Gabenor Jeneral J.B. van Heutsz, pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang tempoh penjajahan mereka secara langsung di seluruh Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan asas untuk negara Indonesia pada saat ini (Zulkarnain, 2016:1-23).

Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda antara tahun 1830 sampai pertengahan abad ke-19 mereka menamakannya dengan *cultuurstelsel*. Dalam historiografi Indonesia yang tradisional istilah itu diganti menjadi “Tanam Paksa” yang menonjolkan aspek normatif dari sistem tersebut yakni kesengsaraan dan penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh penerapan sistem tersebut. Istilah yang dipergunakan oleh Belanda tersebut selain terbatas pada aspek ekonominya, sehingga makna padanan kata *cultuurstelsel* tersebut dalam bahasa Indonesia sesungguhnya adalah “sistem pembudidayaan”, atau juga dapat disebut budidaya tanam. Namun demikian praktek di lapangan terutama dari segi pengelolaannya dapatlah diamati bahwa aspek politik kolonial sangat menonjol. Usaha produksi sesungguhnya dilaksanakan oleh rakyat atau petani dengan pengawasan para penguasa daerah dari tingkat bupati sampai ke tingkat desa. Pada waktu itu hubungan politik antara Belanda dan Mataram yang telah menjadi saling tergantung sejak tahun 1755, dan terutama pasca Perang Diponegoro di mana Belanda membantu pihak keraton, merupakan format politik yang mendorong dan memunculkan terselenggaranya sistem tanam paksa.

Pada saat Thomas Stanford Raffles berkuasa di Hindia Belanda, Belanda sedang mengalami kesulitan ekonomi yang lebih banyak diakibatkan oleh Perang Napoleon dan isolasi ekonomi yang disebabkan Stelsel Kontinental. Oleh sebab itu, Belanda kehilangan sebagian besar perdagangannya dan pelayarannya. Peranannya sebagai pasar penimbun barang mundur dan dunia perdagangan melahirkan pusat-pusat perdagangan baru. Pedagang-pedagang Belanda tidak dapat bersaing dengan pedagangpedagang Inggris karena para pedagang Inggris dapat memasarkan kain-kain Lanchashire dengan harga yang relatif murah. Untuk mengatasi kondisi tersebut Belanda melaksanakan sistem merkantilisme yakni memungut biaya yang tinggi terhadap barang-barang yang masuk, dan memungut pajak yang tinggi pula bagi barang-barang buatan negeri induik yang akan dipasarkan di daerah koloni serta memonovoli perdagangan pemerintah.

Dalam kondisi yang demikian, di Parlemen Belanda terjadi perbedaan pandangan antara golongan konservatif dengan golongan liberal. Golongan konservatif menganggap bahwa eksploitasi yang dijalankan di tanah koloni sudah sesuai dengan tuntutan situasi, sementara sistem eksploitasi yang dikonsepkan oleh golongan liberal belum sepenuhnya meyakinkan pemerintah.

Dalam situasi perbedaan pandangan ini, golongan liberal terpecah menjadi dua, yakni golongan liberal yang masih mempertahankan prinsip-prinsip liberal seperti kebebasan berusaha dan campur tangan yang minimal dari pihak pemerintah dalam urusan-urusan perseorangan. Di lain sisi, terdapat sekelompok dari golongan liberal yang menekankan pada prinsip-prinsip humaniter dan menginterpretasikan prinsip liberal sebagai prinsip memberi keadilan dan perlindungan bagi semua kepentingan. Dalam menghadapi golongan liberal yang terpecah tersebut, golongan konservatif dapat meyakinkan pemerintah bahwa sistem kumpeni terbukti dapat dilaksanakan dan lebih efektif, sementara sistem liberal tidak dapat dilaksanakan di negeri jajaha karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi lokal.

B. Ketentuan Tanam Paksa

Tanam paksa atau *cultuur stelsel* adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak (Daryanti, 1991:34). Dalam praktiknya, peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh

wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda.

Wilayah yang digunakan untuk *cultur stelstel* pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940 (Daryanti, 1991:56).

Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar *Graaf* oleh raja Belanda pada 25 Desember 1839. *Culturstelsel* di Jawa dimulai pada tahun 1836 atas inisiatif seseorang yang berpengalaman dalam urusan tersebut, yaitu Van Den Bosch yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola perkebunan di wilayah kekuasaan Belanda di Kepulauan Karibia. Tujuan Van Den Bosch yang dijadikan Gubernur Jenderal adalah “mentransformasikan pulau Jawa menjadi eksportir besar-besaran dari produk-produk agraria, dengan keuntungan dari penjualannya terutama mengalir ke keuangan Belanda (Kartodirjo dan Suryo, 1991:12).

Tujuan Van Den Bosch dengan sistem *cultuurstelsel* di Jawa adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang menjadi permintaan di pasaran dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut Bosch menganjurkan pembudidayaan berbagai produk seperti kopi, gula, indigo (nila), tembakau, teh, lada, kayumanis, jarak, dan lain sebagainya. Persamaan dari semua produk itu adalah bahwa petani dipaksakan oleh pemerintah kolonial untuk memproduksinya dan sebab itu tidak dilakukan secara voluter

(Furnivall, 2009:48). Sedangkan ketentuan-ketentuan pokok dari sistem tanam paksa sebagaimana tercantum dalam Staatsblad tahun 1834 no.22. yang isinya sebagai berikut.

1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk hal mana mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa.
2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak diperbolehkan melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
4. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, jika nilai-nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat (Susanto, 2007:67). Apabila terjadi gagal panen pada tanaman dagang harus dibebankan kepada pemerintah, hal tersebut berlaku apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh kekurangrajinan atau ketekunan pada pihak rakyat.

Dalam mengerjakan tanah-tanah untuk penanaman tanaman dagang, penduduk desa diawasi oleh para pemimpin desa mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya akan membatasi diri pada pengawasan apakah pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Jika diamati dari segi isi staatsblad tersebut, maka Sistem Tanam Paksa tidak begitu memberatkan pada penduduk. Dampaknya cukup destruktif menjadikan rakyat miskin dan tidak teratur hidupnya. Fenomena ini diakibatkan oleh adanya penyimpangan

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam staatsblad yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Penduduk lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman berkualitas ekspor, sehingga tidak dapat mengerjakan sawahnya dengan baik, bahkan dalam suatu waktu tidak dapat mengerjakan sawahnya sama sekali.

C. Pelaksanaan Tanam Paksa

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro, 1825-1830), dan Perang Padri di Sumatera Barat (1821-1837), Gubernur Jenderal Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan. Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan (Bloembergen, 2011:225). Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor ke Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksa untuk menggunakan sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah. Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa (Thomas, 2000:80).

Pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang serba gratis. Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di pasar dunia sedang

membubung, dibudidayakan. 1884 sekitar 75.5 % penduduk Jawa dikerahkan dalam cultuurstelsel atau tanam paksa. Penduduk di Karesidenan Batavia dan daerah kesultanan di Jawa Tengah atau Vortsenlanden tidak mengambil bagian dalam sistem tersebut. Jumlah tersebut kemudian berfluktuasi tetapi tidak turun secara drastis karena pemerintah Hindia Belanda berusaha mempertahankan eksistensi tanah untuk tanaman komoditi ekspor. Kemudian pada tahun 1850, umpamanya jumlah tersebut telah menurun menjadi 46 %, tetapi ditahun 1860 naik lagi menjadi 54.5%. Kendatipun demografi belum muncul pada masa ini, dan data kependudukan yang diperoleh dari laporan-laporan para pejabat Belanda sering simpang siur, namun dapat dikatakan bahwa sistem cultuurstelsel ini jelas-jelas telah mengakibatkan dampak yang destruktif bagi penduduk Jawa. Luas tanah garapan yang digunakan untuk sistem itu menurut perhitungan, pada tahun 1840 hanya 6 % saja. Pada tahun 1850 menurun menjadi 4 %, dan pada tahun 1860 naik lagi sedikit menjadi 4.5 %. Jenis tanah yang dibutuhkan juga berbeda-beda untuk masing-masing tanaman. Tebu (untuk gula) memerlukan tanah persawahan yang baik, karena tebu membutuhkan irigasi yang lancar. Tetapi kopi justru memerlukan tanah yang agak tandus (woeste gronden). Dalam waktu sepuluh tahun (1830-1840) semua karesidenan (18 buah) di Jawa telah terserap dalam sistem ini (kecuali karesidenan Batavia). Kopi diusahakan mulai dari Banten hingga karesidenan Basuki. Kopi diusahakan mulai dari Banten hingga karesidenan Basuki di Jawa Timur (Hermawati, 2013:64-70).

Tetapi produksi kopi terbesar berasal dari karesidenan 8 karesidenan Priangan (Jawa Barat), Kedu (Jawa Tengah), Pasuruan dan Basuki (Jawa Timur). Dalam jangka waktu yang sama gula telah berhasil diusahakan di 13 karesidenan. Pusatnya terutama di Jawa Timur, yaitu karesidenan-karesidenan Surabaya, Pasuruan, dan Basuki (dalam tahun 1840 produksi dari wilayah ini mencapai hampir 65%). Selain itu terdapat gula pula di karesidenan-karesidenan Japara, Semarang, Pekalongan, dan Tegal (Jawa Tengah) dan Cirebon (Jawa Barat).

Dalam jangka waktu yang sama pula Indigo berhasil diusahakan di 11 karesidenan, Tetapi produksi utama berasal dari dua karesidenan di Jawa Tengah, yaitu Bagelan dan Banyumas, yang menghasilkan 51%. Juga di Cirebon dan Pekalongan ada diusahakan sedikit indigo.

Tembakau yang diusahakan melalui Cultuurstelsel dilakukan di Karesidenan Rembang dan sekitar Pacitan (Jawa Tengah). Sedangkan kayu manis diselenggarakan di Karawang (Jawa Barat). Dalam penyelenggaraan cultuurstelsel pihak Belanda berusaha agar sedapat mungkin tidak berhubungan langsung dengan petani. Sebab itu penyelenggaraannya diserahkan kepada para bupati dengan para kepala desa, dan masyarakat desa sendiri. Kepentingan pemerintahnya pada hasilnya, yang dihitung dalam pikol (+62 kg) yang diterima oleh gudang-gudang pemerintah. Selain itu penyelenggaraannya juga bervariasi dari satu tempat ketempat lain karena pemerintah pusat lebih banyak menyerahkan penguasaannya kepada para pejabat Belanda setempat (para kontrolir) yang mempunyai motivasi untuk meningkatkan produksi karena mereka memperoleh "cultuurprocent" prosentase tertentu dari hasil panen. Untuk itu sampai tahun 1860 dikerahkan tidak kurang 90 orang kontrolir dan sekitar orang pengawas berkebangsaan Belanda. Mobilisasi penduduk dilakukan sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam tatanan politik Mataram, yaitu apa yang oleh Belanda dinamakan "heerendiensten Yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan bayaran (Hermawati, 2013:64-70).

Hak ini kemudian beralih pada Belanda yang sejak Perang Diponegoro dianggap sebagai penguasa, kecuali di Vortsenlanden. Beberapa jumlah penduduk yang harus dikerahkan disetiap desa itu diserahkan sepenuhnya pada para bupati. Tetapi sesuai kebiasaan pula, hanya mereka yang memiliki hak atas penggarapan tanah (sikep) yang wajib memenuhi panggilan bupati tersebut. Ini pula sebabnya selama dilaksanakannya cultuurstelsel, diadakan pembagian tanah bagi

penduduk yang tidak memiliki (numpang), sehingga kemudian muncul sikep-sikep baru yang wajib melaksanakannya “heerendiensten” pula. Tugas petani bukan sekedar menanam, tetapi juga memproses hasil panennya untuk diserahkan di gudang-gudang pemerintah. Terutama produksi kopi seluruhnya dalam tangan petani, dalam hal gula muncul pula pabrik-pabrik gula yang dikelola secara modern dengan modal asing. Penduduk mendapat bayaran untuk hasil kerjanya. Maksud semula Van den Bosch adalah agar upah disesuaikan dengan fluktuasi harga pasar, namun hal ini dianggap tidak praktis. Mungkin karena para petani belum memahami kaitan pekerjaan mereka dengan mekanisme pasar jumlah upah disesuaikan dengan jumlah pajak tanah (land rent) yang harus dibayar petani. Tetapi sejak semula Van den Bosch menginginkan agar upah yang diterima petani harus memungkinkan mereka “menikmatinya” dan itu berarti harus lebih banyak dari hasil pesawahan.

Tetapi kemudian ternyata berbagai faktor lain turut menentukan tinggi rendahnya upah petani. Masalah kesuburan tanah (sawah untuk tebu) tentu diperkirakan lebih tinggi pembayaran pajak tanahnya dibandingkan dengan tanah gersang untuk kopi. Masalah iklim, teknologi yang digunakan, dan lain sebagainya, turut menentukan tinggi rendahnya upah. Dengan demikian upah bervariasi, bukan saja untuk masing-masing komoditi tetapi juga dari karesidenan-karesidenan. Contoh yang nyata mengenai masalah upah ini diambil dari dua komoditi yang berbeda, yaitu gula dan indigo (nila).

Dengan demikian salah satu dampak dari cultuurstelsel adalah masuknya ekonomi uang di pedesaan. Penduduk membayar pajak tanah (land rent) yang diintroduksi oleh Raffles dengan uang. Kenyataan ini saja sudah menunjuk adalah perubahan dalam kehidupan pedesaan. Suatu masalah yang penting pula adalah apa yang dinamakan “cultuur procent” yaitu jumlah persentase yang diterima para pejabat Belanda maupun sesuai dengan produksi yang diserahkan pada gudang-gudang pemerintah (Aiko:1993:126).

Jumlah itu tidak jarang jauh lebih besar dari gaji yang diterima. Van den Bosch sengaja menambah hal ini untuk mendorong para pejabat tersebut bekerja keras. Lagi pula cara itu juga sudah dipakai dalam Preangerstelsel. Dengan demikian, cara ini sesungguhnya bukan ciptaan Van den Bosch. "Cultuur procenten" ternyata membawa dampak yang kurang baik dalam korps kepegawaian Belanda karena menimbulkan perbedaan pendapatan yang mencolok antara mereka yang terlibat dengan cultuurstelsel dan yang tidak dan antara mereka yang bekerja di daerah "kurus". Ketidakpuasan pada pihak pejabat Belanda nampak dari permintaan untuk di pindahkan ke daerah lain. Penyimpangan pelaksanaan Sistem Tanam Paksa tersebut lebih banyak diakibatkan oleh adanya cultuur-procenten sehingga para pengawas tanam paksa yang menyetorkan tanaman wajib akan mendapatkan imbalan.

Dampaknya, semua pengawas berusaha menyetorkan hasil produksi sebanyak-banyaknya dengan memeras rakyat. Akhirnya yang menjadi sapi perahan adalah rakyat yang tidak memiliki otoritas dalam menetapkan hasil panen tanamannya. Ditambah lagi dengan sikap-sikap para kepala desa yang lebih sering menjadi kaki tangan pemerintah kolonial, sehingga kebijakannya seenaknya dalam menetapkan luas lahan penduduk yang akan digunakan untuk areal penanaman wajib, berapa penduduk yang harus bekerja sebagai buruh, termasuk menetapkan berapa hasil produksi yang harus dibayar oleh penduduk.

Ketimpangan yang diwujudkan oleh pelaksanaan politik tanam paksa ini mulai mendapat perhatian di Belanda, dimana hal ini berhubungan dengan kemunculan gerakan liberal di negeri induk tersebut. Secara umum mereka dapat digolongkan ke dalam dua kategori yaitu golongan humanis dan golongan kapitalis. Golongan humanis mengatakan bahwa Sistem Tanam Paksa harus segera dihapuskan karena telah banyak menindas dan menyengsarakan penduduk di tanah jajahan. Dalam terminologinya, padahal tanah jajahan telah memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menyelamatkan negara dari

kebangkrutan. Dengan demikian, perlu diupayakan perbaikan-perbaikan nasib rakyat tanah jajahan. Sementara golongan kapitalis beranggapan bahwa Sistem Tanam Paksa tidak menciptakan kehidupan ekonomi yang sehat. Sistem Tanam Paksa memperlakukan rakyat tanah jajahan sebagai objek bukannya melibatkannya dalam kegiatan ekonomi yang menambah ruwetnya sistem perekonomian Hindia Belanda.

Dalam rangka mengikat para penguasa lokal ini, pemerintah Belanda tidak hanya mengembalikan kekuasaan mereka saja, melainkan juga meningkatkan prestise mereka dengan gaji berupa tanah yang akan memberi mereka tenaga kerja dan penghasilan lain yang dihasilkannya. Di samping itu, Van Den Bosch menerapkan sistem prosentase yakni hadiah bagi petugas yang berhasil menyerahkan hasil tanaman yang melebihi dari yang ditentukan. Namun, yang menjadi permasalahan lanjut adalah bahwa kebijakan tersebut menjadi sumber dan ladang korupsi serta penyelewengan-penyelewengan yang merugikan rakyat. Sistem prosentase dianggap sebagai legalisasi pemerintah kolonial terhadap segala bentuk pemerasan seperti luas tanah yang diusahakan pemerintah tidak terbatas, wajib kerja penduduk melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, tanaman wajib, pajak-pajak, dan kerja wajib. tidak dihapus. Sementara hasil dari kebijakan *cultuur stelsel* sangat memuaskan dan menguntungkan pemerintah Belanda (Kartodirdjo, 1990: 15).

Pada tahun 1848, Sistem Tanam Paksa mendapat kritikan melalui perdebatan di Parlemen Belanda. Perdebatan terjadi antara golongan liberal dengan golongan konservatif, seputar evaluasi penerapan sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Kaum liberal berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila masalah-masalah perekonomian diserahkan kepada pihak swasta. Dengan demikian, pemerintah kolonial hanya memungut pajak dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam urusan perdagangan hasil bumi di tanah jajahan. Berbeda dengan kaum liberal, kaum konservatif tetap

berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila urusan ekonomi ditangani langsung oleh pemerintah.

Pemerintah harus campur tangan dalam pemungutan hasil bumi di tanah jajahan. Bagi kaum konservatif, Hindia Belanda dianggap belum siap untuk menerima kebijakan politik liberal. Dari perdebatan kedua golongan tersebut, golongan liberal menang dan dapat meluruskan sistem pemerintahan di tanah koloni. Dua orang sebagai pembela nasib penduduk koloni adalah Douwes Dekker dan Baron Van Hoeffell. Dalam mkaryanya yang berjudul "Max Havelar", Douwes Dekker membentangkan kekejaman sisten tanam paksa. Sementara Fransen Van Der Putte juga menulis Zuker Contracten, yang juga banyak mengkritik ketidakadilan dalam sistem tanam paksa.

Berkat kecaman dan kegigihan kaum liberal tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda menghapuskan sistem tanam paksa, melainkan tidak sekaligus melainkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Proses penghapusan sistem tanam paksa secara bertahap yakni: pertama kali penghapusan sistem tanam paksa lada pada tahun 1860. Penghapusan tanam paksa untuk eh dan nila pada tahun 1865, dan pada tahun 1870 hampir semua jenis tanaman paksa sudah dihapuskan, kecuali tanaman paksa kopi di priangan (Zulkarnain, 2016:1-23).

Sistem ini justru malah membuat rakyat semakin menderita. Akan tetapi pada tahun 1870 dengan kemenangan partai liberal menjadikan rakyat Hindia Belanda juga terkena imbasnya. Kebijakan tanam paksa akhirnya diganti dengan kebijakan Liberal.

D. Dampak Penerapan Sistem Tanam Paksa

Setelah memahami kajian mengenai pelaksanaan sistem Tanam Paksa, gambaran yang diperoleh mengenai perekonomian Jawa bahwa sistem ekonomi modern atas sistem ekonomi uang dan komoditas ekspor telah mengeksploitasi habis-habisan sistem ekonomi subsistensi yang menjadi basis perekonomian kaum

petani. Eksploitasi ekonomi modern melalui penerapan Tanam paksa merupakan eksploitasi yang bersifat brutal dan mengakibatkan para petani Jawa menderita kemiskinan dan kelaparan berkepanjangan. Teori *involusi pertanian* karya Clifford Geertz menjelaskan proses kemiskinan struktural di Jawa disebabkan oleh penambahan penduduk Jawa, berkurangnya lahan pertanian, dan perluasan perkebunan Eropa menjadi penyebab utama kemiskinan di Jawa (Geertz dalam Zulkarnain, 2011:65-81).

Bila peneliti sejarah ingin mengkaji proses penemuan tanam paksa secara objektif, detil, dan mendalam ada baiknya menggunakan tiga sudut pandang/tiga tahapan, yaitu: tahap pertama, sejak tahun 1850-an dan 1860-an/tahap akhir penerapan tanam paksa, berlanjut sampai permulaan 1920-an; tahap kedua, dari penulisan tanam paksa terhitung dari tahun 1920-an sampai akhir kekuasaan kolonial Belanda; dan tahap ketiga, dimulai setelah kemerdekaan Indonesia sampai sekarang.

Sebelum sistem tanam paksa diperkenalkan pada tahun 1830, orang-orang Eropa telah melakukan langkah simpatik dengan cara meninggalkan sistem penyerahan hasil bumi dan pengeluaran ongkos secara paksa yang merupakan ciri khas dari sistem VOC.

Adapun para produsen potensial dari komoditi pertanian yang dapat di ekspor, pada tahun-tahun 1830 sebagai berikut.

1. Para penduduk desa di pulau Jawa yang menguasai tanah-tanah dibebani pajak sewa tanah.
2. Para pengusaha perkebunan swasta, terutama orang-orang Eropa
3. Para pemilik tanah partikelir, terutama orang-orang Eropa yang memiliki hak-hak tuan tanah atas tanah-tanah mereka berikut hak atas tanah-tanah itu.

Para kontraktor pemerintah bukan saja menerima modal yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas-fasilitasnya, tetapi juga mendapat bantuan pemerintah untuk memperoleh batang tebu

mentah (raw cane) dan tenaga kerja yang diperlukan. Kontraktor berkewajiban menjual gula yang telah diolah itu kepada pemerintah untuk membayar kembali pinjamannya, tetapi kelebihan jumlah gula yang diperlukan untuk pembayaran pinjaman, boleh dijual tersendiri oleh kontraktor demi keuntungannya sendiri. Di sini terdapat peluang untuk menghasilkan uang, dalam jangka waktu beberapa tahun, nilai penjualan-kembali kontrak-kontrak gula ini meningkat pesat.

Sistem Tanam Paksa melalui suntikan modal dari pemerintah dan penanaman produk yang berorientasi ekspor berimplikasi positif, yakni mulai munculnya kepercayaan dari para petani bahwa mereka dapat berkembang, bekerja lebih efisien dan memperoleh keuntungan cukup besar seandainya pemerintah tidak ikut campur dalam sistem tanam paksa. Kepercayaan diri para petani inilah yang mendorong untuk berjuang dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, sekaligus sebagai awal mula munculnya pengusaha pengusaha lokal di wilayah pedesaan. Mereka juga sudah memahami tentang manajemen permodalan dalam dunia perdagangan dan berani melepaskan diri dari cengkeraman pemerintahan tradisional, dari pemimpin desa sampai ke pemimpin di atasnya secara hierarkis.

Pelaksanaan sistem Tanam Paksa dalam praktiknya mengikuti pola tradisional yang berlaku dalam masyarakat Jawa sehingga dapat menggerakkan para petani di daerah-daerah tertentu agar mau bekerja untuk menghasilkan tanaman ekspor. Harapan pemerintah adalah dengan menggunakan otoritas kepala desa, dapat menggerakkan penduduk agar rela menyerahkan sebagian tanah untuk kepentingan tanam paksa, dan mau bekerja. Sikap ini juga dimaksudkan untuk mengkondisikan masyarakat Jawa tetap statis. Pada kenyataannya, hal tersebut tidak terjadi karena sistem tersebut justru berdampak secara ekonomis turut menggerakkan perubahan dan percepatan kecenderungan yang sudah ada.

Pola-pola tradisional kalangan atas di tingkat desa sudah kocak-kacir pada permulaan abad ke-19 sehingga sistem Tanam Paksa hanya dapat menggunakan pola yang tidak rasional dan alamiah.

Tokoh-tokoh penguasa mengalami tekanan-tekanan yang sernakin berat karena tuntutan sistem tersebut.

Sistem Tanam Paksa dianggap telah mengubah hak-hak pemilikan tanah dari milik perseorangan menjadi milik bersama, yang tentunya telah merusak hak-hak perseorangan atas tanah yang sebelumnya sudah ada. Hak-hak pemilikan tanah merupakan kepentingan subjektif bagi kelompok pengusaha swasta yang hendak mengganti sistem tersebut dengan sistem eksploitasi versi mereka sendiri.

BAB VIII

RANGKUMAN PERIODE SEJARAH EKONOMI INDONESIA

A. Masa Sebelum Kemerdekaan

Daya tarik Indonesia akan sumber daya alam dan rempah-rempah membuat bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong datang untuk menguasai Indonesia. Sebelum merdeka setidaknya ada 4 negara yang pernah menjajah Indonesia, diantaranya adalah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.

Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia tidak banyak mengalami perubahan dikarenakan waktu Portugis menjajah tidaklah lama disebabkan kealahannya oleh Belanda untuk menguasai Indonesia, sehingga belum banyak yang dapat diberlakukan kebijakan.

Dalam masa penjajahan Belanda selama 350 tahun Belanda melakukan berbagai perubahan kebijakan dalam hal ekonomi, salah satunya dengan dibentuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan tujuan menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris.

Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :

- a. Hak mencetak uang
- b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
- c. Hak menyatakan perang dan damai
- d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
- e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja

Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.

Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.

Namun pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :

- a. Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar
- b. Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar
- c. Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
- d. Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit

Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch dengan tujuan memproduksi berbagai komoditi yang diminta di pasar dunia. Sistem tersebut sangat menguntungkan Belanda namun semakin menyiksa pribumi. Sistem ini merupakan pengganti sistem *landrent* dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. *Cultuurstelstel* melibatkan para bangsawan dalam pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram—yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan—dan memotivasi para pejabat Belanda dengan *cultuurprocenten* (imbalan yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).

Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu *cultuurstelstel* amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka

mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup

Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal) terjadi karena adanya desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi kearah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agrarian yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang tidak diperlakukan layak.

Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.

Pemerintah militer Jepang menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatnya terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama.

B. Pada Masa Orde Lama

Sejak berdirinya Negara Indonesia, sudah banyak tokoh yang telah merumuskan untuk perekonomian yang tepat bagi

Indonesia. Sudah 70 tahun Indonesia merdeka tetapi kondisi perekonomian Indonesia tidak juga membaik. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih saja tinggi serta pendapatan perkapita masih saja rendah. Indonesia mencoba untuk memulai membangun pemerintahan sendiri pada awal kemerdekaan, tetapi sulit karena di penuh masalah-masalah yang timbul. Pada awal kemerdekaan itu pula Indonesia di landa gejala politik yang membawa pengaruh pada perekonomian Negara.

1. Masa Pasca Kemerdekaan (1945 – 1950)

Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan luar negeri. Pada masa orde ini perekonomian Indonesia sangat buruk yang di sebabkan oleh:

- a. Infalasi yang sangat tinggi, Inflasi yang sangat tinggi ini di sebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang yang tidak terkendali yang mana pada waktu itu pemerintah Republik Indonesia hanya memberlakukan tiga mata uang di wilayah Indonesia, yaitu mata uang Javasche Bank, mata uang Pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang Pendudukan Jepang.
- b. Adanya Blokade oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
- c. Kas Negara Kosong.
- d. Eksploitasi besar-besaran pada masa penjajahan.

Usaha-usaha yang di lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi pada masa orde ini adalah:

- a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman denganpersetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

- b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
- c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
- d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
- e. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat: sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

2. Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959)

Kondisi Ekonomi Indonesia pada masa liberal masih sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- a. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Bangsa Indonesia menanggung beban keuangan dan ekonomi, seperti yang telah ditetapkan dalam hasil KMB. Beban tersebut berupa utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah.
- b. Politik Keuangan Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang di Belanda.
- c. Pemerintah Belanda tidak mewarisi ahli-ahli yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.

- d. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan sangat meningkat.
- e. Defisit yang harus ditanggung pemerintah RI pada waktu itu sebesar Rp. 5,1 miliar.
- f. Ekspor Indonesia hanya bergantung pada hasil perkebunan.
- g. Angka pertumbuhan jumlah penduduk besar.

Usaha-usaha yang di lakukan untuk mengatasi kesulitan ini adalah:

a. Gunting Syarifuddin (20 maret 1950)

Kebijakan gunting syarifuddin adalah pemotongan nilai uang. Tindakan keuangan ini dilakukan pada tanggal 20 maret 1950 dengan cara memotong semua uang memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 keatas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan keuangan ini dilakukan pada masa pemerintahan RIS oleh menteri keuangan pada waktu itu Syarifuddin Prawiranegara.

b. Program Benteng (Kabinet Natsir)

Gagasan program benteng dituangkan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dalam program kabinet Natsir (September-April 1951). Pada saat itu Sumitro menjabat sebagai menteri perdagangan.Selam 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program Benteng ini.Akan tetapi, tujuan dari program ini tidak dapat dicapai dengan baik.Kegagalan program ini disebabkan para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan perusahaan non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.Kegagalan Program Benteng menjadi salah satu sumber defisit keuangan.Walaupun dilanda krisis moneter, namun menteri keuangan pada masa kabinet sukiman, Jusuf Wibisono masih memberikan bantuan kredit, khususnya pada pengusaha

dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah. Dengan memberikan bantuan tersebut diharapkan masih terdapat pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

c. Nasionalisasi De Javasche Bank

Pada tanggal 19 Juni 1951, kabinet Sukiman membentuk nasionalisasi De Javasche Bank. Kemudian berdasarkan keputusan-keputusan pemerintah RI. tanggal 12 Juli 1951, pemerintah memberhentikan Dr. Houwink sebagai Presiden De Javasche Bank dan mengangkat Syarifuddin Prawiranegara sebagai Presiden De Javasche Bank yang baru. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-undang No. 24 tahun 1951 tentang nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai Bank sentral dan Bank Sirkulasi.

d. Sistem Ekonomi Ali-Baba

Di prakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo menteri perekonomian dalam kabinet Ali Sastroamijoyo I. Dalam sistem ini Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi. Dalam kebijakan Ali Baba, pengusaha non pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Selanjutnya, pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional dan memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik, sebab pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

e. Persetujuan Finansial Ekonomi (FINEK)

Pada masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap dikirimkan suatu delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan sebagai berikut:

- Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
- Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
- Hubungan Finek didasarkan pada Undang-Undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Karena pemerintah Belanda tidak mau menandatangani persetujuan ini, maka pemerintah RI mengambil langkah sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Hal ini dimaksudkan untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sebagai tindak lanjut dari pembubaran uni tersebut, pada tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Akibatnya, banyak pengusaha-pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda tersebut.

f. Rencana Pembangunan Lima Tahun

Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Pada bulan Mei 1956, Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961. Rencana Undang-Undang tentang rencana Pembangunan ini

disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. Pembiayaan RPLT ini diperkirakan mencapai Rp. 12,5 miliar. RPLT ini tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- 1) Adanya depresi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
- 2) Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
- 3) Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakannya masing-masing.

g. Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP)

Ketegangan antara pusat dan daerah pada masa Kabinet Djuanda untuk sementara waktu dapat diredakan dengan diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Ir. Djuanda sebagai Perdana Menteri memberikan kesempatan kepada Munap untuk mengubah rencana pembangunan itu agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Akan tetapi, rencana pembangunan ini tidak dapat berjalan dengan baik karena menemukan kesulitan dalam menemukan prioritas. Selain itu ketegangan politik yang tak bisa diredakan juga mengakibatkan pecahnya pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk mengatasi pemberontakan ini diperlukan biaya yang sangat besar sehingga meningkatkan defisit. Sementara itu ketegangan politik antara Indonesia dengan Belanda menyangkut Irian Barat juga memuncak menuju konfrontasi bersenjata.

3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Indonesia pada waktu itu menjurus pada sistem etatisme, artinya segala-galanya di atur dan di pegang oleh pemerintah. Kegiatan-kegiatan ekonomi banyak diatur oleh

peraturan-peraturan pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip ekonomi banyak yang diabaikan. Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun meningkat 40 kali lipat. Dari Rp. 60,5 miliar pada tahun 1960 menjadi Rp. 2.514 miliar pada tahun 1965, sedangkan penerimaan negara pada tahun 1960 sebanyak Rp. 53,6 miliar, hanya meningkat 17 kali lipat menjadi Rp. 923,4 miliar. Mulai bulan Januari – Agustus 1966, pengeluaran negara menjadi Rp. 11 miliar, sedangkan penerimaan negara hanya Rp. 3,5 miliar. Defisit yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Akibatnya menambah berat angka inflasi.

Untuk membendung inflasi dan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya tentang penurunan nilai uang (devaluasi) sebagai berikut.

- a. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50.
- b. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1000 menjadi Rp. 100.
- c. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000

Usaha ini tidak mampu mengatasi masalah kemerosotan ekonomi yang ada, pada tanggal 28 maret 1963 di keluarkanlah landasan baru bagi ekonomi secara menyeluruh. Yaitu Deklarasi Ekonomi (DEKON). Tujuan di bentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

Dalam pelaksanaannya, Dekon mengakibatkan stagnasi dalam perekonomian Indonesia. Kesulitan-kesulitan ekonomi semakin mencolok. Pada tahun 1961-1962 harga barang-barang pada umumnya naik 400%. Politik Konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat semakin memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia.

Pada tanggal 13 Desember 1965 melalui penetapan Presiden No. 27 tahun 1965, diambil langkah devaluasi dengan menjadikan Uang senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1. Sehingga uang

rupiah baru semestinya bernilai 1000 kali lipat uang lama. Akan tetapi didalam Masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi uang rupiah baru. Akibatnya, tindakan moneter pemerintah menekan inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Pada masa Demokrasi terpimpin ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan oleh pemerintah. Akibatnya pemerintah harus mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang sangat besar, sehingga harga-harga kebutuhan pokok makin melambung tinggi. Tingkat harga paling tinggi terjadi pada tahun 1965, yaitu sebesar 200%-300% dari tahun sebelumnya, seiring dengan ekspor yang semakin lesu dan impor yang dibatasi karena lemahnya devisa.

Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin, Presiden Soekarno merasa perlu untuk mempersatukan semua bank negara kedalam satu bank sentral. Untuk itu dikeluarkan penpres No. 7 Tahun 1965 tentang pendirian Bank Tunggal Milk Negara. Tugas bank tersebut sebagai bank sirkulasi, bank sentral dan bank umum. Untuk mewujudkan tujuan itu maka dilakukan peleburan bank-bank negara Seperti Bank koperasi dan Bank Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara, Bank Tabungan negara, Bank Negara Indonesia kedalam Bank Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Bank Negara Indonesia yang terbagi dalam beberapa unit dengan pekerjaan dan tugas masing-masing.

C. Ekonomi Pada Masa Orde Baru (1965-1998)

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Tepatnya sejak bulan Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru

menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter International (IMF). Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama.

Arah dan kebijakan Ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru diarahkan pada pembangunan disegala bidang. Pelaksanaan pembangunan orde baru bertumpu pada program yang dikenal dengan sebuah program yang dikenal dengan *Trilogi Pembangunan*, yaitu sebagai berikut.

- a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- c) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membuat rakyat bebas dari kemiskinan di karenakan pertumbuhan ekonomi yang hanya di nikmati oleh segelintir orang saja. Dampak negatif yang di timbulkan pada masa orde baru ini adalah:

a. Ketergantungan Terhadap Migas

Migas merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi anggaran belanja Negara. Jadi harga Migas sangat berpengaruh bagi pendapatan Negara sehingga turunnya harga minyak mengakibatkan turunya pendapatan Negara.

b. Ketergantungan Terhadap Bantuan Luar Negeri.

Akibat berkurangnya pendapatan yang di dapat dari Migas, pemerintah melakukan kembali penjadwalan proyek-proyek

pembangunan yang ada, yang terutama yang menggunakan valuta asing. Mengusahakan peningkatan ekspor komoditi non migas dan terakhir meminta peningkatan pinjaman luar negeri kepada negara-negara maju. Tahun 1983, Indonesia negara ketujuh terbesar dalam jumlah hutang dan tahun 1987 naik ke peringkat keempat. Ironisnya, di tahun 1986/87, sebanyak 81% hutang yang diperoleh untuk membayar hutang lama ditambah bunganya. Akhir 1970-an, proses pembangunan di Indonesia mengalami “non market failure” sehingga banyak kerepotan dalam proses pembangunan, misalnya merebaknya kemiskinan dan meluasnya kesenjangan pendapatan, terutama disebabkan oleh “market failure”.

Mendekati pertengahan 1980-an, terjadi kegagalan pemerintah (lembaga non pasar) dalam menyesuaikan mekanisme kinerjanya terhadap dinamika pasar. Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan berat akibat kemerosotan penerimaan devisa dari ekspor minyak bumi pada awal 1980-an. Kebijakan pembangunan Indonesia yang diambil dikenal dengan sebutan “structural adjustment” dimana ada 4 jenis kebijakan penyesuaian sebagai berikut.

- a. Program stabilisasi jangka pendek atau kebijakan manajemen permintaan dalam bentuk kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar mata uang dengan tujuan menurunkan tingkat permintaan agregat. Dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai kebijakan mengurangi defisit APBN dengan memotong atau menghapus berbagai subsidi, menaikkan suku bunga uang (kebijakan uang ketat) demi mengendalikan inflasi, mempertahankan nilai tukar yang realistis (terutama melalui devaluasi September 1986).
- b. Kebijakan struktural demi peningkatan output melalui peningkatan efisiensi dan alokasi sumber daya dengan cara mengurangi distorsi akibat pengendalian harga, pajak, subsidi dan berbagai hambatan perdagangan, tarif maupun non tarif. Kebijakan “Paknov 1988” yang menghapus monopoli impor untuk beberapa produk

baja dan bahan baku penting lain, telah mendorong mekanisme pasar berfungsi efektif pada saat itu.

- c. Kebijakan peningkatan kapasitas produktif ekonomi melalui penggalakan tabungan dan investasi. Perbaikan tabungan pemerintah melalui reformasi fiskal, meningkatkan tabungan masyarakat melalui reformasi sektor finansial dan menggalakkan investasi dengan cara memberi insentif dan melonggarkan pembatasan.
- d. Kebijakan menciptakan lingkungan legal yang bisa mendorong agar mekanisme pasar beroperasi efektif termasuk jaminan hak milik dan berbagai tindakan pendukungnya seperti reformasi hukum dan peraturan, aturan main yang menjamin kompetisi bebas dan berbagai program yang memungkinkan lingkungan seperti itu.

Dampak dari kebijakan tersebut cukup meyakinkan terhadap ekonomi makro, seperti investasi asing terus meningkat, sumber pendapatan bertambah dari perbaikan sistem pajak, produktivitas industri yang mendukung ekspor non-migas juga meningkat. Namun, hutang Indonesia membengkak menjadi US\$ 70,9 milyar. Hutang inilah sebagai salah satu faktor penyebab Pemerintahan Orde Baru runtuh. Pemerintahan Orde Baru membangun ekonomi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengendalian inflasi tanpa memperhatikan pondasi ekonomi yang memberikan dampak sebagai berikut.

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia, sebagai salah satu faktor produksi, tidak disiapkan untuk mendukung proses industrialisasi.
- b. Barang-barang impor (berasal dari luar negeri) lebih banyak digunakan sebagai bahan baku dalam proses industri sehingga industri Indonesia sangat bergantung pada barang impor tersebut.
- c. Pembangunan tidak didistribusikan merata ke seluruh wilayah Indonesia dan ke seluruh rakyat Indonesia sehingga hanya sedikit elit politik dan birokrat serta

pengusaha-pengusaha Cina yang dekat dengan kekuasaan saja yang menikmati hasil pembangunan.

Pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dilakukan orde baru secara periodik 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).Pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a) Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)

Tujuan dari Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar –dasar pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya.Sasaran yang hendak dicapai ialah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani.Pelita I lebih menekankan kepada pembangunan bidang pertanian.

b) Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)

Sasaran utama Pelita II yaitu tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.

c) Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pelita III menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan tekanan pada asas pemerataan, yaitu :

- Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak (pangan, sandang dan papan)
- Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
- Pemerataan pembagian pendapatan
- Pemerataan kesempatan kerja
- Pemerataan kesempatan berusaha

- Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan
- Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air dan
- Pemerataan memperoleh keadilan

d) Pelita IV (1 April 1984 – 13 Maret 1989)

Pada titik ini pemerintah lebih menitikberatkan kepada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.

e) Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)

Pada Pelita ini pemerintah menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.

f) Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)

Pada Pelita VI Pemerintah masih menitikberatkan pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

D. Pemerintahan Reformasi (1967-2004)

Pemerintahan reformasi diawali pada tahun 1998. Peristiwa ini dipelopori oleh ribuan mahasiswa yang berdemo menuntut presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya dikarenakan pemerintahan Bapak Soeharto dianggap telah banyak merugikan Negara dan banyak yang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tahun 1998 merupakan tahun terberat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di Asia yang dampaknya sangat terasa di Indonesia. Nilai rupiah yang semula 1 US\$ senilai Rp. 2.000,-

menjadi sekitar Rp. 10.000,- bahkan mencapai Rp. 12.000,- (5 kali lipat penurunan nilai rupiah terhadap dolar). Artinya, nilai Rp. 1.000.000,- sebelum tahun 1998 senilai dengan 500 US\$ namun setelah tahun 1998 menjadi hanya 100 US\$.

Hutang Negara Indonesia yang jatuh tempo saat itu dan harus dibayar dalam bentuk dolar, membengkak menjadi lima kali lipatnya karena uang yang dimiliki berbentuk rupiah dan harus dibayar dalam bentuk dolar Amerika. Ditambah lagi dengan hutang swasta yang kemudian harus dibayar Negara Indonesia sebagai syarat untuk mendapat pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Tercatat hutang Indonesia membengkak menjadi US\$ 70,9 milyar (US\$20 milyar adalah hutang komersial swasta). Pemerintahan reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang sudah mengalami beberapa pergantian presiden, antara lain:

1. Bapak B.J Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)

Pada saat pemerintahan presiden B.J Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan perubahan-perubahan yang cukup berarti di bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk menstabilkan keadaan politik di Indonesia. Presiden B.J. Habibie jatuh dari pemerintahannya karena melepaskan wilayah Timor-timor dari Wilayah Indonesia melalui jejak pendapat.

2. Bapak Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001)

Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Kepemimpinan Abdurrahman Wahid berakhir karena pemerintahannya menghadapi masalah konflik antar etnis dan antaragama.

3. Ibu Megawati (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)

Masa kepemimpinan Megawati mengalami masalah-masalah yang mendesak yang harus diselesaikan yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

- a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
- b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Megawati bermaksud mengambil jalan tengah dengan menjual beberapa asset Negara untuk membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang Negara tetap saja menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai asset telah hilang dan pendapatan Negara menjadi sangat berkurang.

E. Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I (Era SBY-JK 2004-2009)

Masa kepemimpinan SBY terdapat kebijakan yang sikapnya kontroversial, yaitu:

- a. mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke sector pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

- b. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
- c. Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepaladaerah. Investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
- d. Lembaga kenegaraan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dijalankan pada pemerintahan SBY mampu memberantas para koruptor tetapi masih tertinggal jauh dari jangkauan sebelumnya karena SBY menerapkan sistem Soft Law bukan Hard Law. Artinya SBY tidak menindak tegas orang-orang yang melakukan KKN sehingga banyak terjadi money politic dan koruptor-koruptor tidak akan jera dan banyak yang mengulanginya. Dilihat dari semua itu Negara dapat dirugikan secara besar-besaran dan sampai saat ini perekonomian Negara tidak stabil.
- e. Program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dikarenakan persediaan bahan bakar minyak semakin menipis dan harga di pasaran tinggi.
- f. Kebijakan impor beras, tetapi kebijakan ini membuat para petani menjerit karena harga gabah menjadi anjlok atau turun drastis.

Pada tahun 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF (International Monetary Fund). Dengan ini, diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Pengeluaran Negara pun juga semakin membengkak dikarenakan sering terjadinya bencana alam yang menimpa negeri ini.

F. Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II (Era SBY - Boediono, 2009-2014)

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumbuh pesat ditahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6.5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor non migas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada januari 2010.

Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang

berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama pertumbuhan ekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh, dengan kata lain masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara, yaitu:

- a. BI rate
- b. Nilai tukar
- c. Operasi moneter
- d. Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.

Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

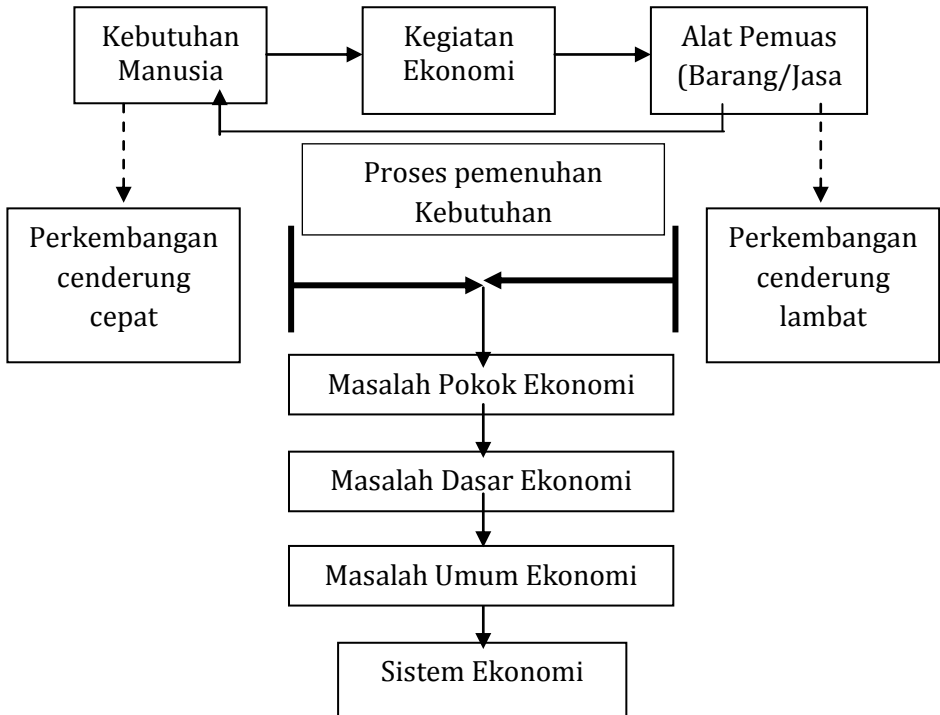
BAB IX

MASALAH PEREKONOMIAN NASIONAL INDONESIA

Sebelum kita bicara tentang permasalahan ekonomi nasional Indonesia, kiranya perlu kita ingat kembali masalah pokok, masalah dasar, dan masalah umum ekonomi yang dihadapi oleh setiap bangsa. Pada hakikatnya, masalah ekonomi bersumber dari adanya ketidak-seimbangan antara kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan yang tersedia. Ketidak-seimbangan tersebut menyebabkan terjadinya kelangkaan alat pemuas kebutuhan, dan pada akhirnya menyebabkan munculnya masalah ekonomi. Masalah ini kemudian dikenal dengan masalah pokok ekonomi. Kita juga mengenal tiga masalah dasar ekonomi yang dihadapi oleh setiap bangsa. Ketiga masalah dasar itu adalah "what" (Komoditi/alat pemuas apa yang harus dihasilkan?): "How" (Bagaimana komoditi/alat pemuas harus dihasilkan?): serta "For Whom" (Untuk siapa komoditi/alat pemuas dihasilkan?) (Samuelson dan Nordhaus, 2001: 8).

Selain masalah pokok dan masalah dasar tersebut, kita juga mengenal masalah umum ekonomi yang dihadapi oleh hampir setiap negara. Masalah umum ekonomi itu meliputi masalah pengangguran, rendahnya produktivitas tenaga kerja, inflasi, ketidak-merataan hasil pembangunan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketergantungan terhadap pihak luar negeri (untuk negara-negara berkembang termasuk Indonesia).

Solusi untuk memecahkan permasalahan ekonomi tersebut berkaitan erat dengan sistem ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan (Sugiharsono, 2015:1-4). Perhatikan gambar berikut.



Gambar: Solusi pemecahan permasalahan ekonomi

A. Permasalahan Ekonomi Indonesia

Dari pendapat para pakar ekonomi dapat dijelaskan bahwa permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini antara lain adalah:

1. Kemiskinan

Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan Indonesia pada tahun 2008 masih berada pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 15,42. Angka ini memang lebih rendah dibanding dengan angka kemiskinan tahun sebelumnya. Namun demikian apabila jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2008 sekitar 240 juta jiwa, berarti masih ada sekitar

36 juta jiwa penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Jumlah penduduk miskin ini merupakan masalah yang cukup berat bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah harus menyediakan subsidi (BLT) yang semakin besar, sementara kemampuan keuangan pemerintah (dari dalam negeri) juga tidak lebih baik.

2. Ketidakmerataan pendapatan masyarakat

Hasil pembangunan ekonomi nasional seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia secara merata. Namun kenyataannya, kelompok penduduk menengah ke atas cenderung lebih banyak menikmati hasil pembangunan tersebut. Data tahun 2004 yang pada tahun 2008/2009 mungkin juga tidak mengalami perubahan secara signifikan, menunjukkan bahwa 40% penduduk Indonesia yang berpendapatan rendah menikmati hasil pembangunan (pembagian pendapatan) sebesar 20,8%; 40% penduduk Indonesia yang berpendapatan menengah menikmati hasil pembangunan (pembagian pendapatan) sebesar 37,1%; dan 20% penduduk Indonesia yang berpendapatan tinggi menikmati hasil pembangunan (pembagian pendapatan) sebesar 42,1%. (Kuncoro, M., 2006: 140). Indeks Gini pun menunjukkan angka yang cukup besar yaitu 0,376 pada tahun 2007. Hal ini berarti bahwa hasil pembangunan ekonomi dalam bentuk pendapatan nasional masih lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang berpendapatan menengah ke atas. Dengan kata lain masih terjadi ketidakmerataan pembagian pendapatan sebagai hasil pembangunan ekonomi nasional.

3. Pengangguran

Data BPS menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka pada tahun 2009 dibanding dengan tahun sebelumnya menunjukkan kenaikan hingga menjadi 9%. Apabila jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2009 naik menjadi

sekitar 242,5 juta jiwa, ini berarti jumlah penganggur di Indonesia pada tahun 2009 menjadi sekitar 21,82 juta jiwa. Jumlah penganggur ini merupakan masalah yang berat bagi pemerintah Indonesia, karena kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja pada tahun 2009 masih jauh dari jumlah tersebut.

4. Inflasi yang relatif masih cukup tinggi

Data Moneter Bank Indonesia 2009 menunjukkan bahwa tingkat inflasi pada bulan Januari 2009 adalah 9,17%. Tingkat inflasi ini lebih rendah dibanding tingkat inflasi pada bulan Desember 2008 yaitu 11,06%. Namun demikian, tingkat inflasi itu masih harus ditekan lebih rendah lagi agar daya beli masya-rakat bisa meningkat, sehingga kesejahteraannya juga meningkat.

5. Ketergantungan terhadap luar negeri cukup tinggi

Dalam aspek produksi tertentu, pemerintah Indonesia masih bergantung pada (diatur) luar negeri, misalnya dalam hal pengelolaan SDA (sumber daya alam). Hal ini mengakibatkan hasil yang diperoleh bangsa Indo-nesia dari pengelolaan SDA tersebut menjadi tidak optimal. Utang luar negeri pun semakin meningkat, (tahun 2009 mencapai Rp1.667 Tr). Akibatnya lebih dari 30% APBN digunakan untuk membayar agsuran utang luar negeri. Jumlah angsuran sebesar itu tentu akan mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional, yang pada akhirnya akan mengurangi kesejahteraan rakyat.

Solusi untuk memecahkan masalah perekonioian bangsa Indonesia tersebut sedikit banyak tentu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia. Sebelum kita berbicara tentang sistem ekonomi yang dianut Indonesia, ada baiknya kita tengok kembali berbagai sistem ekonomi yang

pernah ada di dunia. Samuelson dan Nordhaus (2001: 9) menyebutkan tiga sistem ekonomi yang berpengaruh terhadap pemecahan masalah ekonomi. Ketiga sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi pasar (liberalis), sistem ekonomi terpimpin (sosialis), dan sistem ekonomi campuran.

B. Koperasi, Solusi Masalah Perekonomian Indonesia

Sekarang marilah kita coba mengaitkan koperasi sebagai suatu sistem ekonomi dengan permasalahan perekonomian Indonesia seperti yang telah dipaparkan di muka.

1. Koperasi dan Kemiskinan

Makna yang terkandung dalam pengertian koperasi telah menjelaskan bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat. Dalam hal ini, koperasi akan menjadi wadah kegiatan ekonomi rakyat yang pada umumnya merupakan kelompok menengah ke bawah (miskin). Mereka ini pada umumnya tidak mungkin tertampung pada badan usaha lain seperti Firma, CV, maupun PT. Dengan wadah koperasi, mereka akan dapat mengembangkan kegiatan ekonominya, sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Hal ini tentu dengan catatan: koperasi tersebut harus memiliki kemampuan untuk membina dan mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. Oleh karena itu koperasi harus benar-benar dikelola secara profesional agar mampu menjadi wadah kegiatan ekonomi rakyat yang kondusif. Apabila hal ini dapat dilaksanakan pada setiap wilayah kecamatan, niscaya kemiskinan rakyat di seluruh penjuru Indonesia secara bertahap akan dapat diperbaiki kehidupan ekonominya.

2. Koperasi dan Ketidakmerataan Pendapatan

Apabila manajemen koperasi dilaksanakan secara benar dan profesional, maka rakyat yang menjadi anggota koperasi akan meningkat taraf hidupnya sesuai dengan tujuan koperasi. Dalam peningkatan taraf hidup ini berarti terjadi peningkatan

kemampuan ekonomi (pendapatan/daya beli) dan peningkatan kemampuan non ekonomi (misalnya: pendidikan dan sosial). Dengan peningkatan kemampuan pendidikan dan sosial, mereka tentu akan lebih mampu meningkatkan lagi kemampuan ekonominya. Dengan demikian kemampuan ekonomi (pendapatan) mereka akan bertambah semakin besar. Dengan pertambahan kemampuan ekonomi (pendapatan) tersebut diharapkan ketidakmerataan pendapatan antara masyarakat kecil dengan masyarakat menengah ke atas akan semakin diperkecil. Hal ini berarti bahwa ketidak-merataan pendapatan akan diperkecil dengan adanya peningkatan pendapatan rakyat kecil yang dibina melalui koperasi.

3. Koperasi dan Pengangguran

Apabila koperasi dapat berkembang di setiap wilayah kecamatan di seluruh Indonesia, dan benar-benar mampu membina kegiatan ekonomi rakyat di sekitarnya, tentu koperasi akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Apalagi jika kegiatan ekonomi (produksi dan distribusi) anggotanya dapat berkembang dengan adanya pembinaan koperasi, niscaya kegiatan ekonomi anggota tersebut juga akan menciptakan lapangan kerja tersendiri. Dengan demikian melalui koperasi yang dikelola secara benar dan profesional diharapkan akan diikuti dengan penciptaan-penciptaan lapangan kerja, dan pada akhirnya akan mengurangi pengangguran.

4. Koperasi dan Inflasi

Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu penyebab terjadinya inflasi. Pada umumnya inflasi terjadi sebagai akibat adanya ketidak-seimbangan antara permintaan dan penawaran komoditi. Permintaan komoditi terus meningkat, sedangkan penawarannya tetap atau malah berkurang. Permintaan komoditi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Sementara itu penawaran komoditi dipengaruhi

oleh produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam keadaan inflasi penawaran komoditi harus terus ditingkatkan agar harga komoditi tidak menaik. Untuk meningkatkan penawaran komoditi diperlukan perluasan produksi. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang sangat potensial untuk melakukan perluasan produksi, karena jumlah koperasi yang sangat banyak dan variasi komoditinya pun sangat banyak. Apabila koperasi dikelola secara benar dan profesional, dengan memperhatikan prinsip-prinsip koperasi (keadilan, kemandirian, pendidikan, dan kerja sama), maka tidak mustahil bahwa koperasi akan dapat mempercepat perluasan produksi. Dengan perluasan produksi yang dibantu oleh koperasi ini diharapkan penawaran komoditi akan terus meningkat, dan pada akhirnya akan dapat mengendalikan kenaikan harga komoditi (inflasi).

5. Koperasi dan ketergantungan terhadap luar negeri

Dalam kasus ini, nampaknya koperasi tidak mampu berbuat lebih banyak. Ketergantungan ekonomi terhadap luar negeri cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor politik luar negeri pemerintah kita. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan luar negeri, khususnya yang menyangkut utang luar negeri cenderung dipengaruhi oleh faktor kurang-mampuan pemerintah dalam mengelola politik luar negeri. Oleh karena itu terhadap permasalahan ini, koperasi cenderung tidak mungkin diikutsertakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Namun demikian terhadap keempat permasalahan perekonomian nasional seperti dipaparkan di atas, koperasi masih bisa diharapkan untuk berperan-serta mengatasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anne Booth, William J.O'Malley, Anna Weidemann (ed), 1988. *Sejarah Ekonomis Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Anonym_ <http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/09/pengertian-sistem-ekonomi-tradisional.html>
- Bachri, Saiful. 2005. *Sejarah Perekonomian*. Surakarta: UNS Press
- Burger, DH., 1957. *Sejarah Ekonomis-Sosiologis Indonesia* , terjemahan Prof. Parjudi Atmosudirjo. Jakarta
- Cahyono, Edi. "Karesidenan Pekalongan Kurun Cultuur stelsel Masyarakat Pribumi Menyongsong Pabrik Gula", Jakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 1988
- Chauduri, K.N. 1989. *Trade and Civilization in Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Daryanti, Mubyarto. 1991. *Gula, Kajian Social Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media hlm
- Dochak Latief. 1984. *Perbandingan Sistem Ekonomi: Islam, Liberalisme, Sosialisme*. Yogyakarta: Yayasan penerbitan FKIS IKIP
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Elson, R.E. 1978. *The Cultivation System and 'Agricultural Involution'*. Melbourne: Monash University.
- Fasseur, C. 1975. *Kultuurstelsel en Koloniale Baten: De Nederlandse Exploitatie Van Java 1840-1860*. Leiden: University Press.

- Furnivall. J.S. 2009. *Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute.
- Ginting, Rosalina & Agus Sutono. "Sistem Sewa Tanah Dalam Upaya Penghapusan Feodalisme Di Jawa Abad XIX (Fragmen Sosio-kultural pada Masyarakat Jawa)". *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 1, Januari 2011, hal. 52-57.
- Gregory Grossman. 1995. *Sistem-sistem ekonomi*. Cetakan ketiga. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hermawati, Mifta. "Tanam Paksa Sebagai Tindakan Eksploitasi". *Avatara*, Universitas Negeri Surabaya. e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 1, No. 1, Januari 2013, hal.64-70
- Kartodirdjo, Sartono. 1959. *Tjatanan tentang segi-segi messianistis dalam Sejarah Indonesia*, Jogjakarta.
- Kartodirjo, Sartono dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media
- Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Control : Study Tentang Perubahan Social Di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta : Grasindo.
- Lantik, Andreas. 2012. "Perkembangan Liberalisme dan Kapitalisme Eropa", tersedia (online), <https://andreaslantik.wordpress.com>, Januari 5, 2012.
- Linbald, J. Thomas. 2000. "Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru". Jakarta : LP3ES hlm. 80
- Lukas, Henry S. 1993. *Sejarah Peradaban Barat Abad Tengah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana (terjemahan)
- Marieke Bloembergen. 2011. "Polisi Zaman Hindia Belanda" Jakarta, Kompas media nusantara bekerja sama dengan KITLV-Jakarta.
- Mubyarto. 1987. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan*. Jakarta: LP3ES

- Mulyana, Slamet. 1980. *Dari Holotan ke Jayakarta*. Jakarta : Yayasan Idayu
- Nasution Dj. 1961. *Sejarah Eropa IV*. Bandung: KPPK.
- Niel, Robert Van. 1992. *Java Under the Cultivation System: Collected Writings*. Leiden: KITLV Press.
- Nurseto, Tejo dan Anik Widiastuti. 2011. *Diktat Perekonomian Indonesia I*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
- Rayi Kinasih. 2011. "Pengertian sistem ekonomi menurut para ahli beserta macam-macam sistem ekonomi". <http://rarayiyikinasihblog.blogspot.com/2011/03/pengertian-sistem-ekonomi-menurut-para.html>. diakses pada 14 September 2011.
- Ricklefs, M.C. 1974. *Yogyakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1792. A Hiatory of The Division Java*. London: Oxford University Press.
- Rintuh, Cornelis. 1995. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Saleha, Amaliatun. "Perbandingan Sistem Bakuhan Dan Sistem Sewa Tanah Raffles Di Pulau Jawa Pada Tahun 1811-1830". Bandung: Jurusan Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung, 2007, hal. 1-12
- Samuelson, P.A. dan W.D.Nordhaus. 2001. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Editor F.A. Sutjipto. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siska, Yulia. 2015. *Sejarah Politik*. Jakarta: YSW Wacana.
- Sugiharsono. "Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah ?" FISE Universitas Negeri Yogyakarta

- Sulistiyono, Singgih Tri. 2009. "Konsep Batas Wilayah Negara Di Nusantara: Kajian Historis". Hasil penelitian, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, hal. 1-33
- Suroso. 1994. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Susanto, Racmat. 2007. *Industri Gula Di Kabupaten Kendal Pada Masa Kolonial*. Bandung : Koperasi ilmu pengetahuan sosial.
- Swasono, Sri Edi . 1985. *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- V.J.H. Houben, H.M.J. Maier and W. van der Molen, *Looking in Odd Mirrors: The Java Sea*. Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Asië en Oceanië Leiden Universiteit, 1992
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, "Sejarah Indonesia", tersedia (online)
https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia
- Zulkarnain. "Dampak Penerapan Sistem Tanam paksa Bagi Masyarakat". Jurnal INFORMASI: No.1. XXXVII. Th. 2011. hal.65-81
- Zulkarnain. "Serba Serbi Tanam Paksa". Jurnal Penelitian UNY., tersedia (online).
staff.uny.ac.id/sites/default/.../B.1..JURNAL.pdf, TT, hal. 1-23. diunduh pada Februari 2016.